

Responsible Mining Index Kerangka Kerja 2020

Responsible Mining Index Framework 2020

Inti Sari Metodologi RMI 2020

Ucapan Terima Kasih

Responsible Mining Foundation mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan komentar dan rekomendasi terkait Laporan RMI 2018, termasuk masyarakat yang terkena dampak tambang, perwakilan kelompok/asosiasi warga setempat, gerakan masyarakat, LSM nasional dan internasional, lembaga pemerintah, asosiasi industri, perusahaan tambang, inisiatif/prakarsa multipemangku-kepentingan, lembaga multilateral, investor, akademisi, konsultan ahli, dan lainnya.

Penyandang Dana

Responsible Mining Foundation (RMF) mengucapkan terima kasih kepada para penyandang dana:

Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi
Kementerian Belanda untuk Urusan Luar Negeri

Komite Review Ahli RMF

Sonia Balcazar
Fritz Brugger
Li Li
Glen Mpufane
Lisa Sachs
Prabindra Shakya
Ingrid Watson
Luc Zandvliet

Para ahli lainnya

Hermansyah Abdi, *PP SPKEP SPSI, Indonesia*; Rahul Basu, *The Goa Foundation, India*; Alan Bryden, *DCAF Geneva Centre for Security Sector Governance*; Peter Colley, *Construction, Forestry, Maritime, Mining & Energy Union, Australia*; Diana Culillas, *Swiss Better Gold Association*; Magnus Ericsson, *Luleå University of Technology*; Denis Lanzasova, *Geneva Water Hub, University of Geneva*; Lindsay Newland Bowker, *World Mine Tailings Failures*; Edward O'Keefe, *Synergy Global*; Antonio Pedro, *United Nations Economic Commission for Africa*; Rob Pitman, *Natural Resource Governance Institute*; dan Philippe Spicher, *Amos Advisory*.

Tentang Responsible Mining Foundation

Responsible Mining Foundation (RMF) adalah sebuah organisasi penelitian independen yang mendorong perbaikan terus-menerus di bidang pertambangan yang bertanggung jawab di seluruh industri dengan mengembangkan alat dan kerangka kerja, membagikan data yang menjadi kepentingan publik, dan mendorong keterlibatan yang matang dan konstruktif antara perusahaan tambang dengan para pemangku kepentingan yang lain.

Yayasan ini mendukung prinsip bahwa pertambangan mineral dan logam hendaknya memberikan manfaat bagi perekonomian, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menghormati lingkungan negara-negara produsen, di samping juga memberikan manfaat bagi perusahaan tambang itu sendiri secara adil dan layak.

Pekerjaan dan penelitian Yayasan ini mencerminkan apa yang secara wajar diharapkan masyarakat secara umum dari perusahaan tambang dalam hal ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Sebagai sebuah yayasan independen, RMF tidak menerima dana atau sumbangan lain dari industri pertambangan.

Desain laporan

Omdat Ontwerp, Belanda

Informasi selengkapnya

Metodologi lengkap RMI 2020 tersedia di situs web
Responsible Mining Index: www.responsibleminingfoundation.org.

Hasil RMI 2018 tersedia di: www.responsibleminingindex.org

Responsible Mining Index Kerangka Kerja 2020

Inti Sari Metodologi RMI 2020

Glosarium

ASM	Artisanal and small-scale mining	Pertambangan Rakyat dan Skala Kecil
EESG	Economical, Environmental, Social and Governance	Ekonomi, Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola
EIA	Environmental Impact Assessment	Penilaian Dampak Lingkungan
EITI	Extractive Industries Transparency Initiative	Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif
ESG	Environmental, Social and Corporate Governance	Ekonomi, Sosial, dan Tata Kelola
FPIC	Free, Prior and Informed Consent	Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan
GRI	Global Reporting Initiative	Prakarsa Pelaporan Global
IFC	International Finance Corporation	Korporasi Keuangan Internasional
ILO	International Labor Organization	Organisasi Buruh Internasional
LSM	Large Scale Mining	Pertambangan Skala Besar
R&D	Research and Development	Penelitian dan Pengembangan
RMF	Responsible Mining Foundation	Responsible Mining Foundation
RMI	Responsible Mining Index	Indeks Pertambangan yang Bertanggung Jawab
SASB	Sustainability Accounting Standard Board	Badan Standar Akuntansi Berkelanjutan
SDGs	UN Sustainability Development Goals	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB
SIA	Social Impact Assessment	Penilaian Dampak Sosial
STEM	Science, Technology, Engineering and Mathematics	Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika
UNGC	UN Global Compact	UN Global Compact
UNGP	UN Guiding Principles on Business and Human Rights	Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia
VPs	Volunteering Principles	Prinsip-Prinsip Sukarela

Daftar Isi

6	Pendahuluan
13	Kerangka Kerja RMI 2020: topik, indikator, dan pertanyaan metrik
14	Cara membaca bagian ini
15	 A Pembangunan Ekonomi
25	 B Pelaksanaan Bisnis
45	 C Manajemen Daur Hidup
56	 D Kesejahteraan Masyarakat
92	 E Kondisi Kerja
108	 F Tanggung Jawab Lingkungan
129	 MS Indikator lokasi tambang dan pertanyaan metrik
134	Lampiran
135	1 Jenis Bukti: Contoh-Contoh Jenis Bukti yang relevan untuk indikator
174	2 SDG: RMI 2020 mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB

Pendahuluan

Kerangka Kerja RMI 2020

Dokumen Kerangka Kerja ini menetapkan konten utama Responsible Mining Index (RMI) 2020. Dokumen ini memberikan referensi lengkap tentang aspek-aspek utama pertambangan yang bertanggung jawab berdasarkan ekspektasi masyarakat terhadap perusahaan tambang skala besar. Sebagai inti sari Metodologi RMI 2020, kerangka kerja ini mencakup informasi tentang 43 topik, dengan tinjauan singkat tentang masing-masing topik beserta indikator dan metrik yang digunakan dalam penilaian RMI untuk mengukur kebijakan dan praktik perusahaan tambang terkait topik-topik tersebut.

Responsible Mining Index (RMI)

Indeks Pertambangan yang Bertanggung Jawab (RMI), yang dihasilkan oleh Responsible Mining Foundation tiap dua tahun, merupakan sebuah penilaian berbasis-bukti tentang kebijakan dan praktik perusahaan tambang skala besar, baik di tingkat korporasi maupun di tingkat lokasi tambang, tentang beraneka macam persoalan ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola (EESG).

RMI menilai perusahaan dari perspektif ekspektasi masyarakat terhadap perusahaan tambang skala besar dan mengkaji tingkat keberhasilan perusahaan dalam menjawab permasalahan EESG secara sistematis di semua aktivitas tambang dan di sepanjang daur hidup proyek. Penilaian tersebut didasarkan pada informasi yang tersedia secara publik tentang perusahaan dan lokasi tambang mereka.

Metodologi dan ruang lingkup RMI telah dikembangkan melalui konsultasi dengan para ahli dalam jaringan Responsible Mining Foundation Yayasan yang luas dan berbagai pemangku kepentingan,

meliputi masyarakat yang terdampak tambang, organisasi masyarakat sipil, gerakan masyarakat, serikat buruh, LSM nasional dan internasional, badan-badan pemerintah, asosiasi industri, perusahaan tambang, prakarsa multipemangku kepentingan, organisasi multilateral, investor, akademisi, konsultan, dan lain-lain. Secara khusus, fokus penilaian RMI terkait ekspektasi masyarakat terhadap perusahaan tambang telah dimatangkan oleh dua putaran lokakarya diskusi dengan masyarakat terdampak pertambangan dan masyarakat sipil di negara-negara produsen, seperti Pantai Gading, India, Indonesia, Mongolia, Peru, dan Afrika Selatan.

Ruang Lingkup RMI 2020

Penilaian RMI meliputi 43 topik, dikelompokkan menjadi enam bidang tematis.

Penilaian RMI sebagian besar berfokus pada kebijakan dan praktik di tingkat perusahaan, dengan menggunakan tiga jenis indikator (atau 'bidang pengukuran'):

- Indikator **Komitmen** menilai tingkat keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan komitmen resmi, yang didukung oleh manajemen senior, dan menetapkan tanggung jawab serta sumber daya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut.
- Indikator **Tindakan** menilai tingkat keberhasilan perusahaan dalam menempuh langkah-langkah secara sistematis untuk meningkatkan dan memaksimalkan manfaat potensial EESG dan menghindari, meminimalkan, atau mengurangi dampak negatif EESG dari aktivitas mereka.
- Indikator **Efektivitas** menilai tingkat keberhasilan perusahaan dalam melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerja mereka dalam mengatasi permasalahan EESG.

Selain itu, penilaian RMI juga menyertakan serangkaian indikator lokasi tambang dalam jumlah yang lebih sedikit untuk menilai tindakan di lokasi tambang pada topik-topik berikut: tenaga kerja lokal, pengadaan lokal, viabilitas masyarakat pascapenutupan

tambang, keluhan masyarakat, keluhan pekerja, kualitas udara, kualitas air, kuantitas air, manajemen limbah tambang, dan kesiapsiagaan darurat.

Gambar 1 Kerangka Kerja Analisis RMI



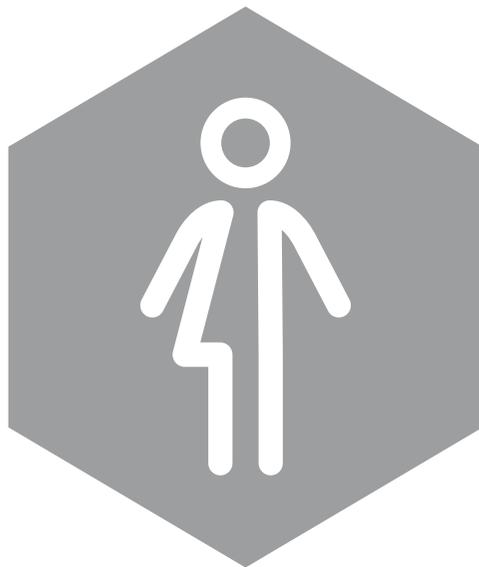
Gambar 2 Topik RMI

<p>A Pembangunan Ekonomi </p> <p>A.01 Perencanaan Pembangunan Sosio-Ekonomi Nasional dan Supranasional</p> <p>A.02 Pengadaan Nasional dan Supranasional</p> <p>A.03 Penelitian dan Pengembangan Kolaboratif</p> <p>A.04 Meningkatkan Basis Keterampilan Nasional</p>	<p>E Kondisi Kerja </p> <p>E.01 Kesehatan dan Keselamatan Kerja</p> <p>E.02 Penghapusan Kerja Paksa dan Pekerja Anak</p> <p>E.03 Nondiskriminasi dan Kesempatan yang Sama</p> <p>E.04 Hak untuk Berkumpul, Berunding Bersama, dan Kebebasan Berserikat</p> <p>E.05 Upah Hidup</p> <p>E.06 Manajemen Redundansi Kolektif</p> <p>E.07 Jaminan Perlindungan Pekerja</p>
<p>B Pelaksanaan Bisnis </p> <p>B.01 Etika Bisnis, Antisuap, dan Antikorupsi</p> <p>B.02 Pertanggungjawaban dan Keragaman Direksi dan Manajemen Senior</p> <p>B.03 Pengungkapan Kontrak</p> <p>B.04 Transparansi Pajak</p> <p>B.05 Kepemilikan Manfaat</p> <p>B.06 Pembayaran ke Negara-Negara Produsen</p> <p>B.07 Praktik-Praktik Lobi</p> <p>B.08 Penandatanganan Kontrak dan Pemerolehan Sumber Daya yang Bertanggung Jawab</p>	<p>F Tanggung Jawab Lingkungan </p> <p>F.01 Pemeliharaan Lingkungan</p> <p>F.02 Manajemen Limbah Tambang</p> <p>F.03 Air</p> <p>F.04 Kebisingan dan Getaran</p> <p>F.05 Keanekaragaman Hayati dan Jasa Lingkungan</p> <p>F.06 Perubahan Iklim dan Efisiensi Energi</p> <p>F.07 Manajemen Bahan-Bahan Berbahaya</p> <p>F.08 Kesiapsiagaan Darurat</p>
<p>C Manajemen Daur Hidup </p> <p>C.01 Manajemen Daur Hidup Tambang</p> <p>C.02 Proses Persetujuan Proyek</p> <p>C.03 Penutupan Tambang dan Viabilitas Pascapenutupan</p> <p>C.04 Uji Tuntas Merger, Akuisisi, dan Pelepasan</p>	
<p>D Kesejahteraan Masyarakat </p> <p>D.01 Hak Asasi Manusia</p> <p>D.02 Keamanan dan Wilayah yang Terdampak Konflik</p> <p>D.03 Keterlibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan</p> <p>D.04 Viabilitas Ekonomi dan Sosial</p> <p>D.05 Pemanfaatan Lahan</p> <p>D.06 Kesehatan Masyarakat</p> <p>D.07 Keadilan Gender</p> <p>D.08 Masyarakat Adat</p> <p>D.09 Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan</p> <p>D.10 Pemandangan dan Pemukiman Kembali</p> <p>D.11 Pertambangan Rakyat dan Skala Kecil</p> <p>D.12 Keluhan dan Penyelesaian</p>	<p>MS Indikator lokasi tambang </p> <p>MS.01 Tenaga Kerja Lokal</p> <p>MS.02 Pengadaan Lokal</p> <p>MS.03 Perencanaan Pascapenutupan Tambang</p> <p>MS.04 Keluhan Masyarakat</p> <p>MS.05 Keluhan Pekerja</p> <p>MS.06 Kualitas Udara</p> <p>MS.07 Kualitas Air</p> <p>MS.08 Kuantitas Air</p> <p>MS.09 Manajemen Limbah Tambang</p> <p>MS.10 Kesiapsiagaan Darurat</p>

Gender dan Hak Asasi Manusia: Permasalahan lintas bidang dalam RMI 2020

Gender dan Hak Asasi Manusia adalah dua masalah yang saling bersinggungan dalam Kerangka Kerja RMI 2020, yang terintegrasi lintas bidang tematis yang berbeda-beda. Permasalahan lintas bidang ini sudah diidentifikasi oleh RMF sebagai bidang yang sangat penting bagi pertambangan yang bertanggung jawab

dan khususnya dalam mencegah, menghindari, dan memitigasi dampak buruk. Meskipun ada topik khusus dalam Kerangka Kerja untuk Keadilan Gender dan Hak Asasi Manusia, permasalahan ini juga melekat dalam indikator dan pertanyaan metrik di berbagai topik lain.





Gender

Di masyarakat yang terdampak pertambangan, perempuan terkena dampak secara berbeda dan tidak proporsional oleh aktivitas pertambangan, dan kerap terpinggirkan dalam kegiatan kerja sama dan berbagi manfaat oleh perusahaan, dibandingkan kaum laki-laki. Dan di dalam angkatan kerja perusahaan tambang, perempuan kurang terepresentasikan dan menghadapi risiko diskriminasi serta pelecehan dan kekerasan berbasis-gender yang lebih tinggi, sedangkan kebutuhan khusus pekerja perempuan, termasuk Alat Pelindung Diri dan layanan kesehatan berfokus-perempuan yang memadai sering diabaikan.

Kehadiran perusahaan tambang dapat meningkatkan ketimpangan gender di wilayah yang terdampak. Dalam hal ini, perusahaan tambang tidak hanya memiliki tanggung jawab untuk 'tidak membawa dampak buruk', tetapi juga berkepentingan untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan agar dapat mewujudkan potensi mereka dan memiliki akses untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosio-budaya dan pembangunan perekonomian lokal.

Tujuan digunakannya pandangan yang multiaspek tentang permasalahan gender di dalam Kerangka Kerja RMI, adalah untuk:

- Mendorong perbaikan terus-menerus dalam pengarusutamaan permasalahan gender di dalam sistem perusahaan dan pengembangan kebijakan dan praktik tanggap-gender;
- Menilai kisaran kinerja saat ini dalam mengelola berbagai aspek gender di dalam pertambangan dan menyoroti praktik utama dalam permasalahan utama terkait gender; dan
- Berkontribusi dan mendorong penyediaan data terpilah gender dan informasi spesifik perempuan yang berkaitan dengan pertambangan yang bertanggung jawab.

Permasalahan gender menyinggung beragam aspek dari Kerangka Kerja RMI, meliputi misalnya:

- Perimbangan gender dalam posisi manajemen senior dan keanggotaan Direksi, serta di seluruh angkatan kerja perusahaan tambang (indikator B.02.2, MS.01);
- Langkah-langkah untuk mendorong partisipasi perempuan di dalam program keterlibatan masyarakat dan investasi masyarakat, misalnya, mendorong perempuan dan laki-laki untuk memetik manfaat dari dukungan pada pengembangan bisnis dan pengadaan lokal (indikator D.03.1, D.04.1, D.04.2);
- Penilaian perusahaan tentang dampak aktivitasnya terhadap perempuan, dan berbagai upaya oleh perusahaan untuk melacak dan meningkatkan kinerjanya dalam mengatasi dampak tersebut (indikator D.04.3, D.07.1); dan
- Sistem perusahaan untuk melindungi para pekerja perempuan dari pelecehan dan kekerasan berbasis-gender serta untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dan keselamatan khusus bagi pekerja perempuan (E.01.3, E.01.4).



Hak Asasi Manusia

Sektor pertambangan memiliki rekam jejak yang buruk dalam hal hak asasi manusia dan berpotensi tinggi melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia, mengingat tingginya risiko kecelakaan fatal dan insiden pencemaran yang mengancam jiwa, praktik ketenagakerjaan yang melanggar hak, berikutan ancaman dan serangan oleh satuan keamanan terhadap anggota masyarakat yang terdampak tambang dan para pembela HAM.

Di bawah Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM, perusahaan berkewajiban menghormati hak asasi manusia dengan mengambil tindakan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengatasi risiko HAM yang berkaitan dengan kehadiran atau aktivitas mereka, dan memberikan penyelesaian bagi dampak buruk terkait HAM yang mereka timbulkan atau punya andil di dalamnya.

Permasalahan hak asasi manusia terintegrasi di seluruh Kerangka Kerja RMI 2020, dengan tujuan untuk:

- Melacak upaya-upaya baru oleh perusahaan tambang dalam mengatasi hak-hak asasi manusia dalam berbagai aspek bisnis mereka;
- Menilai kisaran kinerja saat ini dalam mengelola permasalahan HAM dan menyoroti praktik-praktik utama dalam memahami, mencegah, dan menyelesaikan pelanggaran HAM; dan
- Mendorong perbaikan terus-menerus bagi pengambilan pendekatan sistematis perusahaan untuk mengelola permasalahan HAM di berbagai aktivitas, operasi, dan rantai pasokan.

Berdasarkan serangkaian hak yang luas yang dikukuhkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hampir seluruh Kerangka Kerja RMI 2020 berkaitan dengan permasalahan HAM. Misalnya:

- Hak akan standar hidup dan pendidikan yang layak diuraikan melalui fokus pada pertumbuhan ekonomi yang luas, dan pengembangan keterampilan yang ada di bidang tematis

Pembangunan Ekonomi serta indikator viabilitas ekonomi di bidang tematis Manajemen Siklus Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat;

- Hak untuk bergabung dalam serikat pekerja, menerima gaji yang layak, dan bebas dari perbudakan diuraikan langsung di bidang tematis Kondisi Kerja; dan
- Hak atas hidup dan keamanan diri diuraikan dalam bentuk, misalnya, pencegahan, penghindaran, dan mitigasi risiko lingkungan di bidang tematis Tanggung Jawab Lingkungan.

Selain itu, hak asasi manusia tertuang secara tersurat dalam indikator dan pertanyaan metrik di beberapa bagian Kerangka Kerja. Ini meliputi:

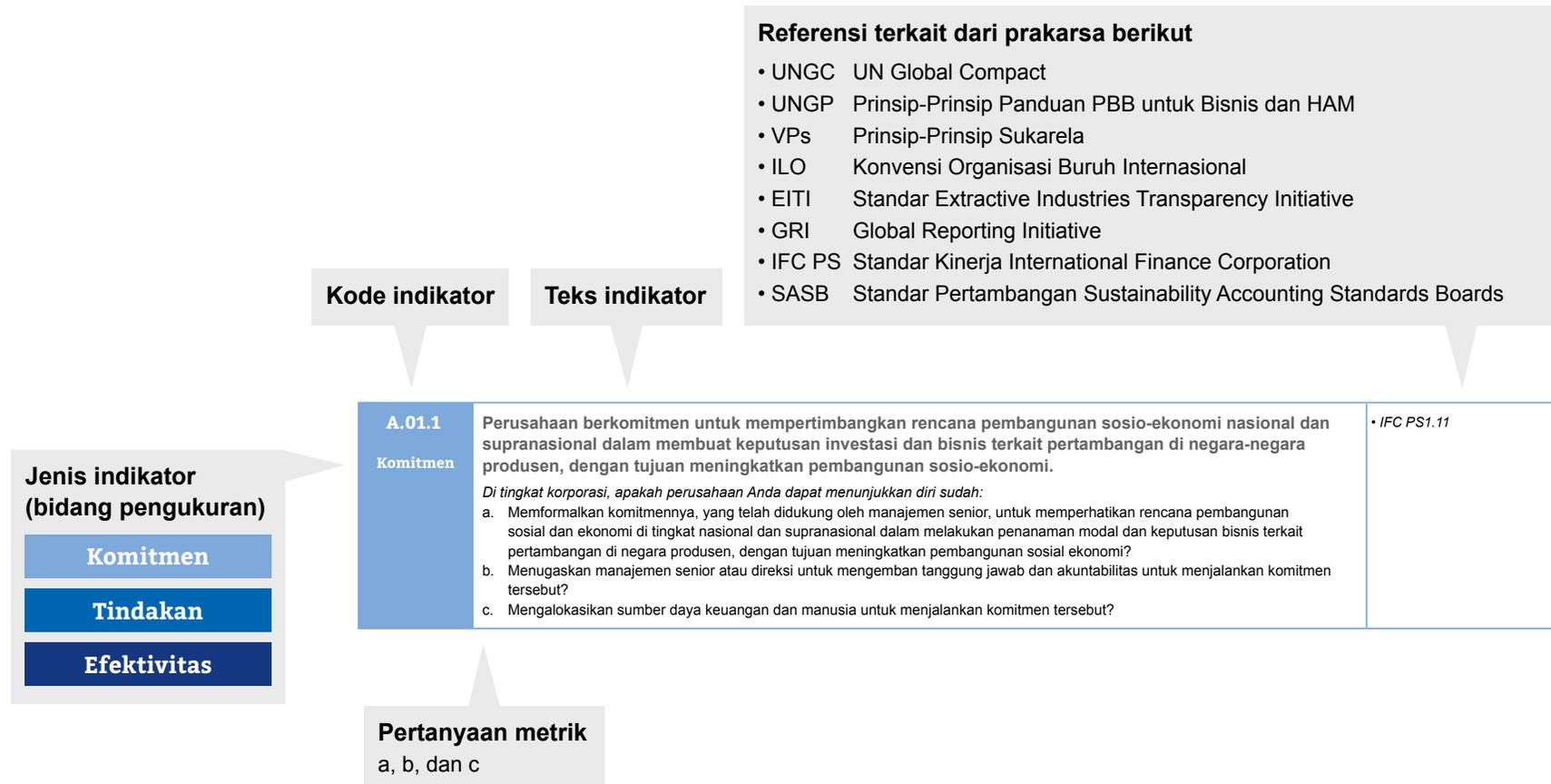
- Komitmen formal oleh perusahaan untuk menghormati hak-hak asasi manusia, sejalan dengan Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan HAM, dan komitmen khusus untuk menghargai hak-hak Para Pembela HAM dan Masyarakat Adat (D.01.1, D.01.4, D.09.1);
- Sistem korporasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengatasi risiko hak asasi manusia di semua operasi dan lintas rantai pasok, dengan langkah-langkah khusus dalam kasus operasi tambang di wilayah yang terdampak konflik atau rawan atau wilayah dengan Masyarakat Adat (D.01.2, D.02.2, D.08.1);
- Sistem uji tuntas yang mengatasi risiko HAM yang berkaitan dengan pemasok dan kontraktor, dan terkait dengan merger, akuisisi, dan pelepasan (B.08.1, C.04.1); dan
- Pelacakan sistematis oleh perusahaan terhadap kinerjanya dalam mengelola permasalahan HAM, dan berbagai upaya untuk meninjau dan meningkatkan kinerjanya, dengan upaya-upaya tambahan yang berkaitan dengan penghormatan hak-hak Masyarakat Adat berikut pencegahan dan penyelesaian pelanggaran HAM yang berkaitan dengan manajemen keamanan, sejalan dengan Prinsip-Prinsip Sukarela di bidang Keamanan dan Hak Asasi Manusia (D.01.3, D.02.1, D.08.2). ■

Kerangka Kerja RMI 2020: topik, indikator, dan pertanyaan metrik

Subbagian ini mengulas Kerangka Kerja RMI 2020, yang meliputi:

- Deskripsi setiap bidang tematis dan masing-masing topik – apa saja cakupannya dan mengapa penting bagi pertambangan yang bertanggung jawab, bagi perusahaan tambang, dan bagi pemangku kepentingan lainnya.
- Untuk setiap topik, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB dengan target terkait.
- Detail masing-masing indikator dan pertanyaan metriknya – dasar penilaian RMI.
- Daftar prakarsa terkait dan kerangka kerja pelaporan dengan elemen-elemen yang secara umum sejalan dengan masing-masing indikator RMI. Hal ini disajikan sebagai petunjuk ilustratif bagi perusahaan, yang memperlihatkan posisi mereka, yaitu apakah mereka sudah mengumpulkan dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan indikator RMI.

Cara membaca bagian ini





A Pembangunan Ekonomi



Ekstraksi mineral dan logam skala besar merupakan kesempatan satu kali yang sangat penting bagi negara-negara produsen dan masyarakatnya untuk memetik keuntungan ekonomi jangka panjang dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini. Potensi pendapatannya sangat besar: kekayaan mineral, jika dikelola dengan baik, dapat mengubah perekonomian nasional, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, meningkatkan keadilan antargenerasi, dan meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan penduduk sebuah negara. Namun keuntungan tersebut sering kali tidak terwujud. Beberapa negara paling kaya sumber daya alam adalah negara termiskin di dunia dan kekayaan mineral mereka, bukannya membawa kemakmuran, justru dipandang mempertajam kemiskinan dan memicu korupsi serta konflik. Bahkan di negara-negara maju sekalipun, pembangunan pertambangan yang berwawasan sempit bisa menimbulkan dampak negatif antargenerasi dan berjangka panjang.

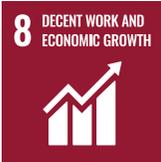
Pemerintah negara-negara produsen bertanggung jawab untuk memelihara sumber daya mineral mereka dan dengan penuh tanggung jawab mengelola pendapatan yang dihasilkan dari ekstraksi sumber daya mineral tersebut. Tata kelola yang baik sangatlah penting agar pertambangan mampu mewujudkan potensinya dalam menyumbang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pada saat yang sama, perusahaan-perusahaan tambang memainkan peran penting dalam memastikan potensi investasi dan aktivitas mereka mampu meningkatkan secara optimal pembangunan sosio-ekonomi di negara-negara produsen dan kawasan yang lebih luas.

Perusahaan tambang skala besar, yang bekerja sama secara kemitraan dengan para pemangku kepentingan yang lain, dapat memanfaatkan investasi terkait tambang untuk mendongkrak capaian pembangunan dan, dengan demikian, berkontribusi pada Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDG). Sebagai contoh, infrastruktur tambang yang direncanakan dengan baik dapat melecut pembangunan nasional dan pertumbuhan supranasional di kawasan yang lebih luas (Lihat A.01), sedangkan strategi pengadaan yang bertanggung jawab dapat membangun kapasitas negara produsen dalam menyediakan berbagai barang, barang habis pakai, dan jasa selain di bidang pertambangan (Lihat A.02). Perusahaan tambang juga dapat menopang pembangunan kapasitas dengan memfasilitasi pengembangan serta alih keterampilan dan teknologi ke sektor lain (Lihat A.03 dan A.04). Mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam memanfaatkan pendapatan mineral juga luar biasa penting (Lihat B.04, B.05, B.06, B.07).

Industri pertambangan global semakin menyadari betapa pentingnya, dan menindaklanjuti berbagai peluang, untuk berkontribusi bagi pembangunan yang berkelanjutan. Dengan membangun kemitraan yang konstruktif dengan pemerintah negara-negara produsen, industri sejenis, masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan yang lain untuk mengubah peluang ini menjadi manfaat, perusahaan tambang dapat memperkuat posisi mereka sebagai warga korporasi yang baik dan mitra pembangunan yang tepercaya.

A.01

Perencanaan Pembangunan Sosio-Ekonomi Nasional dan Supranasional



Di semua negara, infrastruktur transportasi, air, energi, dan teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi kebutuhan bagi pembangunan berkelanjutan dan masyarakat yang dinamis dan tangguh. Namun di banyak negara berkembang, kebutuhan infrastruktur sangat luas dan tidak dapat dijangkau oleh banyak warga. Bahkan di beberapa wilayah mungkin sedikit sekali atau tidak ada infrastruktur yang memadai (misalnya, fasilitas pelabuhan, jalan, atau rel kereta, energi, air) untuk mendukung pertambangan, yang mengakibatkan rendahnya produktivitas dan daya saing operasi tambang.

Pembangunan Infrastruktur terkait proyek pertambangan besar memberikan kesempatan unik bagi negara-negara berkembang untuk mengatasi kelemahan sektor infrastrukturnya, dan bagi infrastruktur mineral agar bisa dibagi bersama, dimanfaatkan, dan dioptimalkan bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Infrastruktur bisa menjadi pendorong penting agar masyarakat pertambangan dapat “terlepas dari keterkotakan/enklave” dan memfasilitasi hubungan yang dapat menunjang beragam jenis aktivitas perekonomian di tingkat lokal, subnasional, dan nasional.

Pembangunan strategis infrastruktur bersama dapat menciptakan situasi yang saling menguntungkan yang memungkinkan proyek pertambangan baru untuk mengirimkan produknya ke pasar secara efisien dan terjangkau sambil tetap mendongkrak pendapatan dari pembangunan ekonomi yang lebih luas. Biaya tinggi dan risiko keterpaparan modal dapat dikelola lewat kemitraan dengan

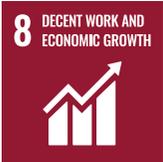
pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain, di samping tetap memudahkan negara-negara produsen untuk memaksimalkan keuntungan infrastruktur tersebut (misalnya, untuk menciptakan poros atau koridor industri baru, menghubungkan pasar dengan lebih baik, dan meningkatkan pergerakan barang, jasa, dan orang).

Namun, jika tidak direncanakan dan dikelola dengan baik, keuntungan potensial dari pembangunan pertambangan dan infrastruktur terkait mungkin tidak terwujud, dan bahkan bisa menimbulkan dampak negatif, seperti bertambahnya kerusakan lingkungan, konflik, dan kemiskinan. Koordinasi dengan proses perencanaan pemerintah subnasional dan nasional, termasuk yang berkaitan dengan potensi migrasi masuk (influks/ arus masuk pendatang) yang menyertai pembangunan proyek-proyek pertambangan besar dan infrastruktur terkait, dapat membantu menjamin ketersediaan layanan yang mencukupi (misalnya, air dan pengolahan limbah, pemukiman yang layak, rumah sakit, sekolah) dan sumber daya sosial bagi masyarakat dan wilayah yang berpotensi terdampak oleh kehadiran perusahaan tambang.

Jika pertambangan dibangun sejalan dengan kepentingan nasional dan supranasional yang lebih luas, kontribusi dari industri pertambangan berpotensi membawa transformasi dengan menarik dan merangsang perdagangan, investasi, dan pengembangan bisnis, memperkuat capaian dalam penurunan angka kemiskinan, dan memaksimalkan potensi berbagai sektor ekonomi yang lain. ■

<p>A.01.1 Komitmen</p>	<p>Perusahaan berkomitmen untuk mempertimbangkan rencana pembangunan sosio-ekonomi nasional dan supranasional dalam membuat keputusan investasi dan bisnis terkait pertambangan di negara-negara produsen, dengan tujuan meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Memformalkan komitmennya, yang telah didukung oleh manajemen senior, untuk memperhatikan rencana pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat nasional dan supranasional dalam melakukan penanaman modal dan keputusan bisnis terkait pertambangan di negara produsen, dengan tujuan meningkatkan pembangunan sosial ekonomi? Menugaskan manajemen senior atau direksi untuk mengemban tanggung jawab dan akuntabilitas untuk menjalankan komitmen tersebut? Mengalokasikan sumber daya keuangan dan manusia untuk menjalankan komitmen tersebut? 	<p>• IFC PS1.11</p>
<p>A.01.2 Tindakan</p>	<p>Bila berlaku sesuai, perusahaan menerapkan sistem untuk menjamin agar operasinya mampu bekerja secara kolaboratif dengan pemerintah subnasional negara-negara produsen terkait perencanaan pembangunan sosio-ekonomi.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Sudah menerapkan sistem untuk menjamin agar operasinya bekerja sama dengan pemerintah subnasional negara-negara produsen guna mengidentifikasi prioritas pembangunan sosio-ekonomi yang dapat dimainkan peran kolaboratif di dalamnya? Sudah menerapkan sistem untuk menjamin agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna mewujudkan prioritas pembangunan bekerja sama dengan pemerintah subnasional? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis dan kolaboratif dengan pemerintah subnasional? 	

A.02 Pengadaan Nasional dan Supranasional



Pembangunan dan operasi pertambangan skala besar berpotensi menyumbang pendapatan yang besar dan peluang diversifikasi ekonomi di negara-negara produsen dan secara regional melalui belanja barang dan jasa oleh perusahaan tambang. Bahkan, tingkat pengeluaran perusahaan pertambangan besar untuk pengadaan dalam negeri biasanya lebih tinggi daripada gabungan pengeluaran untuk pajak, gaji, dan investasi masyarakat. Namun sejumlah besar nilai barang dan jasa yang digunakan oleh proyek-proyek pertambangan sering kali berasal dari impor, yang bisa menimbulkan ketegangan antara perusahaan tambang dengan masyarakat atau pemerintah. Persyaratan input yang sangat teknis atau khusus, kendala dalam mengakses pendanaan, kurangnya kecakapan yang sesuai, dan singkatnya jangka waktu pemenuhan merupakan faktor yang berpotensi menghambat pemasok nasional atau regional dalam memenuhi kebutuhan proyek pertambangan.

Beberapa negara telah mengesahkan peraturan atau menambahkan ketentuan ke dalam kontrak yang mewajibkan atau mendorong perusahaan industri ekstraktif agar memprioritaskan penggunaan produk, bisnis, jasa, dan pekerja dari dalam negara atau wilayah yang lebih luas. Namun pendekatan di atas tidak selalu memberikan keuntungan yang diharapkan dikarenakan adanya korupsi, perlawanan dari berbagai kepentingan di dalam negeri, dan kurangnya kapasitas lokal dalam memberikan barang dan jasa yang dibutuhkan.

Di beberapa negara, pembatasan perdagangan menghalangi digunakannya persyaratan muatan lokal yang bersifat wajib. Jika tidak ada regulasi, beberapa perusahaan tambang secara sukarela membuat target dan prakarsa pengadaan untuk mendukung pemasok nasional atau regional, termasuk dengan memberlakukan kewajiban bagi kontraktor mereka sendiri untuk mengambil pasokan dari dalam negeri atau wilayah yang lebih luas.

Peningkatan kapasitas pemasok nasional atau wilayah yang lebih luas untuk memenuhi standar dan spesifikasi perusahaan bisa memakan waktu lama. Karena itu, perusahaan dianjurkan untuk menilai kebutuhan pengadaannya sendiri sejak awal dalam tahap perencanaan proyek dan mengidentifikasi peluang pengadaan untuk berbagai tahap siklus hidup pertambangan, termasuk pengembangan, produksi, dan penutupan. Strategi pengadaan yang bertanggung jawab dapat dioptimalkan sebaik-baiknya jika muncul kerja sama yang luas antara pemerintah, asosiasi industri, masyarakat sipil, dan perusahaan tambang lain untuk menyusun pendekatan yang sesuai dengan pasokan dan permintaan nasional dan wilayah yang lebih luas.

Banyak sekali keuntungan dari peningkatan peluang pengadaan di tingkat nasional atau supranasional. Memprioritaskan pengadaan nasional dan supranasional dan mengembangkan penelitian dan pengembangan yang terkait (Lihat A.03) dapat membantu membangun perekonomian yang lebih kuat melalui penciptaan lapangan kerja, penerimaan pajak, kecakapan dan kapasitas teknologi yang jauh melampaui pertambangan. (Untuk uraian tentang manfaat dari peningkatan peluang pengadaan masyarakat lokal, lihat D.04) Selain itu, dengan mendukung pemasok baru dan yang sudah mapan untuk memenuhi standar ketenagakerjaan, lingkungan, sosial, dan HAM yang tinggi, perusahaan tambang dapat mengasah potensi pemasok lokal untuk menyediakan produk dan jasa mereka di luar sektor pertambangan, ke dalam rantai pasokan regional atau global.

Perusahaan tambang juga memetik keuntungan strategis dari upaya memajukan pengembangan pengadaan nasional dan supranasional yang lebih luas, seperti menurunkan biaya produksi, biaya logistik, dan waktu pengiriman, memfasilitasi akses yang aman ke barang dan jasa yang penting, mengurangi jejak lingkungan dari praktik pemerolehan pasokan, dan memperkuat izin sosial untuk beroperasi. ■

<p>A.02.1</p> <p>Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu menciptakan peluang pengadaan bagi pemasok di tingkat nasional dan supranasional.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi peluang bagi, dan kendala akses ke, pengadaan dari pemasok di tingkat nasional dan/atau supranasional? Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna menciptakan peluang pengadaan bagi pemasok di tingkat nasional dan/atau supranasional? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis? 	
<p>A.02.2</p> <p>Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya terkait pengadaan nasional dan supranasional.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan lintas kurun waktu yang berurutan, tentang pengadaan nasional dan supranasionalnya, yang memperlihatkan proporsi dan jumlah yang dibelanjakan? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk menciptakan peluang pengadaan bagi pemasok di tingkat nasional dan/atau supranasional? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna menciptakan peluang pengadaan bagi pemasok di tingkat nasional dan/atau supranasional? 	

A.03

Penelitian dan Pengembangan Kolaboratif



Posisi perusahaan tambang sudah tepat untuk mendukung program penelitian dan pengembangan (Litbang) guna merangsang inovasi dan diversifikasi sosio-ekonomi di negara-negara produsen. Perusahaan tambang sendiri, secara kolektif sebagai sebuah industri, atau dalam kemitraan dengan perusahaan lain dapat mendukung Litbang yang bertujuan meningkatkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan atau sosio-ekonomi.

Perusahaan tambang bisa berkontribusi pada upaya-upaya Litbang negara produsen dengan berbagai cara, termasuk melalui penyediaan dukungan keuangan bagi lembaga penelitian, kemitraan dengan lembaga pemerintah, perguruan tinggi, atau LSM, pendanaan beasiswa penelitian akademis, atau pemberian akses ke data atau peralatan bagi para peneliti. Namun semua dukungan bagi pembangunan kapasitas Litbang hendaknya diberikan melalui kerja sama yang erat dengan institusi yang terkait dan pihak-pihak berwenang pemerintah. Dengan menempuh pendekatan kolaboratif dalam menilai kebutuhan dan mengembangkan kapasitas, perusahaan tambang bisa melakukan investasi secara strategis dan menghindari upaya yang mahal serta makan waktu yang tidak menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan atau negara produsen.

Perusahaan tambang memiliki banyak hal yang bisa diberikan ke, sekaligus memetik manfaat dari, jenis upaya-upaya pembangunan kapasitas ini, di luar upaya Litbang yang dilakukan sendiri oleh perusahaan sebagai bagian rutin dari operasi mereka (misalnya, teknik penambangan atau penelitian terkait kajian dampak lingkungan). Dukungan bagi Litbang negara produsen dapat menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi publik tentang beraneka ragam permasalahan terkait tambang yang relevan bagi negara yang bersangkutan.

Misalnya, penelitian bisa diarahkan untuk mengurangi pemanfaatan energi dan air atau jejak lingkungan dari operasi tambang, atau mengkaji strategi untuk mempersiapkan diri dan beradaptasi dengan perubahan iklim. Upaya-upaya lain mungkin meliputi Litbang terkait dengan permasalahan kesehatan dan keselamatan kerja, kajian sosio-ekonomi untuk memfasilitasi peluang industri hilir seperti pengolahan bijih mineral, atau kerja sama dengan badan pemerintah dan lembaga akademik terkait manajemen arus masuk pendatang.

Namun Litbang yang didukung oleh perusahaan tambang jangan hanya terpaku pada permasalahan terkait pertambangan. Perusahaan tambang dapat menumbuhkan prakarsa yang menjawab kebutuhan masyarakat yang terdampak tambang, misalnya dengan mendukung Litbang di sektor seperti budi daya pertanian, teknologi pengolahan air atau energi terbarukan untuk meningkatkan ketahanan pangan, air, dan energi. Selain menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi, investasi semacam itu dapat membantu menyumbang sumber pengetahuan dan inovasi bersama serta menjawab tantangan sosio-ekonomi, termasuk di bidang kemiskinan dan kesehatan, atau permasalahan lingkungan seperti erosi tanah dan pencemaran air.

Nilai penting dari kontribusi pada pembangunan sosio-ekonomi di negara-negara produsen sebenarnya sangat dipahami betul oleh perusahaan tambang. Melalui kontribusi ke Litbang sosio-ekonomi, perusahaan tambang dapat membantu mengembangkan teknologi dan praktik yang sesuai dengan kebutuhan dan realitas negara produsen, yang juga berpeluang diterapkan di tempat lain. Selain itu, pengembangan kemampuan Litbang dan kapasitas ekonomi di sebuah negara atau wilayah membuatnya semakin menarik bagi investasi, dan dapat menciptakan lingkungan operasional yang lebih stabil. ■

A.03.1

Tindakan

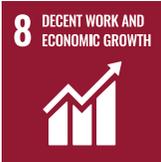
Perusahaan menerapkan sistem untuk bekerja sama dengan institusi negara produsen di bidang Penelitian & Pengembangan yang bertujuan mengatasi masalah-masalah sosio-ekonomi dan lingkungan terkait pertambangan yang menjadi prioritas.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk bekerja sama dengan institusi negara produsen untuk:

- a. Mengidentifikasi prioritas Litbang untuk mengatasi dampak sosio-ekonomi dan lingkungan dari pertambangan di dalam negara-negara produsen?
- b. Mengembangkan program Litbang untuk menyusun prioritas tersebut?
- c. Melacak implementasi program Litbang ini?

• *Prinsip 9 UNGC*

A.04 Meningkatkan Basis Keterampilan Nasional



Pembangunan pertambangan menciptakan potensi keuntungan ekonomi dan sosial melalui penciptaan peluang pengadaan dan lapangan kerja (Lihat A.02 dan D.04). Cara sebuah perusahaan tambang merespons kebutuhan kecakapan jangka pendek dan jangka panjang sebuah proyek dapat memberikan dampak yang besar terhadap basis keterampilan dan lapangan kerja di negara-negara produsen, melalui penciptaan potensi pengganda antargenerasi. Ketika sebuah perusahaan sangat mengandalkan tenaga kerja, keahlian, dan barang impor, tidak terjadi alih kecakapan ke penduduk setempat, baik kecakapan di bidang tambang maupun kecakapan lainnya. Selain itu, hanya ada sedikit peluang untuk meningkatkan basis keterampilan nasional atau pembangunan perekonomian yang berkelanjutan.

Sebagian besar perusahaan tambang menanamkan sumber dayanya untuk program pelatihan pekerja untuk memastikan kelancaran organisasi dan operasi mereka secara efisien. Beberapa perusahaan tambang juga menyediakan program magang dan pembinaan untuk mendorong alih kemampuan, dan menyediakan program “peningkatan kecakapan” dan kepemimpinan untuk memberi peluang bagi pekerja mereka untuk mengembangkan karier. Fokus pengembangan kecakapan pertambangan di tingkat lokal atau nasional membantu perusahaan memenuhi ekspektasi atau target lapangan kerja lokal di negara produsen dan mengurangi biaya yang berkaitan dengan transfer tenaga kerja ekspatriat. Upaya mendidik dan melatih pekerja juga menghasilkan produktivitas pekerja yang lebih besar dan mengurangi potensi munculnya konflik masyarakat jika perusahaan tambang terlalu bergantung pada tenaga kerja asing, terutama untuk pekerjaan dengan gaji lebih tinggi.

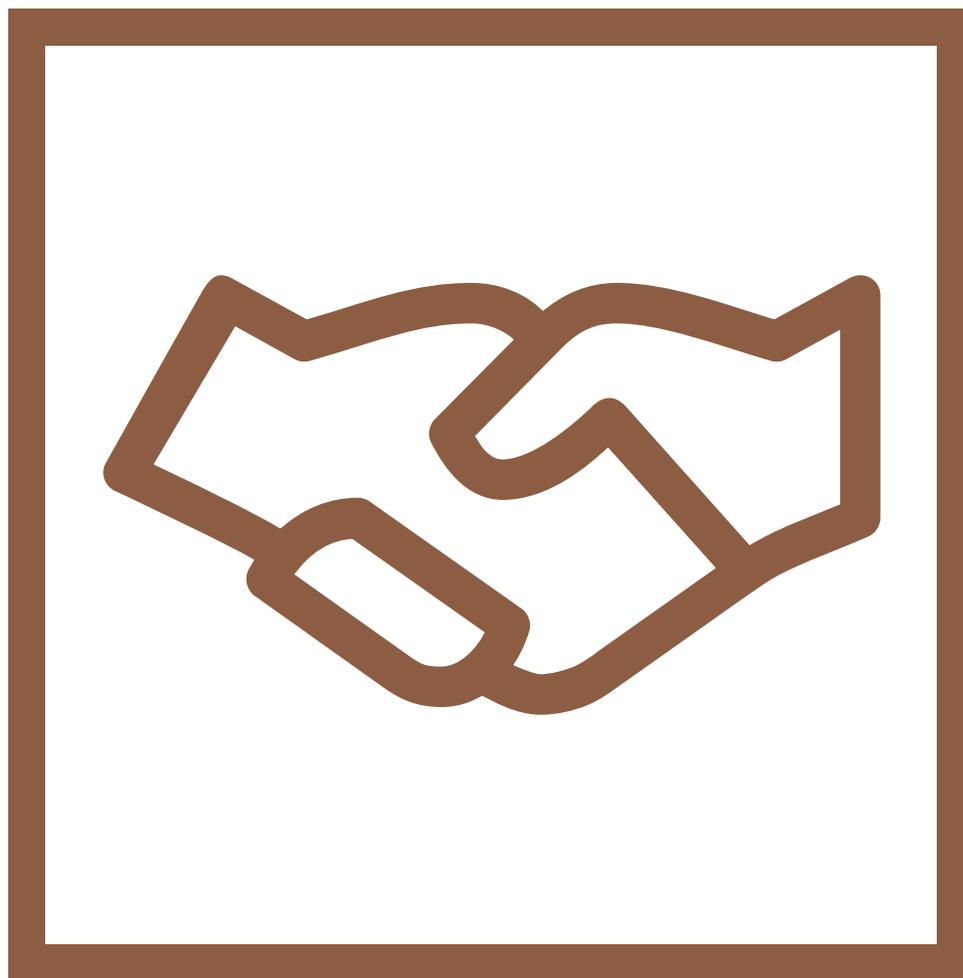
Selain itu, peningkatan pengembangan keterampilan di luar tenaga kerja perusahaan bisa menjadi kontributor penting bagi pembangunan lokal dan mendorong jalur keterampilan yang

beragam dalam jangka panjang. Tindakan semacam itu dapat melibatkan, misalnya, kerja sama dengan pemerintah nasional dan lokal untuk memperkuat pendidikan STEM di tingkat sekolah dan kampus, dan menyediakan beasiswa, magang, pelatihan kerja, pelatihan lulusan, dll. Penguatan kecakapan teknis/kejuruan terkait tambang yang dapat dengan mudah dialihkan ke luar tenaga kerja perusahaan (termasuk dengan, misalnya, mendukung program pelatihan bagi juru las, sopir, ahli mesin, dll.) juga dapat memberikan keuntungan jangka panjang.

Pemerintah dan perusahaan juga semakin gencar mencari cara agar industri pertambangan dapat memperluas upaya-upayanya dengan jalan mengembangkan kecakapan yang dapat diterapkan di sektor perekonomian yang lain. Misalnya, perusahaan tambang dapat mendorong pengembangan bisnis lokal dan nasional yang menjangkau jauh di luar lokasi tambang dengan membina atau melatih para pemasok dan kontraktor pertambangan (Lihat A.02 dan B.08), atau mendukung perusahaan yang tidak berkaitan dengan pertambangan, misalnya, melalui akses kepada pembiayaan dengan suku bunga terjangkau. Perusahaan tambang juga dapat membantu mempertajam tingkat kepakaran di berbagai bidang seperti kontrol proses, konstruksi dan penanganan bahan, yang dapat digunakan di berbagai macam sektor ekonomi di luar pertambangan; dan mendorong pengembangan kecakapan yang dapat dengan mudah dialihkan seperti komunikasi atau kompetensi terkait manajemen dan supervisi.

Penyediaan pelatihan kecakapan dan dukungan di berbagai bidang, meliputi tetapi tidak terbatas pada bidang-bidang terkait pertambangan, membantu perusahaan membangun sekumpulan besar karyawan yang berkemampuan dan yang bisa dimanfaatkan, seraya membantu mengintegrasikan diri mereka sendiri secara positif di tingkat nasional dan regional. ■

<p>A.04.1 Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mendukung pendidikan STEM dan pengembangan kecakapan teknis/kejuruan di kalangan masyarakat yang lebih luas di negara-negara produsen melalui kemitraan dengan institusi dalam negeri.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk menjamin agar operasinya:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mendukung pendidikan STEM di kalangan masyarakat yang lebih luas lewat kerja sama dengan institusi dalam negeri? Mendukung pengembangan kecakapan teknis/kejuruan di kalangan masyarakat yang lebih luas melalui kerja sama dengan institusi dalam-negeri? Memperlihatkan kesesuaian upaya-upaya pengembangan kecakapan mereka dengan agenda pengembangan kecakapan nasional? 	
<p>A.04.2 Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mendukung pengembangan kecakapan teknis dan manajerial tenaga kerja lokalnya di negara-negara produsen.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk menjamin agar operasinya mendukung pengembangan kecakapan teknis tenaga kerja lokalnya di negara-negara produsen? Menerapkan sistem untuk menjamin agar operasinya mendukung pengembangan kecakapan manajerial tenaga kerja lokalnya di negara-negara produsen? Secara sistematis melacak implementasi program pengembangan kecakapan mereka? 	<p>• <i>Pengungkapan GRI 404-2; 404-3</i></p>



B Pelaksanaan Bisnis



Perusahaan tambang, seperti bisnis global lainnya, bertanggung jawab kepada para pemilik dan pemegang saham mereka, baik dari perorangan, korporasi, pemerintah, maupun pembayar pajak. Perusahaan tambang juga semakin dituntut pertanggungjawabannya oleh para pemangku kepentingan dan pasar global, yang mengharapkan agar perusahaan menerapkan praktik berbisnis yang etis dan sistem tata kelola serta transparansi operasional perusahaan yang matang. Untuk menjawab tuntutan ini, beberapa perusahaan tambang telah berkomitmen untuk mengelola aspek ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola (EESG) operasinya secara lebih bertanggung jawab.

Sebagaimana upaya-upaya pembangunan ekonomi perusahaan tambang bisa berkontribusi pada tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) PBB (Lihat Bagian A), pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab oleh

perusahaan tambang juga dapat membantu negara produsen memperoleh kemajuan dalam upaya mencapai tujuan tersebut. Misalnya, transparansi praktik bisnis pertambangan, terutama di negara-negara dengan tata kelola yang lemah atau rentan korupsi, tidak hanya membantu menyoroti praktik bisnis perusahaan yang baik, tetapi juga dapat berkontribusi pada akuntabilitas negara produsen yang lebih besar (SDG 16) dan potensi yang lebih besar dalam pemanfaatan kekayaan mineral untuk menurunkan angka kemiskinan (SDG 1) dan membawa manfaat bagi penduduk secara keseluruhan.

Pelaksanaan bisnis dengan menjunjung tinggi integritas juga mendorong perusahaan untuk menghargai hak asasi manusia, pekerja, dan lingkungan; melindungi diri dari korupsi; dan menciptakan nilai bagi negara produsen dan masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan. Semua elemen tersebut merupakan konsep penting dalam SDG. ■

B.01 Etika Bisnis, Antisuap, dan Antikorupsi



Etika bisnis merupakan penerapan nilai-nilai etis ke dalam pelaksanaan kiprah perusahaan atau individu di dalam perusahaan tersebut. Daftar nilai etis yang diadopsi oleh sebuah perusahaan memang mengikuti kebijaksanaannya, tetapi sering meliputi nilai-nilai seperti: integritas, keadilan, kejujuran, dapat dipercaya, kebebasan, penghormatan, dan keterbukaan. Nilai-nilai tersebut lantas dapat diterapkan dalam permasalahan ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola (EESG) yang relevan seperti konflik kepentingan; hadiah dan jamuan; donasi dan lobi politik; suap dan korupsi; privasi data; penggunaan media sosial; keragaman; hak asasi manusia; dan perlakuan atau interaksi dengan pekerja, masyarakat, dan lingkungan.

Perilaku etis berpeluang besar terwujud jika nilai-nilai ditanamkan ke dalam budaya perusahaan, di seluruh departemen dan operasinya; perilaku yang diharapkan dikomunikasikan secara jelas ke semua karyawan (melalui program penyuluhan/sosialisasi dan peningkatan kesadaran), mitra bisnis dan pemangku kepentingan yang relevan; ada sanksi atas pelanggaran perilaku tidak etis, tetapi juga insentif untuk mewujudkan perilaku etis yang tinggi; dan ada mekanisme pemantauan untuk memahami tingkat kepatuhan perusahaan pada nilai-nilai yang dipedomannya. Yang juga penting adalah pelaporan ke karyawan dan pemangku kepentingan, yang mendorong pembelajaran dan akuntabilitas di semua tingkat di perusahaan, dan memberikan sarana untuk menunjukkan bahwa komitmen yang diambil di tingkat korporasi benar-benar dijalankan di tingkat operasional pertambangan.

Perusahaan yang berkomitmen pada perilaku etis juga akan menerapkan mekanisme yang efektif yang memudahkan individu di dalam dan di luar perusahaan untuk mengadukan keprihatinan terhadap perilaku yang tidak etis atau melanggar

hukum, termasuk hotline pelaporan pelanggaran atau prosedur serupa yang memudahkan pelaporan secara anonim dan rahasia tanpa takut diancam balik atau dibalas. Dalam situasi tertentu, demi membangun kepercayaan terhadap mekanisme tersebut, pihak ketiga independen mungkin diperlukan untuk mengelola mekanisme dan melaporkan balik hasilnya ke perusahaan. Penciptaan budaya saling percaya dan keterbukaan juga berarti memastikan pekerja (karyawan dan pekerja kontrak) dan pemasok memiliki kepercayaan diri, dan didorong, untuk mengadukan masalah yang menjadi keprihatinan, dan bahwa perlindungan diberikan bagi orang-orang yang menyampaikan keluhan. Langkah ini, pada gilirannya, lebih berpeluang memberikan identifikasi dan pencegahan awal terhadap perilaku yang tidak bisa diterima, sehingga memudahkan perusahaan untuk melindungi reputasinya, mengurangi kerugian keuangan, meningkatkan semangat kerja karyawan dan menurunkan angka keluar-masuk pegawai.

Bagian tidak terpisahkan dari pendekatan perilaku etis perusahaan adalah sistem yang kuat untuk mencegah bentuk suap dan korupsi baik langsung maupun tidak langsung. Pada 2003, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi. Dalam dokumen konvensi tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menyatakan bahwa, "Korupsi sangat menyakiti negara miskin dengan mengalihkan dana yang diperuntukkan bagi pembangunan, sehingga melemahkan kemampuan suatu Pemerintah untuk memberikan layanan dasar, memperbesar ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta memutus bantuan dan investasi asing. Korupsi adalah unsur penting penyebab melemahnya kinerja ekonomi sekaligus hambatan besar bagi pengentasan kemiskinan dan pembangunan."

Sektor pertambangan dikelompokkan sebagai salah satu sektor paling rawan korupsi. Perusahaan tambang harus memperoleh bermacam-macam lisensi dan persetujuan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan sumber daya mineral. Beberapa pejabat pemerintah atau tokoh lain dengan pengaruh politik yang cukup untuk memblokir atau menunda proyek pertambangan bisa saja mencoba meminta suap dengan imbalan berupa kemudahan atas proses-proses tersebut. Praktik ini sangat marak ketika operasi pertambangan berada di negara-negara yang memiliki lingkungan peraturan dan supremasi hukum yang lemah.

Namun permasalahannya tidak bisa semata-mata dialamatkan kepada para pejabat pemerintah dan pejabat perantara lain yang tidak etis. Beberapa perusahaan tambang mengaku bersedia memberikan uang tunai atau memberikan hadiah tidak etis untuk membantu kelancaran bisnis mereka selama masa-masa sulit secara keuangan. Selain itu, perusahaan mungkin secara tidak langsung dan dalam beberapa kasus tidak sadar ikut andil dalam suap atau korupsi melalui hubungan mereka dengan agen,

konsultan, atau mitra usaha patungan mereka.

Suap dan korupsi dapat dicegah atau dikurangi secara signifikan melalui implementasi program uji tuntas dan kepatuhan antikorupsi yang kuat dan transparan beserta langkah-langkah lain semisal transparansi seputar kontrak, pajak, dan pembayaran yang dilakukan ke negara-negara produsen (Lihat B.03, B.04, dan B.06). Uji tuntas antikorupsi membantu perusahaan memberantas korupsi di dalam bisnis mereka sendiri dan mengurangi potensi dikait-kaitkan dengan korupsi lewat tindakan pihak ketiga, seperti agen, konsultan, atau pemasok. Uji tuntas tersebut kini menjadi ekspektasi di banyak negara, dan perusahaan juga secara sukarela mengambil langkah-langkah untuk mengimplementasikan program antikorupsi untuk meminimalkan risiko mereka.

Masyarakat rendah korupsi akan menciptakan lingkungan investasi yang lebih mudah diprediksi dan stabil bagi banyak perusahaan, dan membantu negara-negara produsen untuk memaksimalkan keuntungan secara nyata dari pengembangan sumber daya alamnya. ■

<p>B.01.1</p> <p>Komitmen</p>	<p>Perusahaan berkomitmen untuk mencegah segala bentuk suap dan korupsi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk mencegah segala bentuk suap dan korupsi baik langsung maupun tidak langsung? Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini? Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini? 	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip UNGC 10 • GRI 205 • SASB NR0302-21
<p>B.01.2</p> <p>Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya terkait antisuap dan antikorupsi.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang pencegahan suap dan korupsi, termasuk jumlah dan sifat/bentuk insiden dan tindakan yang diambil sebagai responsnya? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mencegah semua bentuk suap dan korupsi baik langsung maupun tidak langsung? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mencegah segala bentuk suap dan korupsi baik langsung maupun tidak langsung? 	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip UNGC 10 • GRI 205
<p>B.01.3</p> <p>Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk menyempurnakan efektivitas mekanisme pelaporan pelanggarannya untuk melaporkan keprihatinan terhadap perilaku yang tidak etis.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kelancaran fungsi dan aplikasi mekanisme pelaporan pelanggarannya, termasuk jumlah dan sifat/bentuk insiden dan tindakan yang diambil sebagai responsnya? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas mekanisme pelaporan pelanggarannya? 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan GRI 102-17

B.02 Pertanggungjawaban dan Keragaman Direksi dan Manajemen Senior



Kelangsungan perusahaan adalah konsep yang sudah diterima oleh perusahaan di seluruh dunia. Konsep ini semakin dipandang penting bagi kesuksesan perusahaan jangka panjang. Konsep ini mencakup bahwa perusahaan menghargai tanggung jawab fundamental di bidang seperti hak asasi manusia, tenaga kerja, lingkungan, dan antikorupsi, dan mengambil tindakan untuk mendukung dan menciptakan nilai bagi masyarakat di sekelilingnya.

Perusahaan semakin gencar mengembangkan kebijakan yang memperlihatkan komitmen pada perilaku yang bertanggung jawab atas permasalahan ekonomi, lingkungan, sosial (termasuk hak asasi manusia), dan tata kelola (EESG). Namun kebijakan tidak selalu mengejawantah menjadi perubahan positif jangka panjang di negara-negara produsen atau pergeseran berkelanjutan pada budaya dan nilai-nilai perusahaan menuju perilaku yang lebih bertanggung jawab. Keberhasilan implementasi kebijakan biasanya membutuhkan komitmen, kepemimpinan, dan akuntabilitas dari jajaran direksi perusahaan dan manajer senior (di tingkat perusahaan dan lokasi tambang), serta pegawai yang penuh dedikasi di tingkat operasional untuk memastikan penerapan keputusan strategis di seluruh operasi perusahaan.

Pencapaian tujuan perusahaan untuk melindungi nilai-nilai lingkungan, hak asasi manusia, kesehatan dan kesejahteraan

sosio-ekonomi masyarakat dapat diwujudkan dengan lebih baik ketika menerapkan mekanisme akuntabilitas internal dan insentif untuk kinerja, yang dapat diterapkan pada pengambil kebijakan di tingkat perusahaan dan pada para manajer serta pekerja di tingkat lokasi tambang. Tindakan semacam itu dapat membantu meningkatkan kinerja dan sikap di tingkat operasional terhadap relevansi komitmen EESG, serta membantu menanamkannya ke dalam budaya dan nilai-nilai perusahaan.

Komposisi direksi perusahaan dan manajemen senior juga dapat memengaruhi keberhasilan implementasi tujuan EESG. Anggota direksi dan manajer dengan gender, etnis, dan usia yang berbeda, serta beraneka ragam latar belakang dan kualifikasi, termasuk permasalahan ekonomi, lingkungan, dan sosial, dapat berkontribusi pada spektrum pengetahuan yang luas tentang kemungkinan pola pengaruh faktor eksternal terhadap perusahaan.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa keragaman gender di jajaran direksi dan jabatan manajemen senior dapat menghasilkan kinerja keuangan yang secara keseluruhan lebih baik, tata kelola perusahaan yang bagus, kepatuhan pada standar EESG global yang lebih besar, kinerja yang lebih baik dalam hal keberlanjutan, inovasi yang lebih besar, manajemen risiko yang lebih baik, dan reputasi perusahaan yang lebih bagus. ■

<p>B.02.1</p> <p>Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk meminta pertanggungjawaban direksi dan manajer senior secara perseorangan atas pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab terkait masalah-masalah ESG.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing anggota dewan direksi dan manajer senior atas pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab terkait permasalahan ESG? Berlakunya persyaratan kompetensi bagi masing-masing anggota manajemen senior utama dan jabatan direksi yang bertanggung jawab atas permasalahan ESG? Pertanggungjawaban masing-masing anggota direksi dan manajer senior atas kelancaran hal-hal tersebut di atas melalui langkah-langkah yang terdokumentasi? 	<ul style="list-style-type: none"> • UNGP (RF) A.2.1; A.2.2 • Pengungkapan GRI 102-20 • IFC PS1.17
<p>B.02.2</p> <p>Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan keberimbangan gendernya di tingkat direksi dan manajemen senior.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan lintas kurun waktu yang berurutan, tentang persentase perempuan di tingkat direksi dan manajemen senior? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas intervensinya (program, prakarsa, dll.) untuk meningkatkan keberimbangan gender di tingkat manajemen senior? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan keberimbangan gender di tingkat manajemen senior? 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengungkapan GRI 405-1

B.03 Pengungkapan Kontrak



Negara-negara produsen menerbitkan lisensi dan mengadakan perjanjian dengan perusahaan untuk melakukan eksplorasi atau eksploitasi sumber daya mineral (misalnya, melalui lelang, sewa, surat izin, perjanjian konsesi, perjanjian eksplorasi dan eksploitasi, perjanjian pengembangan). Pemerintah juga menandatangani kontrak atau merundingkan perjanjian dengan perusahaan untuk menyusun beragam syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan pengembangan mineral, seperti keuntungan keuangan yang akan diterima oleh negara dari pajak, bagi hasil, bagi keuntungan, dan royalti; ketentuan yang berkaitan dengan infrastruktur penting atau investasi lain; dan syarat yang dapat menimbulkan implikasi bagi warga masyarakat, seperti langkah-langkah perlindungan lingkungan atau hak terkait pemanfaatan lahan atau masyarakat lokal yang terpaksa pindah.

Pemerintah memikul tanggung jawab untuk mengelola sumber daya alam negaranya dengan cara-cara yang sesuai dengan kepentingan pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat. Sayangnya, korupsi, kurangnya informasi, atau tantangan kapasitas kelembagaan telah menghambat beberapa negara sehingga tidak dapat merundingkan kesepakatan terbaik bagi warganya – sering berakibat pada hilangnya potensi pendapatan senilai jutaan atau miliaran dolar.

Kontrak yang mengatur pertambangan atau proyek ekstraktif yang lain bisa jadi merupakan peraturan paling signifikan yang mengatur keuntungan yang diterima oleh negara-negara produsen dan masyarakat terdampak, tetapi sayangnya, dokumen kepentingan publik ini sering disembunyikan dari pengetahuan publik. Menurut sebuah laporan pada 2015 oleh Extractive Industries Transparency Initiative (Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif), meskipun beberapa negara memublikasikan kontrak, transparansi bukan sesuatu yang bersifat universal. Dalam beberapa kasus, ada larangan hukum atau kontraktual terkait pengungkapan (membuka isi kontrak), dan dalam kasus lain, meskipun undang-undang

mendukung dilakukannya pengungkapan, hanya sebagian saja atau bahkan tidak terjadi pengungkapan/keterbukaan.

Akan tetapi semakin disadari bahwa pengungkapan/keterbukaan kontrak diperlukan untuk mendorong manajemen yang bertanggung jawab dan tata kelola sumber daya alam yang baik, serta memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dengan memastikan iklim persaingan usaha yang sehat bagi perusahaan. Dengan secara sistematis menjadikan kontrak tersedia secara publik, para pejabat pemerintah memiliki lebih banyak perangkat dan insentif yang lebih besar untuk merundingkan kontrak yang menjamin diterimanya jatah keuntungan yang adil oleh negara mereka dari pengembangan mineral. Transparansi kontrak memungkinkan masyarakat sipil untuk memainkan peran yang lebih besar dalam perdebatan seputar cara negara berkembang mengelola sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan juga dapat membantu perusahaan serta pemerintah untuk memperlihatkan kepada rakyatnya nilai proyek pertambangan dan ekspektasi penghasilan realistis dari suatu kurun waktu. Selain mengungkapkan kontrak, pengungkapan dokumen terkait (termasuk, misalnya, catatan alokasi dan proses pemberian izin serta informasi tentang syarat kontrak berikut implementasinya) dapat mendorong akuntabilitas dan transparansi yang lebih kuat.

Semakin banyak perusahaan dan asosiasi tambang yang mendukung praktik publikasi kontrak, dengan menyatakan bahwa publikasi tersebut menjamin iklim persaingan usaha yang sehat bagi perusahaan dan membantu meningkatkan kualitas hubungan mereka dengan masyarakat secara umum dan memenuhi ekspektasi warga secara lebih efektif. Beberapa perusahaan juga mengambil peran kepemimpinan dalam memajukan transparansi dengan mengungkapkan kontrak di negara-negara yang tidak mewajibkannya, sedangkan perusahaan yang lain secara proaktif mencantumkan klausul perkecualian dalam kontrak dengan pemerintah yang memungkinkan pengungkapan publik. ■

<p>B.03.1</p> <p>Tindakan</p>	<p>Perusahaan secara publik mengungkapkan seluruh dokumen hukum yang memberinya hak untuk melakukan ekstraksi sumber daya mineral di lokasi tambang.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Secara publik mengungkapkan semua dokumen hukumnya (misalnya, kontrak, surat izin, lisensi, sewa, konvensi, perjanjian) yang memberinya hak untuk melakukan ekstraksi sumber daya mineral di lokasi tambang? Membuat dokumen tersebut tersedia bebas di situs web perusahaan? Secara publik mengungkapkan semua dokumen ini sebagai dokumen dengan teks lengkap tanpa redaksi ulang atau pengurangan? 	<p>• EITI 2.2; 2.3; 2.4</p>
---	--	-----------------------------

B.04 Transparansi Pajak



Pajak terkait pertambangan merupakan sumber pendapatan yang besar sangat penting bagi negara-negara kaya mineral. Pendapatan dari pajak memungkinkan negara melakukan belanja untuk layanan publik dan infrastruktur vital. Dalam hal negara-negara berkembang, basis pajak yang kuat dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan asing sehingga memungkinkan negara lebih mandiri dalam mengatur pembangunannya sendiri. Jika dikelola secara cermat, pajak yang diterima sepanjang siklus operasional pertambangan dapat membiayai prakarsa pembangunan ekonomi dan sosial yang akan terus memberikan manfaat jangka panjang setelah operasi tambang berhenti.

Banyak dijumpai bukti bahwa kebanyakan negara produsen tidak berhasil memungut persentase pajak yang besar dari industri ekstraktif, terutama dari perusahaan dengan operasi di banyak negara. Perusahaan mampu menghindari pembayaran pajak melalui taktik yang patut dipertanyakan tetapi sah secara hukum, seperti manipulasi harga transfer (dengan mengalihkan laba ke anak perusahaan di yurisdiksi rendah-pajak atau rahasia), pengecohan harga perdagangan (dengan menyatakan nilai produk yang diekspor di bawah harga yang sesungguhnya), atau melalui penggunaan struktur kepemilikan yang kompleks. Penggelapan pajak juga dapat terjadi melalui aktivitas ilegal, seperti penyelundupan.

Negara-negara berkembang juga bisa kecolongan pendapatan pajak dengan memberikan insentif seperti pembebasan PPh Badan dalam waktu tertentu (tax holiday) atau pengurangan tarif pajak. Sering terjadi, insentif pajak di negara-negara produsen tidak

disusun berdasarkan analisis biaya-manfaat yang tepat, tetapi justru didorong oleh tekanan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik dibandingkan dengan negara tetangga. Selain itu, mengingat ciri operasi tambang yang memiliki lokasi spesifik, ada banyak sekali contoh yang menunjukkan bahwa investasi tetap akan terjadi tanpa insentif pajak. Meskipun tidak melanggar hukum, insentif pajak yang terlalu murah hati atau diberikan dengan maksud yang tidak baik bisa dipandang dengan kecurigaan, menciptakan masalah legitimasi bagi pemerintah dan perusahaan, dan tidak ada kontribusinya bagi peningkatan iklim investasi di sebuah negara.

Banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan untuk membangun kebijakan, struktur, dan kapasitas pemberlakuan pajak dengan cara yang menarik investasi dan memberikan keuntungan ekonomi bagi negara. Tidak ada definisi tunggal transparansi pajak, tetapi biasanya meliputi pengungkapan informasi tentang besaran keuntungan yang diraup oleh sebuah perusahaan di setiap negara tempatnya beroperasi dan besaran pajak yang dibayar di setiap negara (Lihat B.06), dan pelaporan tentang strategi pajak, seperti pendekatan perpajakan, detail tentang manajemen risiko pajak dan perencanaan pajak, dan informasi tentang suaka pajak.

Perusahaan global semakin menyadari bahwa komitmen kebijakan terkait pajak dan pengungkapan strategi dan praktik pajak secara proaktif di tingkat negara sangatlah penting dalam membangun dan memelihara hubungan serta kredibilitas dengan para investor dan negara-negara produsen, berikut peningkatan iklim investasi yang stabil di negara-negara tempat mereka beroperasi. ■

B.04.1**Perusahaan mempraktikkan transparansi pajak di semua yurisdiksi pajaknya.**

• GRI 201

Tindakan

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri secara publik:

- a. Mengungkapkan struktur perusahaan yang mencantumkan semua yurisdiksi pajak yang menjadi wilayah pendaftaran bagi badan hukum perusahaan dan nama (misalnya, nama anak perusahaan atau cabang perusahaan) yang digunakan di tempat tersebut?
- b. Laporan tentang pendekatannya terhadap transparansi pajak, termasuk strategi yang berkaitan dengan eksistensinya di yurisdiksi rendah-pajak?
- c. Mengungkapkan semua insentif pajak dan pengurangan pajak yang diterima di tingkat lokal dan nasional di semua yurisdiksi pajak tempatnya mendaftarkan badan hukum perusahaan?

B.05 Kepemilikan Manfaat yang Sebenarnya



Identitas orang-orang yang sesungguhnya memiliki, mengontrol, dan memetik keuntungan dari aktivitas perusahaan tambang - para pemilik manfaat yang sebenarnya - tidak selalu diungkapkan. Dalam beberapa kasus, mereka tersembunyi di balik rantai perusahaan atau entitas swasta di berbagai negara.



Ketika kepemilikan sebuah perusahaan tidak jelas, muncullah lahan subur bagi korupsi, penggelapan pajak, pencucian uang, dan jenis-jenis lain malapraktik keuangan, yang lantas dapat menimbulkan dampak ekonomi, lingkungan, atau sosial yang negatif. Misalnya, seseorang dengan saham kepemilikan di sebuah perusahaan bisa jadi memegang posisi untuk memengaruhi pemberian kontrak pemerintah, lisensi pertambangan, atau surat izin ke perusahaan yang tidak memenuhi syarat, atau menyetujui syarat dan ketentuan yang terlalu longgar. Identitas para pemilik manfaat yang sebenarnya itu penting diketahui demi menangkal korupsi dan menjamin agar perusahaan yang sudah mendapatkan lisensi memiliki niat dan kepakaran keuangan dan teknis yang diperlukan untuk mengembangkan, beroperasi, dan menutup proyek pertambangan secara bertanggung jawab.

Pemerintah, lembaga keuangan, prakarsa sukarela, dan bahkan para eksekutif perusahaan tambang semakin mendukung dan bergerak ke arah transparansi yang lebih baik dalam

hal kepemilikan manfaat perusahaan yang sebenarnya. Misalnya, EITI (Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif) telah menerapkan persyaratan bahwa pada 2020 “semua negara yang melaksanakan EITI harus memastikan semua perusahaan minyak, gas, dan pertambangan yang mengajukan penawaran, beroperasi, atau berinvestasi dalam proyek-proyek ekstraktif di negara mereka mengungkapkan para pemilik yang sebenarnya,” dan membeberkan tingkat kepemilikan serta detail tentang pola kepemilikan atau pengendaliannya (misalnya, melalui persentase kepemilikan saham di perusahaan, atau kontrol melalui kesepakatan kontrak atau surat kuasa).

Pengungkapan kepemilikan manfaat yang sebenarnya secara proaktif dengan cepat menjadi praktik standar di dalam industri ekstraktif. Pengungkapan tersebut menunjukkan komitmen pada transparansi dan integritas pemberian lisensi mineral dan proses kontrak. Pengungkapan juga akan membantu membangun rasa percaya yang lebih besar dari pemangku kepentingan pertambangan, membantu menghindari risiko korupsi dan penggelapan pajak, dan memudahkan pemerintah untuk menilai kredibilitas proposal pertambangan dengan lebih baik sehingga meningkatkan iklim investasi bagi sektor pertambangan secara global. ■

B.05.1**Perusahaan mengungkapkan para pemilik manfaat yang sebenarnya.**

- EITI 2.5
- Pengungkapan GRI 102-7

Tindakan

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri secara publik:

- Mengungkapkan nama-nama pemilik manfaat yang sebenarnya (yaitu, tidak hanya pemegang saham langsung), dengan memerinci tingkat kepemilikan ambang batas yang berlaku pada pengungkapan ini?
- Mengungkapkan pola kepemilikan dan pelaksanaan kontrol?
- Mengidentifikasi para penerima manfaat yang merupakan orang-orang dengan ekspos politik dan mengungkapkan pemutakhiran informasi secara rutin?

B.06 Pembayaran ke Negara-Negara Produsen



Pemerintah memberikan hak kepada perusahaan tambang untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral, dan, sebagai imbalannya, perusahaan membayar pajak, royalti, biaya lisensi, bonus, atau memberikan kontribusi lain sebagai kompensasi atas kekayaan mineral yang diekstrak. Pembayaran oleh perusahaan tambang dapat menjadi sumber pendapatan yang besar bagi negara-negara berkembang, dan berpotensi melecut pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial.

Informasi tentang pembayaran ke pemerintah sering tidak tersedia secara publik. Transparansi yang lebih besar dari perusahaan tambang akan membantu pemerintah dan masyarakat mengetahui apakah perusahaan memenuhi kewajiban kontraknya (Lihat B.03), dan memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan kontribusi ekonominya kepada pekerja, masyarakat lokal, dan perekonomian nasional secara umum.

Umum disepakati bahwa transparansi pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan ekstraktif kepada pemerintah dapat meningkatkan tata kelola yang baik dengan meniadakan kondisi-kondisi yang memicu korupsi dan penyalahgunaan pendapatan. Pengelolaan pendapatan mineral yang lebih baik, pada gilirannya, meningkatkan potensi untuk mengurangi angka kemiskinan dan mendorong perekonomian yang berkelanjutan. Pengungkapan pembayaran juga menjadi cara negara untuk mengurangi risiko politik dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih stabil.

Dalam sepuluh tahun terakhir ini, berbagai upaya peningkatan transparansi pembayaran telah mendapatkan perhatian. Secara khusus, EITI (Prakarsa Transparansi Industri Ekstraktif), sebuah standar global yang mendorong manajemen sumber daya minyak,

gas, dan mineral secara terbuka dan bertanggung jawab, dan berbagai regulasi di Uni Eropa dan Kanada, telah menetapkan kewajiban hukum bagi banyak perusahaan tambang untuk melaporkan pembayaran yang dilakukan kepada badan-badan pemerintah subnasional dan nasional, dan untuk mengungkapkan pembayaran tersebut untuk setiap negara tempatnya beroperasi.

Pengungkapan tingkat proyek juga menjadi praktik standar di banyak negara maju, dan ada imbauan untuk melakukan pelaporan serupa yang berbasis proyek di wilayah lain. Masyarakat yang tinggal di dekat area pertambangan merasakan bermacam-macam dampak sosial dan lingkungan, tetapi mereka sering tidak mendapatkan dana yang memadai untuk mengurangi dampak dan mendorong pertumbuhan ekonomi meskipun mereka secara hukum berhak menerima persentase pendapatan yang dihasilkan oleh proyek-proyek pertambangan.

Akses ke data pendapatan baik di tingkat negara maupun tingkat proyek memudahkan pemerintah lokal untuk memantau kepatuhan perusahaan pada kewajiban kontrak, dan memungkinkan masyarakat lokal untuk melacak hak hukum mereka dan meminta pertanggungjawaban pemerintah jika pendapatan tidak dialokasikan sebagaimana mestinya.

Di negara-negara yang belum menerapkan persyaratan di tingkat proyek, perusahaan yang menyatakan kesediaan untuk mengungkapkan pembayaran dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan serta memungkinkan masyarakat di negara-negara produsen untuk menjadi lebih tahu tentang pendapatan yang diterima dari pertambangan dan pola pembelanjaan atas pendapatan tersebut. ■

B.06.1**Tindakan**

Perusahaan secara publik mengungkapkan semua pembayaran yang dilakukannya ke pemerintah subnasional dan nasional, dengan memberikan data terpilah di tingkat proyek.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- a. Secara publik mengungkapkan informasi yang terpilah di tingkat proyek tentang semua pembayaran yang dilakukan ke pemerintah subnasional dan nasional?
- b. Membuat informasi ini tersedia bebas di situs web utama perusahaan?
- c. Memutakhirkan informasi ini setiap tahun?

• EITI 4.1; 4.6; 4.7; 4.8
• Pengungkapan GRI 201-1

B.07

Praktik-Praktik Lobi



Di banyak negara, lobi memainkan peran menonjol dalam pengambilan kebijakan. Para pelobi swasta, kelompok industri, dan organisasi masyarakat sipil menempuh beragam cara untuk memengaruhi politisi dan pembuat keputusan. Namun kegiatan lobi sering tidak diatur dalam regulasi sehingga kepentingan adikuasa berpeluang mengerahkan pengaruh yang tidak semestinya melalui praktik-praktik yang korup atau mencurigakan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas lobi secara umum menimbulkan kecurigaan bahwa perusahaan, baik secara mandiri maupun melalui badan-badan industri, mendukung peraturan yang tidak mendukung kepentingan terbaik masyarakat.

Perusahaan tambang bisa mengambil langkah-langkah proaktif untuk membantu mendorong integritas dan kepercayaan yang lebih besar pada proses pengambilan keputusan publik serta menumbuhkan kepercayaan yang lebih besar dari para pemangku kepentingan. Misalnya, secara sukarela mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan kebijakan dan praktik lobi, serta kontribusi/sumbangan politik mereka. Mereka juga dapat mengungkapkan posisi lobi, yang tidak hanya menunjukkan kesediaan bersikap transparan, tetapi juga membeberkan bidang-bidang kepentingan

bersama dengan pemangku kepentingan, dan memberikan peluang kerja sama untuk mengembangkan kebijakan publik yang dapat melayani masyarakat terdampak, negara-negara produsen, dan juga industri pertambangan.

Meskipun merupakan aktivitas yang sah dan menjadi bagian penting dari proses demokrasi, lobi bukanlah satu-satunya sarana bagi perusahaan tambang untuk memengaruhi kebijakan pertambangan dan reformasi kelembagaan atau ekonomi. Banyak perusahaan tambang terlibat dalam kemitraan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain untuk membantu meningkatkan kapasitas pemerintah di negara produsen untuk mengelola sumber daya mineral dan mengembangkan peluang ekonomi.

Transparansi yang lebih baik dalam lobi dan keterlibatan dalam dialog multipemangku kepentingan untuk meningkatkan transparansi mineral dan tata kelola sumber daya merupakan sarana penting untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan, memberantas suap dan korupsi (Lihat B.01), dan menciptakan iklim investasi yang lebih stabil dan menarik. ■

<p>B.07.1</p> <p>Tindakan</p>	<p>Jika memungkinkan, perusahaan secara publik mengungkapkan praktik-praktik lobi dan posisinya di semua yurisdiksi.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri secara publik:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengungkapkan peran dan tanggung jawab orang-orang yang terlibat dalam aktivitas lobi di semua yurisdiksi? b. Mengungkapkan materi dari aktivitas lobi berikut hasil yang dicari? c. Mengungkapkan nama-nama pejabat publik atau institusi yang terlibat? 	<p>• <i>GRI 415</i></p>
---	---	-------------------------

B.08 Penandatanganan Kontrak dan Pemerolehan Sumber Daya yang Bertanggung Jawab



Muncul ekspektasi global yang makin besar bahwa perusahaan tidak hanya menunjukkan tingginya tanggung jawab mereka dalam hal hak asasi manusia, sosial, dan lingkungan hidup, tetapi juga menuntut hal yang sama dari mitra usaha serta rantai pasok mereka.

Perusahaan tambang sering mengadakan kontrak dengan perusahaan lain yang memberikan layanan spesialis, seperti pengelasan reparasi, kerja mekanik, dan pemeliharaan fasilitas. Jasa keamanan juga sering dialihkan ke pihak luar yang dikontrak (Lihat D.02). Dalam sepuluh tahun terakhir, kekurangan tenaga kerja atau upaya pemangkasan biaya juga telah meningkatkan penggunaan pekerja kontrak untuk operasi pertambangan inti.

Penggunaan tenaga kerja kontrak menimbulkan implikasi bagi perusahaan tambang. Perekrutan pekerja melalui kontraktor bisa memunculkan masalah kesehatan dan keselamatan kerja yang harus dikelola. Selain itu, praktik ketenagakerjaan, sosial, atau lingkungan yang buruk oleh kontraktor memunculkan risiko reputasi dan keuangan bagi perusahaan tambang. Misalnya, ketimpangan upah dan kondisi kerja antara pekerja dengan kontraktor menjadi perhatian akibat ketidaksetaraan inheren, dan juga karena ketimpangan tersebut telah menimbulkan protes keras dan penutupan sementara tambang.

Perusahaan tambang juga menghadapi risiko yang berkaitan dengan praktik pemasoknya, seperti gangguan pasokan dan rusaknya reputasi yang timbul karena kecelakaan, permasalahan ketenagakerjaan, korupsi, hubungan dengan kelompok bersenjata atau aktivitas ilegal, pelanggaran HAM, protes masyarakat, atau upaya hukum yang berkaitan dengan ketidakpatuhan pemasok pada peraturan sosial atau lingkungan.

Perusahaan dapat meminimalkan risiko bagi pekerja, masyarakat, lingkungan, dan reputasinya sendiri dengan menilai risiko sosial, lingkungan, ketenagakerjaan, dan HAM yang berkaitan dengan pemasok dan kontraktor, serta memastikan kontraktor, subkontraktor, dan pemasok berkomitmen dan mengimplementasikan standar sosial, lingkungan, dan etika yang tinggi dalam kegiatan mereka serta di sepanjang rantai pasok mereka sendiri.

Pendekatan ini semakin banyak ditempuh oleh perusahaan tambang terkemuka. Misalnya, banyak sekali perusahaan tambang menerapkan kode perilaku yang berlaku sama bagi karyawan, kontraktor, subkontraktor, dan pemasok, meskipun kode perilaku ini sering tidak mengikat. Akibatnya, kini beberapa perusahaan tambang memasukkan persyaratan sosial dan lingkungan ke dalam kontrak bilateral untuk menciptakan kewajiban yang mengikat secara hukum. Beberapa perusahaan juga melakukan audit untuk menilai kepatuhan dan mengevaluasi seberapa baik kontraktor, subkontraktor, dan pemasok mengelola dampak yang mereka timbulkan dan dampak yang mungkin timbul dalam rantai pasok mereka sendiri.

Selain mencantumkan ekspektasi ke dalam perjanjian, perusahaan tambang menanamkan sumber daya pada pelatihan kontraktor, subkontraktor, dan pemasok untuk membantu mereka memenuhi persyaratan perusahaan. Program ini saling menguntungkan: perusahaan tambang mengurangi risiko ketenagakerjaan dan risiko rantai pasok serta menciptakan hubungan yang lebih stabil dan andal; sementara itu, pemasok, kontraktor, dan subkontraktor dapat mengurangi risiko mereka masing-masing, membangun kapasitas dan berpotensi mendapatkan akses ke keuangan rantai pasok yang lebih kompetitif.

Negara-negara produsen juga meraup keuntungan dari prakarsa di atas. Perusahaan asal negara produsen yang dapat memenuhi standar sosial dan lingkungan yang tinggi akan lebih mampu bersaing dan masuk ke dalam rantai pasok global yang bertanggung jawab. Selain itu, jika kontraktor, subkontraktor, dan pemasok pertambangan dituntut memenuhi standar lingkungan,

sosial, HAM, dan ketenagakerjaan yang tinggi, seperti memastikan tempat kerja yang aman dan memberikan gaji yang layak, maka kehidupan para pekerja dan keluarga mereka akan lebih baik, dan pertambangan akan memberikan keuntungan positif yang lebih besar bagi perekonomian dan masyarakat lokal. ■

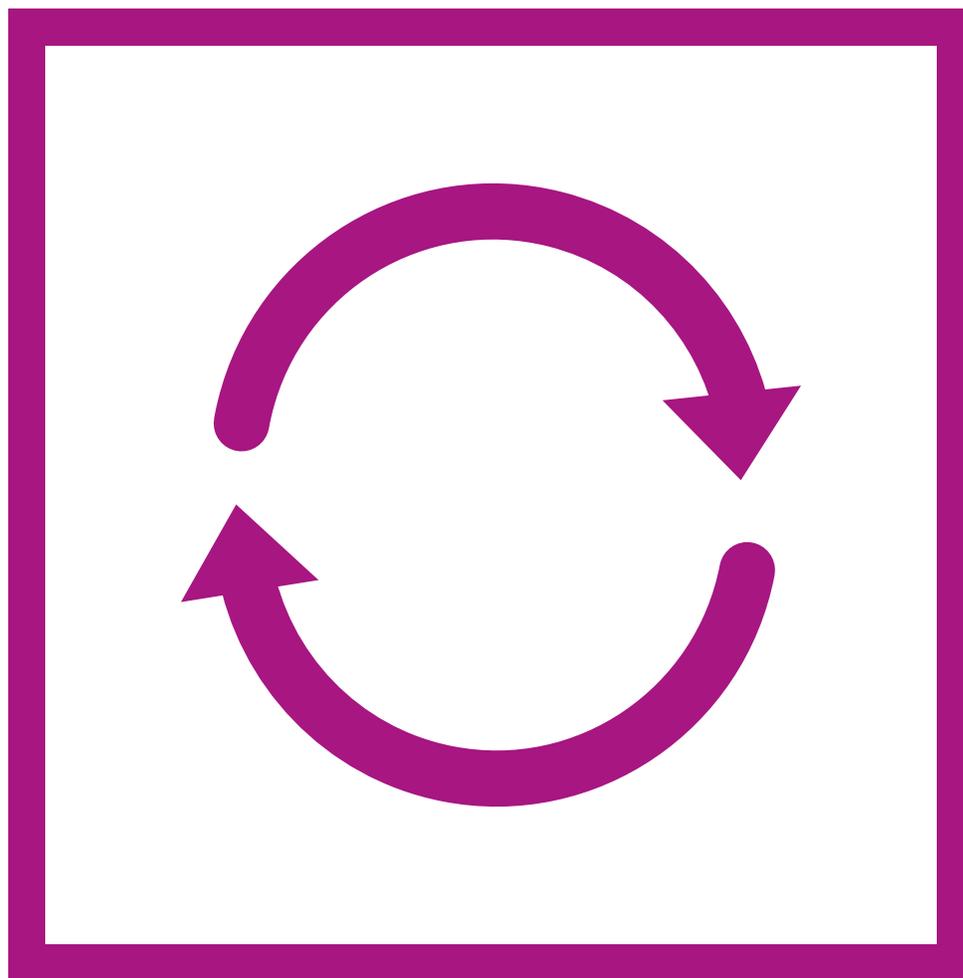
B.08.1**Tindakan**

Perusahaan menerapkan sistem untuk mengidentifikasi dan menilai risiko hak asasi manusia, tenaga kerja, dan lingkungan yang berkaitan dengan pemasok dan kontraktornya.

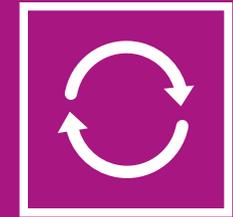
Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan pemasok dan kontraktor seputar:

- a. Masalah hak asasi manusia?
- b. Masalah tenaga kerja?
- c. Masalah lingkungan?

- Prinsip UNGC 2
- VPs B7
- GRI 308; 407; 412; 414



C Manajemen Daur Hidup



Daur hidup pertambangan bisa berpuluh-puluh tahun, dan ada sejumlah tahap daur hidup yang khas dalam pengembangan dan penutupan pertambangan yang bertanggung jawab. Prosesnya dimulai dari eksplorasi mineral. Jika deposit bijih mineral berpotensi layak-tambang berhasil diidentifikasi, perusahaan tambang lantas bisa merancang dan mengkaji kelayakan pengembangan tambang dari sisi teknis dan keuangan. Jika perusahaan memutuskan untuk menjalankan sebuah proyek (Lihat C.02), dan menerima persetujuan, perusahaan tambang pun masuk ke tahap pengembangan atau implementasi, yang mencakup pembangunan dan pengoperasian pertambangan. Terakhir, ketika bijih mineral sudah diekstraksi, pertambangan memasuki tahap penutupan, yang bisa berlangsung bertahun-tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun jika masalah lingkungan jangka panjang tetap belum beres di lokasi tambang.

Uji tuntas sebaiknya dilakukan di sepanjang tahap siklus hidup pertambangan untuk memastikan adanya minimalisasi risiko terhadap perusahaan, masyarakat, dan lingkungan, maksimalisasi peluang bagi ekstraksi yang efisien dan berkelanjutan, dan pemberlakuan pengamanan untuk menjamin kesehatan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan dan setelah penambangan bagi masyarakat

yang terdampak berikut perlindungan terhadap lingkungan. Secara khusus, perusahaan perlu bekerja sama dengan masyarakat dan pekerja untuk terlebih dahulu merencanakan transisi dari tahap konstruksi ke operasi, dan dari tahap operasi ke penutupan, untuk memastikan masyarakat dan pekerja memiliki masa depan sosial dan ekonomi yang layak di sepanjang siklus hidup pertambangan dan ketika pertambangan ditutup (Lihat C.03). Ketika perusahaan tambang memutuskan untuk menanggihkan operasinya selama kurun waktu tertentu atau tidak ditentukan berakhirnya, dan memosisikan aset dalam “pengawasan dan pemeliharaan”, pendekatan yang sama terhadap transisi akan menjamin bahwa pegawai mereka siap dan dibekali dengan berbagai alternatif atau langkah-langkah mitigasi (Lihat E.06)

Dalam beberapa kasus, sebuah perusahaan tambang tidak akan mengawasi proyek pertambangan sepanjang daur hidupnya. Setiap kali terjadi transfer kepemilikan tambang, proses uji tuntas harus dilakukan untuk memastikan pengungkapan dan pemahaman risiko dan kewajiban, dan kondisi keuangan memang aman dan memadai untuk mencegah dan mengelola dampak sosial serta lingkungan (Lihat C.04). ■

C.01 Manajemen Daur Hidup Tambang



Potensi dampak dan peluang ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkaitan dengan pertambangan akan berbeda-beda dari waktu ke waktu. Seperti yang diakui secara luas saat ini, manajemen lingkungan dan sosial yang matang mengharuskan perusahaan mempertimbangkan dan menjawab seluruh spektrum permasalahan di sepanjang tahap dari siklus hidup pertambangan.

Pendekatan siklus hidup terhadap pertambangan mengharuskan penerapan sistem agar dapat mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko, dampak, dan peluang lingkungan dan sosio-ekonomi secara terstruktur dan terus-menerus, dan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Risiko dan tantangan terkait-EESG sering kali menjadi akut menjelang akhir dari siklus hidup pertambangan, ketika muncul berbagai tekanan secara berbarengan (misalnya, kendala keuangan potensial karena nilai produksi menurun, ketegangan dengan para pemangku kepentingan lokal jika ekspektasi pembangunan sosio-ekonomi masih belum terpenuhi, dan semakin rumitnya permasalahan seputar peninggalan). Jika penutupan tambang tidak dikelola dengan baik, dampak buruk dari penutupan itu sendiri terhadap pekerja dan masyarakat bisa jauh lebih parah.

Meskipun penutupan tambang merupakan tahap akhir dari siklus hidup pertambangan, perencanaan penutupan yang efektif harus dimulai sejak awal-awal tahap eksplorasi, karena perubahan kecil pada awal perancangan dan pembangunan tambang bisa menimbulkan implikasi yang sangat besar selama siklus hidup

pertambangan dan pascapenutupan. Sebuah rencana penutupan akan mencakup konsep seperti pemulihan dampak lingkungan secara bersamaan; strategi untuk mempersiapkan pekerja dan masyarakat yang terdampak menghadapi pasang-surut pekerjaan dan pendapatan yang terencana atau tidak terencana, seperti peralihan dari tahap pembangunan ke operasi, atau penutupan tambang sementara; dan berbagai program yang akan mendorong pekerja dan masyarakat untuk bangkit kembali dengan peluang sosial dan ekonomi yang layak pascapenutupan (Lihat juga C.03). Rencana penutupan akan dimutakhirkan secara rutin agar dapat mencerminkan perubahan operasi pertambangan dan kondisi lingkungan dan sosial.

Ketika menempuh pendekatan proaktif dan kolaboratif terhadap perencanaan, penilaian, dan pengelolaan risiko dan peluang di sepanjang tahap dari siklus hidup pertambangan, perusahaan tambang menunjukkan komitmennya pada pertambangan yang bertanggung jawab dan pemberian hasil yang positif kepada pekerja, masyarakat, pemerintah negara-negara produsen, investor, dan para pemangku kepentingan yang lain. Tindakan ini dapat menumbuhkan kepercayaan dan dukungan yang lebih besar dari pemangku kepentingan terhadap proyek, semangat kerja karyawan yang meningkat, kewajiban jangka panjang yang lebih kecil, kelayakan operasi komersial jangka panjang, biaya penutupan tambang yang lebih rendah, dan akses yang lebih besar ke sumber daya keuangan. ■

C.01.1**Komitmen**

Perusahaan berkomitmen untuk menempuh pendekatan daur hidup di sepanjang tahap pengembangan dan operasional proyeknya.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- a. Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk menempuh pendekatan daur hidup di sepanjang tahap pengembangan dan operasional proyeknya?
- b. Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini?
- c. Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini?

C.02 Proses Persetujuan Proyek



Pengembangan pertambangan merupakan sebuah proyek padat modal. Akibatnya, perusahaan tambang melakukan evaluasi menyeluruh untuk menentukan jadi-tidaknya berinvestasi ke dalam sebuah proyek tambang.

Satu cara yang terbukti dan efektif untuk mengelola kompleksitas proyek modal di dalam industri pertambangan adalah dengan menempuh pendekatan bertahap (stage-gate) sewaktu proyek bergerak di sepanjang siklus hidupnya dari konsep ke persetujuan proyek. Di setiap 'pintu', keputusan jadi/batal akan diambil berdasarkan informasi yang dihimpun di sepanjang tahap tersebut. Informasi yang dianalisis bisa jadi bersifat teknis (misalnya, karakteristik kandungan bijih mineral) atau keuangan (pasar untuk mineral tertentu, biaya kepatuhan regulasi, ketersediaan dan ongkos tenaga kerja). Namun jika dilakukan secara bertanggung jawab, perusahaan tambang akan memasukkan faktor-faktor risiko yang lain.

Untuk setiap pertambangan yang diusulkan, gabungan permasalahan sosial, politik, hak-hak asasi manusia, keuangan, dan lingkungan akan memengaruhi kelayakan sebuah proyek. Misalnya, sebuah proyek mungkin membutuhkan perundingan yang berkepanjangan untuk mendapatkan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari Masyarakat Adat (Lihat D.09), tanpa adanya kepastian hasil yang positif bagi perusahaan; proyek mungkin perlu memukimkan kembali warga yang dilaksanakan secara tidak sukarela (Lihat D.10), yang bisa saja memakan biaya tinggi terkait ganti rugi bagi rumah tangga yang terdampak dan mitigasi dampak sosial dan hak asasi manusia; atau faktor lingkungan seperti geologi situs dan potensi perubahan presipitasi (curah hujan) akibat perubahan iklim bisa memunculkan risiko jangka panjang yang tidak dapat diterima atau biaya yang berkaitan dengan manajemen limbah tambang (Lihat F.02).

Perusahaan kadang-kadang mengambil keputusan investasi modal dan pilihan operasional yang didasarkan pada definisi sempit risiko keuangan yang mengabaikan faktor sosial, politik, lingkungan, dan

lain-lain sebagai kurang penting bagi keberhasilan proyek. Akibatnya, ambang batas pengaruh risiko tersebut terhadap keputusan persetujuan proyek bisa luar biasa tinggi, misalnya, hanya akan dipertimbangkan jika risiko tersebut cukup kuat untuk menutup sebuah proyek. Analisis yang ketat terhadap faktor risiko lingkungan, ekonomi, sosial, tata kelola, dan hak asasi manusia meningkatkan peluang pengambilan keputusan yang matang dan bertanggung jawab pada tahap investasi proyek.

Kemampuan untuk memengaruhi keberhasilan proyek dan meningkatkan nilai mencapai puncaknya pada awal penilaian proyek dan menurun dengan cepat seiring dengan berjalannya proyek ke arah implementasi. Identifikasi dan analisis awal terhadap risiko lingkungan, ekonomi, sosial, tata kelola, dan hak asasi manusia mengingatkan para pengambil keputusan perusahaan akan adanya permasalahan potensial, dan memungkinkan perencanaan strategi mitigasi pre-emptif yang dapat menghasilkan penghematan biaya yang besar terkait proyek. Sebaliknya, analisis bisa menyebabkan penghindaran proyek yang menghadirkan risiko terlalu berat karena menimbulkan dampak yang besar bagi masyarakat atau lingkungan. Misalnya, beberapa perusahaan tambang kini menyaring investasi prospektif untuk menentukan apakah lokasi tambang berada tepat atau di dekat Situs Warisan Dunia atau wilayah suaka lainnya, untuk memastikan diri agar tidak beroperasi di wilayah yang diakui secara internasional memiliki nilai alam atau budaya yang sangat tinggi.

Lembaga keuangan dan perusahaan investasi swasta yang membiayai proyek-proyek pertambangan semakin gencar mengintegrasikan faktor EESG ke dalam keputusan pemberian pinjaman mereka. Terlepas dari keuntungan inheren yang sudah jelas seperti peninggalan yang lebih positif, perusahaan tambang yang mampu memperlihatkan diri sudah mengevaluasi risiko dan memiliki strategi yang jelas untuk mengurangi risiko lingkungan dan dampak potensial terhadap pekerja dan masyarakat berpeluang lebih besar menjadi peluang yang menarik bagi investor untuk mengucurkan dana. ■

C.02.1**Tindakan**

Perusahaan menerapkan sistem untuk mengintegrasikan kriteria ESG ke dalam proses bertahap (stage-gate) dalam pengambilan keputusan investasi.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk:

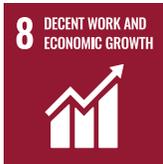
- a. Mengidentifikasi kriteria ESG untuk dipenuhi di masing-masing tahap dari proses pengambilan keputusan investasi?
- b. Menerapkan kriteria ESG yang sudah teridentifikasi ini di masing-masing tahap dari proses pengambilan keputusan investasi?
- c. Memastikan bahwa pegawai yang bertanggung jawab telah memenuhi kualifikasi dalam menerapkan kriteria ESG yang sudah teridentifikasi ini ke dalam proses pengambilan keputusan investasi?

• *Prinsip 2 UNGC*

C.03 Penutupan Tambang dan Viabilitas Pascapenutupan



Seperti halnya pembangunan dan operasi pertambangan skala besar menimbulkan perubahan radikal terhadap lanskap alam dan sosio-ekonomi suatu wilayah, penutupan tambang juga menciptakan potensi dampak yang besar. Viabilitas ekonomi dan sosial masyarakat yang menjadi tuan rumah, hidup di sekeliling, atau mengirimkan tenaga kerjanya ke pertambangan sering berkaitan erat dengan pendapatan dari pajak, upah, atau pengadaan terkait tambang, serta infrastruktur dan layanan yang diberikan oleh perusahaan tambang (Lihat D.04).



Setelah penutupan permanen atau sementara pertambangan, terhentinya aliran pendapatan dan keuntungan terkait tambang lainnya bisa menimbulkan dampak yang melumpuhkan dan jangka panjang bagi masyarakat, seperti: migrasi keluar; ambruknya infrastruktur; penurunan layanan sosial; stagnasi perekonomian lokal dan regional; pengangguran yang naik tajam; permasalahan psiko-sosial; dan tingkat kemiskinan dan malnutrisi yang meningkat.



Perencanaan untuk menutup pertambangan merupakan kunci penting. Dan ketika perusahaan bekerja secara kolaboratif dengan masyarakat lokal dan daerah asal pekerja untuk merencanakan penutupan pertambangan, maka banyak dampak negatif, terutama dampak yang timbul dari ketergantungan ekonomi atau sosial yang tidak sehat pada pertambangan, dapat dihindari atau dikurangi. Proses perencanaan penutupan tambang yang efektif melibatkan masyarakat dalam tujuan penutupan, penyusunan rencana aksi, dan estimasi biaya yang diperlukan dalam mewujudkan hasil yang diharapkan. Selain itu, pelibatan awal pekerja dan masyarakat dalam perencanaan penutupan, idealnya pada awal-awal eksplorasi pertambangan (Lihat C.01), meningkatkan transparansi, kredibilitas, dan peluang hasil yang sesuai harapan.

Beberapa strategi potensial untuk meminimalkan dampak yang berkaitan dengan penutupan meliputi: penerapan program dan sistem untuk mendukung perekonomian beragam (Lihat D.04); pembangunan kapasitas dan kecakapan untuk mengelola dan mempertahankan layanan dan infrastruktur yang pada awalnya didukung oleh pertambangan (misalnya, kesehatan, pendidikan, fasilitas air atau energi); transformasi infrastruktur terkait pertambangan untuk penggunaan lain, seperti produksi pertanian; dan penciptaan mekanisme untuk memastikan bahwa keuntungan yang tercantum di dalam perjanjian pembangunan lokal atau masyarakat atau melalui prakarsa lain akan terus terakumulasi melampaui usia pertambangan.

Tambahan lagi, pelibatan pekerja ke dalam perencanaan perampingan dan pemberian bantuan seperti pelatihan, konseling karier dan konseling keuangan, peluang pindah kerja, dan sumber daya lain akan membantu mereka lebih mampu mengelola transisi ketika pertambangan ditutup.

Selain pertimbangan sosio-ekonomi, perencanaan penutupan pertambangan yang efektif bertujuan untuk memastikan lanskap pascapenambangan tetap aman dan stabil secara fisik, pemulihan ekosistem fungsional, minimalisasi risiko pencemaran jangka panjang, dan perlindungan pasokan air di sekitar sehingga masyarakat akan memiliki akses ke sumber daya untuk mendukung dan menopang sumber mata pencaharian alternatif pada masa pascapenambangan. Implikasi perubahan iklim juga perlu dipertimbangkan ketika merencanakan viabilitas pascapenutupan. Sejauh dimungkinkan, upaya restorasi dan rehabilitasi berlangsung secara progresif, artinya, bersamaan dengan operasi pertambangan. Upaya ini tidak hanya mengurangi tanggung jawab jangka panjang perusahaan, tetapi juga memperlihatkan kepada

para pemangku kepentingan bahwa perusahaan menempuh pendekatan proaktif dalam mengurangi dampak lingkungan.

Upaya mewariskan peninggalan pascapertambangan yang positif membutuhkan investasi yang besar. Biaya rehabilitasi dan restorasi lingkungan saja bisa menelan puluhan atau ratusan juta dolar tergantung pada skala operasi pertambangan, rentang permasalahan yang harus diselesaikan sebelum penutupan, dan ada-tidaknya sistem yang harus dipertahankan pascapenutupan untuk memastikan perlindungan lingkungan jangka panjang. Karena itu, semua pemangku kepentingan berkepentingan bahwa perusahaan mampu menunjukkan diri memiliki anggaran yang cukup untuk menanggung biaya penutupan tambang dan aktivitas pascapenutupan, dan bahwa jaminan keuangan ini disendirikan dari aset perusahaan yang lain sehingga akan siap sedia manakala terjadi pailit atau pelanggaran pemerintah.

Jaminan keuangan juga memberikan dana untuk mendukung keawetan dan kesuksesan layanan sosial, fasilitas, dan program

sosio-ekonomi pascapenutupan tambang. Perusahaan tambang yang bekerja sama dengan masyarakat terdampak dan pemerintah lokal, dapat mengembangkan mekanisme jaminan keuangan dan sosio-ekonomi pascapenutupan, meskipun hal tersebut tidak diwajibkan oleh regulasi pemerintah.

Ketika perusahaan tambang meninggalkan warisan sosio-ekonomi atau lingkungan yang negatif, reputasi mereka dan juga industri ekstraktif secara keseluruhan menjadi tercoreng. Portofolio lokasi tambang dan masyarakat pascapenutupan yang aman, stabil, dan makmur lebih berpeluang menarik dukungan bagi izin sosial perusahaan agar bisa beroperasi di area baru. Konsekuensinya, perusahaan tambang terkemuka semakin giat mengintegrasikan pertimbangan sosial dan ekonomi ke dalam perencanaan daur hidup operasi untuk lebih memastikan bahwa proyek pertambangan akan menciptakan nilai jangka panjang bagi negara-negara produsen dan masyarakat terdampak serta pekerja, baik selama penambangan maupun pascapenutupan. ■

<p>C.03.1 Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengelola transisi pascapenutupan bagi masyarakat yang terdampak, agar dapat memastikan viabilitas yang berkelanjutan bagi sumber mata pencaharian mereka.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi, dari tahap paling awal dan dengan berkonsultasi bersama pemangku kepentingan lokal, dampak yang akan ditimbulkan oleh penutupan tambang mereka terhadap masyarakat yang terdampak? Menyusun rencana manajemen transisi pascapenutupan dari tahap paling awal dan dengan berkonsultasi bersama pemangku kepentingan lokal, yang bertujuan memastikan viabilitas sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak? Mempertimbangkan peluang pemanfaatan lahan pascapenutupan dalam menyusun rencana manajemen ini? 	
<p>C.03.2 Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya menyusun rencana transisi pascapenutupan tambang yang adil bagi pekerja.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi, dari tahap paling awal, dampak yang akan ditimbulkan oleh penutupan tambang mereka terhadap pekerja? Menyusun rencana manajemen transisi pascapenutupan, dari tahap paling awal, yang memastikan viabilitas sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi pekerja? Menjalin kemitraan dengan pemerintah, industri atau perusahaan lain untuk menjawab kebutuhan sumber mata pencaharian pekerja? 	<p>• Pengungkapan GRI 404-2</p>
<p>C.03.3 Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya terkait rehabilitasi tambang progresif.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang implementasi rencana rehabilitasi progresifnya di sepanjang operasi? Mengaudit dan/atau meninjau kinerjanya atas rehabilitasi tambang progresif? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan kinerjanya atas rehabilitasi tambang progresif? 	
<p>C.03.4 Tindakan</p>	<p>Perusahaan mengungkapkan perjanjian jaminan keuangan atas kewajiban socio-ekonomi yang berkaitan dengan penutupan dan pascapenutupan tambang.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri secara publik sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengungkapkan perjanjian jaminan keuangan untuk penutupan semua operasinya, yang berkaitan dengan pekerja dan masyarakat? Mengungkapkan perjanjian keuangan untuk menjamin tanggungan aspek socio-ekonomi jangka panjang dari pascapenutupan? Mengungkapkan informasi ini secara terpilah sesuai proyek? 	

C.04 Uji Tuntas Merger, Akuisisi, dan Pelepasan



Industri pertambangan global kerap mengalami pembelian, penjualan, dan penggabungan perusahaan dan properti pertambangan. Setiap perusahaan tambang dan proyek tambang memiliki karakteristik unik yang dapat menimbulkan risiko keuangan, hukum, atau reputasi bagi pembeli dan penjual. Merger, akuisisi, atau pelepasan perusahaan atau proyek juga dapat menimbulkan risiko ekonomi, lingkungan, sosial, dan hak-hak asasi manusia bagi masyarakat dan pekerja. Misalnya, restrukturisasi yang sering terjadi setelah merger bisa mengakibatkan PHK dan dampak terkait ke masyarakat.

Sulit sekali memprediksi bagaimana perubahan kepemilikan tambang dapat memengaruhi perlindungan lingkungan atau pembangunan sosial dan ekonomi. Komitmen sebelumnya kepada masyarakat mungkin diabaikan atau dicabut seluruhnya, yang mungkin menjurus pada konflik lebih tajam, pelanggaran HAM, atau pencemaran lingkungan; sedangkan dalam kasus lain, pemilik baru dapat memberikan komitmen pembangunan ekonomi dan sosial, perlindungan lingkungan, dan hubungan masyarakat yang lebih kuat.

Lazimnya, sebelum melakukan merger, akuisisi, atau pelepasan properti pertambangan, perusahaan menjalani uji tuntas untuk memahami risiko tinggalan dan risiko ke depan, sekaligus mempertimbangkan mungkin-tidaknya melakukan mitigasi risiko secara memadai sebelum bergerak maju. Kini banyak perusahaan tambang tidak sekadar menilai risiko keuangan, tetapi bahkan melakukan penilaian yang lebih terperinci tentang risiko lingkungan, sosial, tata kelola, dan hak asasi manusia, seperti risiko yang berkaitan dengan korupsi atau suap (Lihat B.01), di dalam keputusan merger, akuisisi, atau pelepasan.

Pengungkapan utuh atas kewajiban yang ada dan yang berpotensi muncul sering dimandatkan oleh perundang-undangan. Namun perusahaan dapat bergerak melampaui itu, dan bahkan memasukkan langkah terkait ke dalam perjanjian jual-beli tambang yang menjamin tingkat perlindungan yang tinggi bagi lingkungan dan masyarakat. Misalnya, sebelum melepas properti pertambangan, perusahaan tambang dapat memastikan bahwa pembeli memiliki keahlian teknis untuk dapat mengoperasikan tambang secara bertanggung jawab, rekam jejak yang terbukti nyata yang berkaitan dengan ESG, dan adanya jaminan keamanan keuangan yang memadai setelah penjualan untuk melakukan pemulihan lingkungan.

Uji tuntas ESG merupakan hal yang dapat diterima dengan baik dari segi bisnis. Merger dan akuisisi berpotensi memaksa perusahaan masuk ke dalam negara yang peraturan hukumnya tidak melindungi kesehatan manusia atau lingkungan; yang lemah perekonomian dan terbatas layanannya; yang lebih kompetitif akses ke sumber daya mineralnya; atau yang memiliki riwayat hubungan yang buruk antara industri pertambangan dan masyarakat. Situasi ini dapat mewujudkan menjadi biaya tinggi bagi perusahaan dalam bentuk upaya hukum, penangguhan operasional, waktu kerja karyawan yang habis untuk memitigasi masalah-masalah yang tak terduga, rusaknya reputasi akibat konflik dengan masyarakat, dan hilangnya kepercayaan dari para investor.

Demikian pula, pelepasan properti pertambangan menciptakan potensi kewajiban jangka panjang bagi pembeli, juga bagi penjual, pemerintah, dan masyarakat jika pembeli tidak memiliki kepakaran teknis atau sumber keuangan untuk mengelola dan menunaikan kewajiban lingkungan secara memadai. ■

C.04.1

Tindakan

Perusahaan menerapkan sistem untuk mengidentifikasi dan menilai risiko ESG potensial, termasuk hak asasi manusia, yang berkaitan dengan merger, akuisisi, dan pelepasan.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan bahwa uji tuntas terhadap merger, akuisisi, dan pelepasan turut mencakup:

- a. Permasalahan lingkungan yang penting?
- b. Permasalahan sosial dan hak asasi manusia yang penting?
- c. Permasalahan tata kelola yang penting?



D Kesejahteraan Masyarakat



Proyek pertambangan berpotensi mengubah masyarakat secara positif dan negatif. Keuntungan ekonomi mungkin bisa dipetik melalui penciptaan lapangan kerja dan peluang bagi bisnis lokal untuk memasok jasa atau produk ke pertambangan. Pada sisi lain, pertambangan juga dapat mengurangi atau merusak sumber daya alami yang memberikan sumber makanan, nafkah, dan layanan kepada masyarakat. Karakter sosial sebuah masyarakat juga bisa berubah akibat masuknya tenaga kerja pertambangan migran. Pendapatan dan keuntungan terkait pertambangan bisa jadi tidak didistribusikan secara merata, yang dapat menimbulkan konflik di dalam masyarakat dan bahkan keluarga. Jika digabungkan, dampak lingkungan dan sosial yang berkaitan dengan pertambangan bisa memicu pelanggaran berbagai hak asasi manusia.

Seperti halnya dengan hubungan jangka panjang, hubungan perusahaan-masyarakat merupakan hal yang kompleks. Perusahaan tambang sering menghadapi tantangan dalam memenuhi keinginan kelompok yang berbeda-beda sehingga tanpa perencanaan dan intervensi yang matang, konflik bisa dipastikan akan muncul. Perusahaan yang melakukan

pendekatan pada masyarakat sejak awal-awal siklus hidup proyek dan menunjukkan kesediaan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan secara terbuka dan penuh penghargaan berpeluang lebih besar untuk menumbuhkan kepercayaan. Dan perusahaan yang menerapkan sistem yang efektif untuk menerima dan menyelesaikan keluhan masyarakat akan lebih berpeluang mempertahankan hubungan yang positif dan berhasil mencegah atau mengatasi risiko dan dampak hak asasi manusia.

Penciptaan keuntungan ekonomi, lingkungan, dan sosial yang positif membutuhkan pelibatan aktif masyarakat di sepanjang siklus hidup pertambangan. Melalui kerja sama yang berkelanjutan dengan beraneka ragam pemangku kepentingan, termasuk kelompok marginal dan rentan di dalam perencanaan, perancangan, dan implementasi penanaman sumber daya di masyarakat yang disponsori tambang dan peluang terkait tambang, perusahaan tambang lebih bisa memastikan bahwa masyarakat yang ditinggalkan oleh usaha pertambangan adalah masyarakat yang sehat dan mampu bertahan hidup. ■

D.01 Hak Asasi Manusia



Operasi pertambangan berpotensi memengaruhi serangkaian hak asasi manusia, mulai dari hak-hak spesifik pekerja (Lihat Bagian E), perempuan (Lihat D.07), anak (Lihat D.04), atau Masyarakat Adat (Lihat D.08 dan D.09) hingga hak-hak yang berlaku bagi semua umat manusia. Bergantung pada konteks politik, sosial, dan operasional di pertambangan (misalnya, Lihat D.02, D.05, D.10, dan D.11), hak asasi manusia lainnya bisa terkena dampaknya, meliputi hak akan kesehatan, air bersih yang aman, standar hidup yang layak; kehidupan, kebebasan, dan keselamatan manusia; nondiskriminasi; lingkungan kerja yang aman; kebebasan beraktivitas; akses ke penyelesaian pelanggaran; atau yang lain-lain.

Para pembela HAM mendapatkan hak dan perlindungan khusus, seperti dijelaskan dalam Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia. Namun secara global, anggota masyarakat, Masyarakat Adat, dan para pembela HAM yang menyatakan perlawanan terhadap proyek pertambangan terus mengalami pelanggaran HAM, stigmatisasi, pelecehan, penyerangan, atau lainnya yang lebih buruk. Global Witness mencatat 207 pembunuhan terhadap para pembela lahan dan lingkungan pada 2017, dan sektor pertambangan menduduki peringkat kedua, di bawah agrobisnis, dari sisi jumlah pembunuhan tersebut.

Kini sudah diterima luas bahwa semua perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia. Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia dari PBB (yaitu, UNGP) merupakan standar global otoritatif tentang bisnis dan hak asasi manusia, yang membekali perusahaan dengan kerangka kerja untuk menjalankan uji tuntas guna mengatasi risiko dan dampak terkait HAM.

UNGP menganjurkan agar perusahaan menilai risiko dari aktivitas perusahaan terhadap hak asasi manusia, atau menilai risiko yang mungkin berhubungan langsung dengan operasi, produk, atau layanan mereka melalui hubungan bisnis (Lihat juga B.08). Prinsip UNGP tersebut menetapkan bagaimana tindakan perusahaan semestinya memprioritaskan hak asasi manusia yang paling menonjol bagi operasi pertambangan, yaitu, yang berisiko menimbulkan dampak negatif paling berat bagi manusia.

Ketika risiko terhadap hak asasi manusia berhasil diidentifikasi, perusahaan diharapkan mengambil langkah-langkah untuk mencegah, memitigasi, dan menanggulangi dampak, termasuk memberikan pemulihan bagi korban (Lihat D.12). Selain itu, ketika perusahaan tambang menyadari kasus-kasus pelanggaran HAM yang nyata di wilayah operasionalnya, norma internasional menyatakan bahwa perusahaan hendaknya melaporkan insiden tersebut ke pihak berwenang pemerintah yang relevan dan badan-badan hak asasi manusia internasional.

Aspek lain dari uji tuntas hak asasi manusia meliputi keterlibatan pemangku kepentingan, yang bisa meliputi pendekatan kolaboratif dan partisipatif terhadap penilaian risiko dan dampak terkait HAM; menerapkan mekanisme bagi pemangku kepentingan untuk mengadakan keluhan terkait HAM (Lihat D.12); memantau efektivitas tindakan perusahaan; dan mengomunikasikan pola penyelesaian risiko. Kerangka Pelaporan UNGP memberikan panduan bagi perusahaan tentang cara melaporkan penanganan risiko terkait hak asasi manusia secara efisien dan utuh terpadu.

Perusahaan yang melakukan uji tuntas HAM secara menyeluruh dapat memetik keuntungan keuangan dan reputasi, dan berpeluang lebih besar memberikan kontribusi positif bagi hasil

yang disasar oleh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (yaitu, menghapus kemiskinan, melindungi bumi, dan menjamin kemakmuran bagi semua manusia). Pencegahan, mitigasi, dan penyelesaian pelanggaran HAM meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan pekerja yang terbaik dengan menciptakan

lingkungan kerja yang aman dan terjamin; meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; membantu memperkuat lembaga dan akuntabilitas pemerintah; dan berkontribusi bagi iklim investasi yang lebih menarik, yang kesemuanya membantu mendorong pembangunan yang berkelanjutan. ■

<p>D.01.1</p> <p>Komitmen</p>	<p>Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak-Hak Asasi Manusia dari PBB.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan UNGP? Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini? Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini? 	<ul style="list-style-type: none"> • UNGPA1 • Prinsip 1 UNGC
<p>D.01.2</p> <p>Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak-Hak Asasi Manusia dari PBB, untuk melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia secara rutin di seluruh operasinya, untuk menilai dan mengatasi risiko hak-hak asasi manusia.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan menilai dampak nyata aktivitasnya terhadap hak asasi manusia? Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna mencegah, mengurangi, dan mempertimbangkan cara menyelesaikan dampak-dampak yang sudah teridentifikasi ini? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis? 	<ul style="list-style-type: none"> • UNGP C3 • Prinsip 1 UNGC; Prinsip 2 • GRI 412 • SASB NR0302-17
<p>D.01.3</p> <p>Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya terkait manajemen masalah hak asasi manusia.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam menangani masalah hak-hak asasi manusia, termasuk data terpilah di tingkat lokasi tambang tentang implementasi proses uji tuntas hak asasi manusia? Mengaudit dan/atau meninjau kinerjanya dalam menangani masalah hak asasi manusia? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan kinerjanya dalam menangani masalah hak asasi manusia? 	<ul style="list-style-type: none"> • UNGP C5
<p>D.01.4</p> <p>Komitmen</p>	<p>Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak dan perlindungan yang diberikan kepada para pembela HAM di dalam wilayah operasinya.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk menghormati hak dan perlindungan yang diberikan kepada para pembela HAM di dalam wilayah operasinya? Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini? Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini? 	

D.02 Keamanan dan Wilayah yang Terdampak Konflik



Banyak pertambangan yang beroperasi di tempat-tempat yang penuh tantangan mengandalkan satuan keamanan swasta atau publik untuk melindungi karyawan, produk, dan harta benda mereka. Meskipun penyedia jasa keamanan dapat membantu menjaga kestabilan dan menegakkan aturan hukum di lokasi tambang, tetap saja ada risiko kurangnya pengawasan, pelatihan yang tidak memadai, atau kondisi-kondisi lain bisa mengarah ke penggunaan upaya paksa secara tidak semestinya dan pelanggaran HAM oleh penyedia jasa keamanan tersebut.

Ketika pengamanan tidak dilaksanakan dengan cara-cara yang menghormati HAM, dampak buruknya bisa dirasakan secara tidak semestinya oleh kelompok tertentu seperti para pembela HAM (Lihat D.01), Perempuan, atau anak. Ada banyak sekali contoh tuduhan yang dialamatkan ke perusahaan ekstraktif atas keterlibatan mereka dalam tindakan represif terhadap protes, yang kadang-kadang menimbulkan korban jiwa atau pelecehan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus tertentu, tuduhan dilontarkan dalam hubungannya dengan satuan keamanan swasta yang disewa oleh perusahaan ekstraktif; dalam kasus lain, polisi atau satuan militer pemerintah merupakan terduga pelaku pelanggaran HAM.

Ketika pertambangan beroperasi di negara-negara dengan tata kelola yang lemah, atau di wilayah yang terdampak konflik atau rawan, risiko terhadap operasi tambang berikut pekerja dan masyarakat juga akan meningkat. Wilayah semacam itu sering dengan kekerasan bersenjata, tindakan kriminal, dan pelanggaran HAM berat atau meluas, termasuk kekerasan seksual dan berbasis gender, dan, dalam beberapa kasus, penculikan atau pembunuhan karyawan perusahaan.

Pertambangan yang berada di wilayah terdampak konflik mungkin dipaksa melakukan pembayaran kepada pasukan bersenjata atau anasir kriminal, yang mengakibatkan perusahaan terlibat dalam tindakan ilegal atau pelanggaran HAM. Dalam beberapa kasus, kehadiran sebuah pertambangan itu saja, dengan dampak dan keuntungan yang nyata atau yang berupa persepsi, bisa menciptakan atau memperparah konflik antar- atau intramasyarakat di lingkungan yang sudah rawan dan rapuh. Mengingat tingginya risiko bagi perusahaan, pekerja, dan masyarakat lokal, kini sudah menjadi ekspektasi global bahwa bisnis yang beroperasi di wilayah terdampak konflik atau rawan melakukan uji tuntas dan mitigasi untuk menghindari diri agar tidak ikut berkontribusi pada konflik, ketidakamanan, dan pelanggaran HAM ketika beroperasi di wilayah tersebut (Lihat juga D.01).

Pemerintah mengemban tanggung jawab utama untuk menjaga hukum dan ketertiban, serta melindungi warga negaranya dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga. Namun di beberapa wilayah, penegakan hukum yang lemah membuat masyarakat rentan mengalami pelanggaran. Terlepas dari apakah pemerintah di negara-negara produsen menunaikan tugas untuk melindungi hak asasi manusia warganya, terdapat ekspektasi global bahwa perusahaan harus menghormati hak asasi manusia di keseluruhan operasinya (Lihat D.01). Hal ini mencakup mengambil tindakan untuk mencegah keterlibatan dalam pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki hubungan tertentu dengan perusahaan, seperti satuan keamanan publik atau swasta yang melindungi aset perusahaan.

Pada 2000, Prinsip-Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak Asasi Manusia disusun melalui prakarsa multipemangku kepentingan untuk memberikan panduan khusus bagi industri

ekstraktif dalam menjaga keselamatan dan keamanan operasi mereka di dalam kerangka operasional yang mendorong penghormatan terhadap HAM. Prinsip-prinsip sukarela ini mendorong perusahaan untuk, di antaranya: menilai risiko yang berkaitan dengan keamanan, potensi kekerasan, catatan hak asasi manusia dari penyedia jasa keamanan, aturan hukum, konflik dan transfer peralatan; berkonsultasi dengan masyarakat dan mengomunikasikan pengaturan keamanan; memastikan penempatan dan perilaku satuan keamanan yang tepat; melaporkan atau menyelidiki tuduhan pelanggaran HAM; dan melatih satuan keamanan dan memperkuat institusi negara dalam menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Beberapa perusahaan mengadakan kontrak dengan satuan keamanan swasta atau menandatangani nota kesepahaman (MOU) dengan satuan keamanan publik untuk menjelaskan peran, tugas, dan kewajiban masing-masing menyangkut penyediaan jasa keamanan. Prinsip-prinsip sukarela menganjurkan agar

perusahaan mendorong pemerintah untuk membuat informasi tentang pengaturan keamanan transparan dan dapat diakses oleh publik, kecuali informasi yang dapat menimbulkan ancaman keamanan, keselamatan, atau hak asasi manusia, dan dalam upaya meningkatkan transparansi serta membangun kepercayaan dengan masyarakat terdampak dan pemangku kepentingan. Selain itu, beberapa perusahaan ekstraktif telah mulai mengungkapkan secara publik MOU mereka dengan satuan keamanan publik.

Meskipun tidak wajib, uji tuntas ekstra di wilayah terdampak konflik dan dalam manajemen pengaturan keamanan semakin gencar didukung oleh pemerintah dan diadopsi oleh perusahaan tambang yang menyadari bahwa manajemen konflik, keamanan, dan hak asasi manusia yang cermat dapat berkontribusi pada: pemeliharaan reputasi dan izin sosial perusahaan untuk terus beroperasi; peningkatan akses ke pendanaan; penurunan penangguhan produksi; dan rendahnya risiko pelanggaran HAM dan litigasi. ■

<p>D.02.1 Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencegah dan menyelesaikan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan manajemen keamanan, sejalan dengan Prinsip-Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak-Hak Asasi Manusia.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM yang berkaitan dengan manajemen keamanannya? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM yang berkaitan dengan manajemen keamanannya? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM yang berkaitan dengan manajemen keamanannya? 	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip 1 UNGC; Prinsip 2 • VPs C.13; D.14 • GRI 410 • IFC PS4.12 • SASB NR0302-17
<p>D.02.2 Tindakan</p>	<p>Jika memungkinkan, perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mengidentifikasi dan menilai risiko bagi pekerja dan masyarakat yang berkaitan dengan kehadiran operasi tambang di wilayah yang terdampak konflik dan rawan, serta merancang dan mengimplementasikan strategi untuk mengatasi risiko yang sudah teridentifikasi.</p> <p><i>Jika memungkinkan, di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan menilai risiko bagi pekerja dan masyarakat yang berkaitan dengan kehadiran mereka di wilayah yang terdampak konflik dan rawan? Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna mengatasi risiko yang sudah teridentifikasi ini? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis? 	<ul style="list-style-type: none"> • VP B5

D.03 Keterlibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan



Pertambangan merupakan industri yang menantang secara teknis, meskipun konon mengelola hubungan yang kompleks dengan masyarakat dan pemangku kepentingan bahkan lebih sulit daripada mengeluarkan bahan-bahan tambang dari bumi. Hal ini sebagian disebabkan oleh kenyataan beragamnya para pemangku kepentingan atas setiap proyek pertambangan, meliputi perempuan, laki-laki, generasi muda, anak-anak, kelompok rentan atau marginal, organisasi kemasyarakatan, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepentingan khusus, dan lain-lain. Selain itu, mereka sering memiliki pendapat, dan kepentingan, yang sangat berbeda terhadap potensi keuntungan dan dampak yang berkaitan dengan pertambangan.

Banyak perusahaan tambang, pemerintah, dan lembaga keuangan internasional menyadari bahwa menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang terdampak oleh atau tertarik pada proyek pertambangan dapat meningkatkan identifikasi dan manajemen risiko lingkungan dan sosial, serta viabilitas proyek jangka panjang. Dari perspektif perusahaan tambang, tujuan utama keterlibatan pemangku kepentingan adalah untuk membangun dan memelihara hubungan yang konstruktif dengan beragam pemangku kepentingan sepanjang siklus hidup pertambangan. Namun upaya menjalin hubungan yang dibangun atas dasar kepercayaan, saling menghormati, dan pemahaman membutuhkan waktu dan keahlian. Karena alasan inilah, banyak perusahaan tambang mulai melibatkan pemangku kepentingan sejak tahap awal pengembangan proyek, dan merekrut staf profesional yang khusus bertugas menjalankan proses pelibatan tersebut dengan pengawasan dan sumber daya manajemen yang sesuai.

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan sebuah proses yang aktif dan berlangsung terus-menerus, yang, tergantung pada

proyek pertambangan dan tahap pengembangan tambang, bisa melibatkan elemen-elemen berikut: analisis pemangku kepentingan dan rencana pelibatan pemangku kepentingan; pengungkapan dan penyebaran informasi; konsultasi yang berkaitan dengan risiko, dampak, strategi mitigasi, dan keuntungan proyek; partisipasi masyarakat dalam pemantauan proyek; mekanisme untuk mengadakan keluhan dan menjamin penyelesaian (Lihat D.12); dan pelaporan ke pemangku kepentingan dan masyarakat terdampak.

Partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam berbagai penilaian dampak merupakan kunci untuk memastikan bahwa kepentingan, perhatian, dan pengetahuan yang dimiliki oleh pemangku kepentingan yang berbeda-beda, khususnya masyarakat yang terdampak langsung oleh proyek pertambangan, dipertimbangkan secara memadai oleh perusahaan tambang. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penilaian dampak akan terasa sangat membantu ketika masyarakat dibekali dengan informasi yang tepat waktu dan utuh untuk memudahkan mereka memberikan masukan yang sesuai kepada perusahaan.

Keterlibatan yang bermakna berpeluang besar akan terjadi ketika perusahaan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk merancang proses pelibatan yang tepat secara budaya dan dapat diakses, membangun kapasitas pemangku kepentingan, dan menghilangkan kendala bagi partisipasi. Secara khusus, perhatian perlu diberikan pada pelibatan partisipasi kelompok-kelompok yang mungkin terdampak secara tidak semestinya oleh aktivitas perusahaan, seperti kaum perempuan, generasi muda, para penyandang disabilitas, dan kelompok marginal atau rentan di dalam masyarakat yang terdampak. Selain itu, keterlibatan anak-anak seyogianya tidak diabaikan karena mereka dapat memberikan perspektif yang unik tentang pengalaman, kerentanan, minat/

kepentingan, dan aspirasi mereka. Namun perhatian sebaiknya diberikan pada kapan keterlibatan langsung dengan anak-anak itu penting versus kapan keterlibatan dengan para pembela hak anak dan kelompok pemangku kepentingan hak anak menjadi lebih tepat.

Pelibatan pemangku kepentingan yang efektif menciptakan peluang dialog dua arah sehingga para pemangku kepentingan merasa didengar dan dapat mengeksplorasi penanganan keprihatinan mereka bersama perusahaan. Umpan balik semacam itu dapat membantu perusahaan melacak efektivitas upaya pelibatan dan memberikan wawasan tentang peluang penyempurnaan proses mereka dari waktu ke waktu.

Keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan yang bermakna, proaktif, dan inklusif yang mencakup peluang dialog dan umpan balik dapat membantu sebuah perusahaan mendapatkan dan mempertahankan izin sosial untuk beroperasi dan mengurangi konflik, sehingga menghindarkan risiko reputasi dan biaya yang berpotensi terjadi jika keprihatinan pemangku kepentingan tidak diidentifikasi dan diatasi secara memadai. Hal tersebut juga dapat mengurangi waktu yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan dan merundingkan perjanjian; memperbaiki profil risiko perusahaan; dan meningkatkan akses ke permodalan dengan syarat-syarat yang lebih mudah. ■

<p>D.03.1 Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah khusus untuk memudahkan partisipasi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam diskusi dan pengambilan keputusan tentang permasalahan yang mungkin memengaruhi hidup mereka.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mengambil langkah-langkah khusus untuk memudahkan partisipasi:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Perempuan dalam diskusi dan pengambilan keputusan tentang permasalahan yang mungkin memengaruhi hidup mereka? Pemuda dalam diskusi dan pengambilan keputusan tentang permasalahan yang mungkin memengaruhi hidup mereka? Penyandang disabilitas dalam diskusi dan pengambilan keputusan tentang permasalahan yang mungkin memengaruhi hidup mereka? 	<ul style="list-style-type: none"> • UNGP C.2 • GRI 413 • IFC PS1.31
<p>D.03.2 Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas hubungannya dengan masyarakat terdampak.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kualitas hubungannya dengan masyarakat terdampak? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk membangun dan menjaga hubungan saling percaya dengan masyarakat terdampak? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna membangun dan menjaga hubungan saling percaya dengan masyarakat terdampak? 	

D.04 Viabilitas Ekonomi dan Sosial



Proyek-proyek pertambangan berpotensi mengubah watak ekonomi dan sosial masyarakat yang terkena dampak, masyarakat di sekitarnya, dan daerah asal pekerjanya. Viabilitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pertambangan dapat ditingkatkan melalui penciptaan peluang usaha seperti kontrak pengadaan serta penciptaan lapangan kerja langsung dan tidak langsung.

Jumlah pekerjaan yang langsung terkait tambang yang tersedia bagi pekerja lokal bisa tergolong besar, tetapi kebanyakan pekerjaan tersebut bersifat sementara, hanya berjalan selama tahap konstruksi. Selama tahap ekstraksi mineral, pekerjaan menjadi semakin terspesialisasi, dan tanpa pelatihan yang memadai pekerjaan tersebut bisa jatuh ke tangan pekerja terampil dari luar masyarakat lokal atau negara produsen. Keuntungan yang biasanya lebih signifikan dan berumur panjang adalah pemerolehan pasokan barang dan jasa dari perusahaan lokal; pengadaan dari masyarakat lokal, terutama ketika didukung oleh upaya-upaya strategis untuk memperkuat pengembangan kewirausahaan dan usaha lokal, dapat mengubah perekonomian lokal, membangun kecakapan, dan menciptakan peluang kerja, termasuk bagi kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang kecil kemungkinannya mendapatkan pekerjaan di pertambangan. (Lihat A.02 untuk uraian tentang keuntungan mendukung peluang pengadaan bagi pemasok nasional dan wilayah yang lebih besar). Perusahaan tambang semakin giat melaporkan proses dan kinerja pengadaan lokal mereka, dan upaya-upaya pun terus ditempuh untuk mendorong lebih banyak pelaporan di tingkat lokasi tambang agar dapat mendukung perusahaan mengelola pengadaan lokal dan mematangkan serta memberdayakan pemasok, masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan yang lain.

Jika tidak dikelola sebagaimana mestinya, masuknya pendapatan baru dan masuknya pekerja dan pendatang lainnya dapat mengancam integritas sosial dan budaya masyarakat, menciptakan konflik sosial, menimbulkan pelanggaran HAM, dan mengacaukan aktivitas ekonomi tradisional serta layanan ekologis yang menjadi andalan masyarakat.

Penilaian dampak sosial adalah alat penting untuk mengurangi dampak potensial dan meningkatkan prospek sosial dan ekonomi yang berkaitan dengan proyek-proyek tambang. Penilaian dampak sosial adalah sebuah proses yang berlangsung terus-menerus untuk mengidentifikasi pola perubahan kesejahteraan sebuah masyarakat, atau kelompok tertentu di dalam masyarakat, sebagai akibat dari proyek tambang, dan kemudian mengembangkan strategi untuk menghindari, memitigasi, dan mengatasi dampak di sepanjang siklus hidup pertambangan. Penilaian ini berpotensi besar menghasilkan informasi yang tepercaya dan strategi jangka panjang yang mampu bertahan apabila penilaian ini dimulai sejak dini dalam siklus proyek pertambangan, dan ditempuh sebagai upaya kolaboratif antara perusahaan dengan masyarakat terdampak dan pekerja, dengan memastikan partisipasi kaum perempuan, generasi muda, dan anak-anak atau para pembela hak anak (Lihat D.03), serta kelompok-kelompok yang lain.

Dalam beberapa kasus, perusahaan tambang menilai dampak potensial terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari penilaian dampak sosial (atau bagian dari penilaian dampak lingkungan dan sosial terpadu). Jika tidak dilakukan, penilaian risiko terhadap hak asasi manusia ini perlu dilakukan sebagai aktivitas yang berdiri sendiri (Lihat D.01), karena bila hal ini tidak dilakukan maka risiko penting terhadap viabilitas sosial bisa terlewat.

Strategi untuk mengurangi dampak dan meningkatkan viabilitas ekonomi dan sosial jangka panjang muncul dalam banyak bentuk. Beberapa perusahaan tambang mengembangkan kebijakan atau perjanjian kerja dengan masyarakat yang melibatkan target perekrutan lokal, pelatihan dan peluang kenaikan karier yang difokuskan pada pembinaan para profesional pertambangan lokal dan dukungan pengembangan kecakapan yang lebih luas (Lihat A.04), atau prakarsa lain seperti alih keterampilan atau program pembiayaan mikro untuk merangsang dan melakukan diversifikasi perekonomian lokal. Kebijakan, perjanjian, dan prakarsa tersebut dapat membantu memastikan masyarakat lokal mampu memetik manfaat jangka panjang dari peluang kerja baik langsung maupun tidak langsung, berikut layanan atau infrastruktur yang terbangun sebagai buah dari pengembangan pertambangan. Namun kebijakan dan program ketenagakerjaan sering tidak berhasil memberikan manfaat yang adil bagi semua segmen masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, beberapa strategi secara khusus membidik generasi muda, perempuan, dan kelompok yang berpotensi termarginalkan atau rentan lainnya, termasuk Masyarakat Adat.

Penilaian dampak sosial dan prakarsa ekonomi berpeluang besar memberikan keuntungan sosial dan ekonomi jangka panjang

ketika keduanya dikembangkan melalui proses yang inklusif dan partisipatif, menghadirkan transparansi terkait syarat dan ketentuan, dan menyertakan ketentuan untuk memantau dan mengevaluasi (M&E) proses, hasil, dan dampak. Para pemangku kepentingan lokal sering memiliki kriterianya sendiri dalam mengukur kesuksesan atau kegagalan kebijakan dan prakarsa sosial dan ekonomi, dan akibatnya, program M&E yang melibatkan masyarakat secara langsung lebih berpeluang besar untuk menumbuhkan kepercayaan pada proses dan meningkatkan kredibilitas serta efektivitas capaian sosial, kesehatan, dan ekonomi.

Ketika direncanakan dan diimplementasikan dengan baik, prakarsa sosial dan ekonomi terkait tambang dapat meningkatkan prospek ekonomi baik untuk saat ini maupun dalam jangka panjang serta kesejahteraan sosial masyarakat yang terdampak tambang. Hal ini pada gilirannya dapat memberikan manfaat bagi perusahaan tambang dengan mendukung angkatan kerja yang lebih sehat dan meningkatkan produktivitas pertambangan, memperkuat hubungan masyarakat dan reputasi perusahaan, mendapatkan dan mempertahankan izin sosial untuk beroperasi, dan mengurangi konflik yang dapat mengakibatkan penangguhan atau penutupan proyek. ■

<p>D.04.1</p> <p>Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mendorong kewirausahaan lokal dan mendukung pengembangan bisnis lokal, termasuk bagi perempuan.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana untuk mengembangkan kewirausahaan dan bisnis lokal? Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu melibatkan secara aktif perempuan dalam strategi dan rencana tersebut? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis? 	<p>• GRI 413</p>
<p>D.04.2</p> <p>Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mengembangkan peluang pengadaan lokal, termasuk bagi perempuan.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana untuk mengembangkan peluang pengadaan lokal? Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu melibatkan secara aktif perempuan dalam strategi dan rencana tersebut? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis? 	<p>• GRI 204</p>
<p>D.04.3</p> <p>Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak aktivitas mereka terhadap perempuan, generasi muda, dan anak-anak.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak aktivitas mereka terhadap perempuan? Melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak aktivitas mereka terhadap generasi muda? Melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak aktivitas mereka terhadap anak-anak? 	<p>• GRI 413 • IFC PS1.12</p>
<p>D.04.4</p> <p>Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk menyempurnakan kinerjanya dalam mengatasi dampak sosio-ekonomi aktivitasnya terhadap masyarakat yang terdampak.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam mengatasi dampak sosio-ekonomi aktivitasnya di dalam masyarakat terdampak? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dampak sosio-ekonomi aktivitasnya di dalam masyarakat terdampak? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mengatasi dampak sosio-ekonomi aktivitasnya di dalam masyarakat terdampak? 	

D.05 Pemanfaatan Lahan



Operasi pertambangan biasanya melibatkan perubahan lahan yang meluas. Pertambangan sering diusulkan dan dibangun di wilayah-wilayah dengan pemanfaatan lahan yang sudah lama mapan, seperti pertanian, berburu dan meramu sesuai tradisi untuk mendapat hewan dan tanaman, aktivitas budaya, rekreasi, konservasi, atau pemukiman manusia. Hal ini dapat menciptakan konflik, misalnya, ketika perusahaan menerima konsesi penambangan mineral sedangkan individu atau masyarakat bersangkutan tidak menyetujuinya dan tidak pula mendapatkan alternatif lahan yang sesuai ataupun peluang untuk memanfaatkan lahan secara bersama.

Di beberapa negara, masyarakat mungkin tidak memiliki bukti tertulis kepemilikan lahan yang sudah mereka manfaatkan secara kolektif selama ratusan tahun sesuai dengan hukum adat. Lahan dan sumber daya masyarakat ini terlebih-lebih rentan diambil alih oleh pemerintah, perusahaan, atau pihak tertentu tanpa tersedianya pengamanan yang memadai bagi orang-orang yang menggantungkan makanan, sumber mata pencaharian, atau kelangsungan budaya mereka pada lahan dan sumber daya tersebut.

Sebagian konflik yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan bisa dihindari atau diminimalkan jika proses kolaboratif dan inklusif antara perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat lokal ditempuh untuk mengembangkan strategi pemanfaatan lahan

regional atau perencanaan skala-lanskap. Proses semacam itu bisa mengeksplorasi opsi seperti pengembangan pemanfaatan lahan untuk aneka jenis dan urutan penggunaan untuk mengelola pemanfaatan lahan yang bersaing, mendorong pemeliharaan lingkungan, dan memaksimalkan keuntungan ekonomi dan sosial bagi generasi saat ini dan yang akan datang (Lihat juga F.01). Selain itu, perjanjian pemanfaatan lahan bersama dapat dikembangkan untuk memberikan akses bagi pembangunan tambang sambil tetap mendukung kemampuan individu dan masyarakat untuk menggunakan dan menikmati lahan mereka semaksimal mungkin, bebas dari campur tangan atau gangguan yang tidak wajar.

Perusahaan juga dapat berupaya meminimalkan jejak fisik operasi pertambangan mereka, dan melepas bagian-bagian dari area pertambangan yang sudah tidak lagi dibutuhkan. Hal ini membantu menghindari situasi ketika perusahaan menguasai area besar lahan secara tidak wajar. Sejumlah negara produsen memiliki regulasi menyangkut penyerahan kembali secara rutin lahan sewa di sepanjang siklus operasi pertambangan. Dengan jejak fisik yang minimal dan menghindari dampak buruk yang berat terhadap pemanfaatan lahan dan aksesibilitas lahan, perusahaan dapat memitigasi risiko konflik terkait lahan dan mendukung pemanfaatan lahan dan sumber mata pencaharian berbasis lahan oleh masyarakat lokal dengan lebih baik. ■

D.05.1**Tindakan**

Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan menilai dampak buruk terhadap pemanfaatan lahan dan akses lahan oleh masyarakat yang terdampak, dan merancang serta mengimplementasikan strategi dan rencana untuk meminimalkan dan mengurangi dampak buruk ini.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- a. Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan menilai dampak buruk aktivitasnya terhadap pemanfaatan lahan dan akses lahan oleh masyarakat yang terdampak?
- b. Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna meminimalkan dan mengurangi dampak buruk ini?
- c. Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis?

• ILO C169

D.06 Kesehatan Masyarakat



Aktivitas pertambangan bisa menimbulkan dampak terhadap kesehatan masyarakat dalam beragam cara. Efek samping kesehatan bisa timbul akibat terpapar oleh kebisingan terkait tambang, zat kontaminan di udara, air, atau tanah, atau akibat rusaknya jasa lingkungan. Faktor-faktor nonlingkungan seperti lalu lintas, masuknya pekerja migran, atau pengaturan keamanan tambang juga dapat memengaruhi kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Risiko kesehatan masyarakat yang khususnya berkaitan dengan operasi pertambangan akan berbeda bergantung pada lokasi tambang dan mineral yang ditambang. Misalnya, proyek pertambangan di wilayah yang terdampak konflik bisa menimbulkan tekanan tambahan pada sumber daya lokal yang langka dan memperburuk masalah kesehatan yang ada. Selain itu, mungkin juga ada kelompok-kelompok rentan yang terdiri dari perempuan, laki-laki, anak-anak, lansia, Masyarakat Adat, dan para penyandang disabilitas yang lebih rentan terhadap risiko kesehatan tertentu. Anak-anak, lantaran perkembangannya yang masih terus berjalan dan belum sempurna, perilaku tangan-masuk-mulut, waktu yang banyak dihabiskan di luar rumah, dan faktor lain, khususnya rentan terhadap pencemaran udara dan kontaminan terkait tambang yang bisa ditemukan di tanah atau air.

Perusahaan dapat bekerja sama dengan masyarakat terdampak dan para pemangku kepentingan yang lain seperti pemerintah lokal dan para profesional kesehatan publik untuk menilai dampak potensial operasi pertambangan terhadap kesehatan masyarakat, dan mengembangkan strategi serta rencana untuk mengelola dan memantau risiko dan dampak yang sudah teridentifikasi. Karena kesehatan masyarakat sering dikaitkan dengan permasalahan

lingkungan dan sosial, penilaian kesehatan masyarakat pun dapat diintegrasikan ke dalam penilaian dampak lingkungan dan sosial (Lihat F.01 dan D.04). Keterlibatan pemangku kepentingan di dalam penilaian kesehatan masyarakat sangat penting bagi efektivitas proyek, karena hal tersebut meningkatkan kualitas data kesehatan, dan membantu mengidentifikasi cara-cara yang dapat diterima dalam memantau dan mengurangi dampak kesehatan masyarakat.

Pemantauan kesehatan masyarakat mencermati dampak positif dan negatif operasi tambang terhadap kesehatan masyarakat, dan dapat memberikan peringatan dini adanya masalah kesehatan di tingkat masyarakat. Pemantauan meliputi capaian kesehatan, seperti insidensi malnutrisi, penyakit, atau gangguan kesehatan mental, maupun penentu kesehatan, seperti kadar pencemaran udara, air, dan tanah. Perusahaan tambang semakin giat bermitra dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam memantau kesehatan masyarakat dan memantau komitmen lingkungan dan sosial secara lebih umum.

Meskipun kesehatan masyarakat pada prinsipnya menjadi tanggung jawab pemerintah negara produsen, perusahaan tambang dapat, bilamana dipandang tepat, mengambil peran pendukung yang proaktif dalam mengembangkan peluang yang melengkapi kapasitas pemerintah, terutama di negara-negara berkembang yang mungkin kekurangan layanan kesehatan lokal. Investasi perusahaan tambang di dalam prakarsa kesehatan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur untuk menyediakan air bersih dan sanitasi atau kampanye kesehatan terkait penyakit dengan beban biaya tinggi, dapat menciptakan manfaat kesehatan yang sangat positif. Namun sikap hati-hati harus dilakukan untuk memastikan agar setiap prakarsa atau infrastruktur kesehatan masyarakat yang penting didukung oleh perusahaan memang

sejalan dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat, dan dapat dilanjutkan pascapenutupan tambang (Lihat C.03).

Risiko dan dampak kesehatan, baik terhadap pekerja tambang maupun orang-orang yang tinggal di dekat proyek pertambangan, merupakan salah satu masalah yang paling penting bagi masyarakat lokal, dan menuntut perhatian ekstra oleh perusahaan tambang. Pendekatan proaktif untuk meminimalkan dampak

kesehatan dan memaksimalkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan kinerja keuangan dan sosial perusahaan; menurunkan risiko munculnya tuntutan kewajiban dan litigasi oleh masyarakat; meningkatkan akses ke pendanaan internasional; mengurangi ketidakhadiran dan biaya perawatan kesehatan bagi pekerja dan masyarakat lokal; dan meningkatkan semangat kerja pekerja dan hubungan masyarakat secara umum. ■

D.06.1**Tindakan**

Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak aktivitas mereka terhadap kesehatan masyarakat, dan mengimplementasikan rencana manajemen untuk mengatasi dampak tersebut.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- a. Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu melaksanakan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak aktivitasnya terhadap kesehatan masyarakat?
- b. Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna mengatasi dampak tersebut?
- c. Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis?

• IFC PS4

D.07 Kesetaraan Gender



Industri pertambangan menciptakan lapangan kerja serta peluang dan manfaat ekonomi; namun laki-laki lebih berpeluang besar daripada perempuan untuk dipekerjakan langsung dalam operasi pertambangan. Selain itu, laki-laki lebih berpeluang besar memetik keuntungan dari program dan proyek sosial yang didukung oleh perusahaan tambang.

Perempuan, pada sisi lain, sering menanggung beban risiko sosial, ekonomi, dan lingkungan yang tidak wajar terkait dengan pertambangan. Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa pelecehan seksual, penganiayaan, dan eksploitasi seksual yang melibatkan perempuan dan anak perempuan tergolong marak di beberapa wilayah pertambangan. Terlebih lagi, di beberapa masyarakat, kaum perempuan bertanggung jawab menyediakan makanan dan air bersih untuk keluarga mereka sehingga hilangnya akses ke lahan yang subur dan air bersih akibat aktivitas pertambangan bisa menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi mereka. Namun perempuan dan anak perempuan sering kali kurang terwakili di dalam proses pelibatan pemangku kepentingan pertambangan (Lihat D.03), yang mengaburkan informasi yang diterima oleh perusahaan menyangkut kepentingan dan prioritas masyarakat. Di dalam proses pengambilan keputusan masyarakat, perempuan pun bisa jadi terpinggirkan, sehingga suara mereka tidak banyak didengar ketika mereka menyampaikan pendapat tentang pola penanganan dampak atau alokasi sumber daya dari pertambangan.

Sebuah praktik baru adalah penggunaan penilaian dampak gender untuk mengidentifikasi dampak dari proyek-proyek pertambangan terhadap perempuan dan laki-laki (dan hubungan di antara keduanya), untuk mengembangkan strategi mitigasi dampak, dan untuk mendorong pemberdayaan dan partisipasi

perempuan. Misalnya, penilaian dampak gender dapat membantu mengidentifikasi hambatan bagi partisipasi perempuan dan anak perempuan di dalam penilaian, pemantauan, dan pengambilan keputusan terkait proyek. Melalui pengembangan kapasitas seperti pelatihan dalam berunding, komunikasi, atau pengumpulan data dan pemantauan, perempuan dapat memperoleh kecakapan yang dapat ditransfer ke dalam situasi kehidupan yang lain. Penilaian dampak gender juga dapat membantu membedakan antara perbedaan dampak, kebutuhan, dan kepentingan dari sisi usia, dengan melibatkan anak perempuan dan anak laki-laki di dalam penilaian.

Perhatian lebih besar juga sedang dicurahkan pada peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan proyek-proyek pertambangan. Gerakan ini telah muncul karena luasnya pengakuan di kalangan badan-badan pembangunan dan perusahaan bahwa pemberdayaan perempuan untuk berpartisipasi dalam keputusan dan perencanaan program sosial menghasilkan mitigasi yang lebih baik terhadap dampak buruk yang mungkin muncul serta penurunan angka kemiskinan dan hasil pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan.

Pada tahun-tahun terakhir, sektor keuangan telah menyoroti masalah ketidakadilan gender di sektor pertambangan. Akibatnya, beberapa perusahaan mulai menciptakan lebih banyak peluang bagi perempuan di tingkat direksi perusahaan dan manajemen senior (Lihat B.02) dan dalam aktivitas pertambangan inti. Namun beragam tantangan terus muncul bagi pekerja tambang perempuan, seperti pelecehan seksual, kurangnya penerimaan oleh rekan kerja laki-laki, kendala fisik, kurangnya fasilitas atau alat pelindung diri yang sesuai gender, menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dengan kerja giliran, dan lain-lain.

Berbagai tantangan di atas meningkat jika gender bersilangan dengan faktor lain seperti diskriminasi akibat status sosio-ekonomi, usia, ras, asal-usul, atau orientasi seksual. Diperlukan pendekatan yang lebih sadar-gender terhadap manajemen risiko, termasuk pelibatan pekerja perempuan dalam penilaian risiko kesehatan dan keselamatan kerja serta upaya lebih besar untuk menciptakan kondisi kerja yang ramah-keluarga demi melindungi pekerja perempuan dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pertambangan.

Perusahaan tambang yang menempuh pendekatan adil-gender dalam hal ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penilaian dampak, dan keterlibatan berpotensi meraih produktivitas yang lebih baik dalam operasi tambang, hubungan yang lebih erat dengan masyarakat, dan potensi konflik yang lebih rendah, sedangkan perempuan dan masyarakatnya akan merasakan peluang ekonomi dan manfaat pembangunan yang lebih besar. Jika digabung, faktor-faktor di atas dapat menghasilkan keuntungan keuangan dan reputasi bagi perusahaan. ■

D.07.1**Efektivitas**

Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengatasi dampak aktivitasnya terhadap perempuan.

Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:

- a. Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam mengatasi dampak aktivitasnya terhadap perempuan?
- b. Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dampak aktivitasnya terhadap perempuan?
- c. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mengatasi dampak aktivitasnya terhadap perempuan?

D.08 Masyarakat Adat



Tidak ada satu definisi resmi tentang Masyarakat Adat, meskipun identifikasi diri merupakan salah satu kriteria utama untuk mengidentifikasi Masyarakat Adat. Lazim dipahami juga bahwa budaya dan sumber mata pencaharian dari banyak Masyarakat Adat erat berkaitan dengan wilayah nenek moyang dan sumber daya alam di sekelilingnya. Akibatnya, industri ekstraktif seperti pertambangan, yang sering mengubah dan merusak tanah dan sumber daya alam secara besar-besaran, menimbulkan potensi dampak buruk yang tinggi, dan mungkin memrakorandakan kehidupan, sumber mata pencaharian, dan budaya Masyarakat Adat. Masyarakat Adat semakin sering menjadi objek serangan dan tindak kekerasan, kriminalisasi, dan ancaman di dalam konteks proyek skala besar, termasuk proyek industri ekstraktif.

Kini sudah menjadi norma yang diakui secara global bahwa perusahaan harus menghormati hak-hak asasi manusia yang terdampak oleh aktivitasnya (Lihat D.01). Masyarakat Adat memiliki hak individual dan kolektif yang bisa terdampak oleh pengembangan proyek pertambangan skala besar, termasuk hak untuk berpartisipasi, menentukan nasib sendiri, dan mengejar prioritas mereka sendiri untuk mengembangkan sumber daya alam, hingga hak yang berkaitan dengan harta benda, budaya, agama, dan kesehatan.

Banyak perusahaan tambang menyadari perlunya menghormati hak dan kepentingan Masyarakat Adat, termasuk hak mereka akan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Lihat D.09). Sudah lazim disepakati bahwa hubungan antara perusahaan dengan Masyarakat Adat seyogianya didasarkan pada penghormatan, keterlibatan penuh makna, dan keuntungan timbal-balik. Perusahaan tambang terkemuka tentu akan menyusun pedoman dan kebijakannya sendiri untuk mengelola aktivitas dan

keterlibatan dengan Masyarakat Adat, yang disesuaikan dengan konteks khusus kelompok adat yang berpotensi terdampak oleh operasi dan aktivitas mereka.

Perusahaan yang mencoba beroperasi di dalam atau di dekat kawasan adat bisa mulai membangun kepercayaan dengan Masyarakat Adat dengan merintis pelibatan awal dan inklusif (Lihat D.03) dengan semua kelompok yang berpotensi terdampak, seperti suku, bangsa, dan kelompok Masyarakat Adat. Setiap kelompok Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak oleh proyek pertambangan atau fasilitas kaitannya, seperti bendungan limbah tambang, jalan, atau smelter, seyogianya ikut serta dalam mengidentifikasi dan menilai dampak potensial aktivitas terkait tambang terhadap hak dan kepentingan mereka. Untuk memastikan integritas dan keandalan keterlibatan jangka panjang, perusahaan dianjurkan untuk mengambil langkah-langkah matang untuk memperbaiki ketimpangan kekuasaan yang besar dan mengatasi hambatan bagi partisipasi yang bermakna. Pelibatan Masyarakat Adat yang tepat juga akan didasarkan pada akses penuh ke informasi tentang potensi dampak lingkungan dan sosial, viabilitas teknis dan keuangan dari proyek yang diusulkan, serta manfaat keuangan potensial.

Jika proyek berlanjut, pertambangan yang bertanggung jawab menuntut perusahaan agar bekerja sama dengan Masyarakat Adat untuk mengembangkan strategi mitigasi yang dapat diterima, dan melibatkan mereka dalam pemantauan proyek jangka panjang. Perusahaan juga dapat menunjukkan penghormatan pada Masyarakat Adat dengan berupaya memahami dan melindungi nilai-nilai warisan budaya yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kepercayaan, bahasa, adat-istiadat, praktik, dan identitas mereka, serta memastikan semua karyawan perusahaan memahami

tanggung jawab mereka untuk menghormati hak dan warisan budaya Masyarakat Adat.

Masyarakat Adat di seluruh dunia terus menentang proyek-proyek industri ekstraktif karena alasan-alasan sosial, budaya, dan lingkungan yang bisa dimaklumi. Perusahaan yang memiliki

rekam jejak bekerja sama dengan Masyarakat Adat dengan sikap menghormati, mengakui legitimasi keprihatinan mereka, lebih kecil kemungkinannya menghadapi konflik, penangguhan, dan kendala dalam berunding dan menuntaskan perjanjian. Hal ini meliputi penerimaan keinginan Masyarakat Adat meskipun tidak ditemukan perjanjian. ■

<p>D.08.1 Tindakan</p>	<p>Jika memungkinkan, perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu merancang dan mengimplementasikan, melalui partisipasi yang inklusif, strategi dan rencana untuk menghormati hak, kepentingan, dan kebutuhan Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak oleh operasi pertambangan.</p> <p><i>Jika memungkinkan, di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi, melalui partisipasi yang inklusif, semua Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak oleh pertambangan saat ini dan yang direncanakan berikut fasilitas kaitannya? Mengidentifikasi, melalui partisipasi yang inklusif, hak, kepentingan, dan kebutuhan Masyarakat Adat ini? Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi dan rencana, melalui partisipasi yang inklusif, untuk menghormati hak, kepentingan, dan kebutuhan Masyarakat Adat ini? 	<ul style="list-style-type: none"> • ILO C169 • IFC PS1.35; PS7
<p>D.08.2 Efektivitas</p>	<p>Jika memungkinkan, perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam menghormati hak dan aspirasi Masyarakat Adat serta menghindari dampak buruk terhadap aktivitas mereka.</p> <p><i>Jika memungkinkan, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam menghormati hak dan aspirasi, dan menghindari dampak buruk aktivitasnya terhadap, Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak oleh pertambangan saat ini dan yang direncanakan berikut fasilitas kaitannya? Mengaudit dan/atau meninjau, berdasarkan patokan dan/atau target, efektivitas langkah-langkah yang diambilnya dalam menghormati semua hak dan aspirasi, dan menghindari dampak buruk aktivitasnya terhadap, Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak oleh pertambangan saat ini dan yang direncanakan berikut fasilitas kaitannya? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan penyempurnaan kinerjanya dalam menghormati hak dan aspirasi, dan menghindari dampak buruk aktivitasnya terhadap, Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak oleh pertambangan saat ini dan yang direncanakan berikut fasilitas kaitannya? 	<ul style="list-style-type: none"> • IFC PS7.9

D.09

Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan



Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC) adalah prinsip pemberian informasi dan konsultasi sebelum proyek atau pengembangan utama yang bisa menimbulkan dampak terhadap hak dan kepentingan rakyat, serta pemberian peluang persetujuan atau penolakan kolektif terhadap pengembangan tersebut dengan cara-cara yang bebas intimidasi atau paksaan dan mendahului aktivitas yang bersangkutan. FPIC merupakan hak Masyarakat Adat yang diakui secara internasional dan merupakan mekanisme untuk menjamin penghormatan atas hak dan kepentingan mereka.

Pertambangan yang merambah ke wilayah Masyarakat Adat bisa menimbulkan konflik sosial dan memicu dampak yang besar dan sering tidak bisa dipulihkan terhadap nilai budaya, hak, sumber daya, dan sumber mata pencaharian mereka. FPIC menyediakan sarana penting untuk menyeimbangkan hubungan kekuasaan antara Masyarakat Adat dengan aktor dari luar (misalnya, pemerintah atau perusahaan), dan memungkinkan Masyarakat Adat untuk menentukan prioritas pembangunan mereka serta merundingkan keuntungan dan pengamanan di tingkat masyarakat secara lebih efektif. Kini dipahami bahwa ketika usulan eksplorasi atau proyek tambang mungkin berdampak terhadap Masyarakat Adat atau wilayah mereka, perusahaan yang mengajukan proyek membutuhkan persetujuan Masyarakat Adat yang bersangkutan, meskipun tidak diwajibkan demikian oleh undang-undang negara produsen (Lihat C.02).

FPIC dari Masyarakat Adat telah menjadi prasyarat bagi perusahaan untuk mendapatkan pendanaan melalui International Finance Corporation dan lembaga keuangan internasional lainnya. Adanya FPIC juga merupakan persyaratan bagi perusahaan yang ikut serta dalam berbagai program sertifikasi suka rela yang

didirikan untuk sektor industri ekstraktif seperti perhutanan, minyak sawit, dan pertambangan.

Meskipun FPIC pada mulanya didirikan sebagai hak yang hanya berlaku bagi Masyarakat Adat, prinsip-prinsip FPIC mulai diterapkan secara lebih luas. Sejak 2009, badan regional dan internasional telah mulai menerapkan prinsip-prinsip umum FPIC pada masyarakat dan konstituen yang bukan tergolong masyarakat adat. Berbagai organisasi masyarakat sipil dan asosiasi industri telah menyatakan dukungan pada penerapan FPIC yang lebih luas. Misalnya, pada 2013 para anggota International Council on Mining and Metals menyatakan pernyataan sikap yang berbunyi, “Jika Masyarakat Adat dan non-adat sama-sama berpeluang terkena dampak secara signifikan, para anggota bisa memilih untuk memperluas komitmen yang tertuang dalam pernyataan sikap ini [termasuk FPIC] ke warga yang bukan masyarakat adat.” Selain itu, pada 2016 Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan PBB (CEDAW) menganjurkan agar pemerintah mendapatkan FPIC dari perempuan pedesaan sebelum persetujuan proyek yang memengaruhi tanah dan sumber daya pedesaan.

Pengambilan sikap proaktif terhadap FPIC memberi sinyal kepada pemerintah negara produsen, masyarakat sipil, dan komunitas investasi bahwa perusahaan menghormati hak dan kepentingan Masyarakat Adat dan masyarakat yang terdampak serta berkomitmen kuat untuk membangun hubungan yang positif dengan mereka. Dengan memasukkan FPIC dalam kebijakan perusahaan dan mengimplementasikan FPIC secara sistematis di sepanjang siklus hidup operasi, perusahaan tambang bisa mengurangi risiko konflik, hukum, dan reputasi; membangun hubungan yang positif dengan masyarakat dan izin sosial untuk beroperasi. ■

D.09.1

Komitmen

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak Masyarakat Adat akan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC), dan untuk mendukung perluasan prinsip FPIC ke kelompok-kelompok lain yang terdampak-proyek.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- a. Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk menghormati hak Masyarakat Adat akan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC), dan untuk mendukung perluasan prinsip FPIC ke kelompok-kelompok lain yang terdampak-proyek?
- b. Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini?
- c. Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini?

• IFC PS1.32; PS7

D.10 Pemindahan dan Pemukiman Kembali



Baik akuisisi lahan oleh perusahaan tambang maupun kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pertambangan sama-sama mengakibatkan relokasi fisik (pemindahan) warga, atau pemindahan ekonomi sebagai akibat hilangnya akses ke sumber mata pencaharian, atau lahan atau sumber daya alam yang menghasilkan pendapatan. Jika dilakukan secara buruk, pemindahan fisik dan ekonomi bisa melanggar hak-hak asasi manusia dan mengancam kesehatan serta kesejahteraan sosial, budaya, ekonomi, fisik dan psikologis individu dan masyarakat.

Meskipun pemindahan warga bisa menimbulkan efek yang melumpuhkan, pemindahan dan pemukiman kembali yang dipicu pertambangan (MIDR) sering memunculkan tantangan yang bahkan lebih berat lagi. Proyek-proyek pertambangan sering berada di wilayah-wilayah terpencil dengan pemerintah yang lemah atau tidak stabil, rakyat kekurangan kekuatan politik, penguasaan tanah tidak pasti, dan lahan atau peluang sumber mata pencaharian alternatif terbatas. Penelitian tentang MIDR menunjukkan secara konsisten tingkat kemiskinan yang tinggi di kalangan orang-orang yang dipindah pemukimannya. Baik masyarakat yang menerima warga pindahan maupun masyarakat yang dimukimkan kembali menghadapi risiko konflik, pelanggaran HAM, kemiskinan, dan ketidakstabilan sosial yang tinggi.

Di beberapa negara, pertambangan skala besar yang diusulkan berpotongan dengan wilayah-wilayah yang secara turun-temurun digunakan untuk pertambangan rakyat atau skala kecil (ASM). MIDR secara khusus bisa menimbulkan dampak yang sangat parah terhadap masyarakat ASM: ada kemungkinan kesulitan merelokasi penambang ASM karena peluang untuk menekuni sumber mata pencaharian tradisional mereka tidak mudah ditemukan; dan karena banyak penambang ASM secara formal tidak memiliki hak

atas tanah dan mineral yang diakui sehingga kemungkinan tidak dapat menerima ganti rugi melalui proses pemukiman kembali atas hilangnya sumber mata pencaharian.

Dengan mempertimbangkan potensi kemiskinan dan konflik yang tinggi, pemindahan dan pemukiman kembali yang dipicu pertambangan sebaiknya hanya dilakukan dalam kondisi di luar kewajaran, dan dengan pengamanan yang cukup untuk memastikan pemeliharaan atau perbaikan standar hidup dan sumber mata pencaharian warga yang terdampak. Namun, meskipun menghindari pemukiman kembali sering dipandang sebagai prioritas utama bagi perusahaan dan lembaga pemberi pinjaman, patut juga disadari bahwa penghindaran tersebut tidak selalu memberikan hasil yang paling positif bagi masyarakat jika mengingat, misalnya, risiko kesehatan dan keselamatan yang besar yang sering ditanggung oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan di sekitar operasi pertambangan.

Beberapa pengamanan penting yang berkaitan dengan pemukiman kembali meliputi: memprioritaskan penyediaan lahan daripada ganti rugi tunai; mendasarkan semua ganti rugi pada biaya pemindahan secara penuh; menyediakan pilihan opsi bagi pemukiman yang memadai dengan jaminan penguasaan/kepemilikan, terlepas dari ada-tidaknya hak hukum lahan dan aset yang berlaku sebelumnya; memulihkan atau meningkatkan sumber mata pencaharian; dan memungkinkan warga yang dipindahkan untuk ikut menikmati keuntungan proyek tambang.

Yang penting diingat, pertambangan yang bertanggung jawab mensyaratkan agar orang-orang yang kemungkinan terkena dampak sampingan dari pemukiman kembali diizinkan ikut serta dalam semua proses dan pengambilan keputusan yang berkaitan

dengan pemukiman kembali, meliputi: evaluasi alternatif proyek; penilaian dampak; perencanaan langkah-langkah mitigasi; implementasi program pemukiman kembali; dan pemantauan serta evaluasi pemukiman kembali. Agar dapat memastikan partisipasi yang efektif, keterlibatan sebaiknya menyertakan perempuan, generasi muda, kelompok-kelompok rentan termasuk penambang tradisional jika relevan, dan masyarakat yang menerima warga pindahan; dan masyarakat terdampak harus dilengkapi dengan bantuan hukum dan teknis secara gratis. Selain itu, penghormatan atas hak asasi manusia membutuhkan penerapan mekanisme keluhan untuk membantu orang-orang yang terdampak mengadakan keprihatinan dan mencari penyelesaian yang tepat.

Perusahaan tambang dianjurkan untuk mencurahkan waktu dan sumber daya untuk merencanakan program pemukiman kembali secara memadai; dan untuk melakukan pemantauan serta evaluasi eksternal terhadap hasil-hasil pemukiman kembali dengan partisipasi masyarakat yang terdampak untuk memastikan pembuktian komitmen mereka dalam meningkatkan sumber mata pencaharian dan standar hidup. Kegagalan memberikan hasil yang positif bagi masyarakat yang tergusur dan dimukimkan kembali akan menciptakan risiko tinggi bagi perusahaan, meliputi konflik yang meningkat, cacatnya reputasi, biaya operasional lebih tinggi, dan berkurangnya akses ke lahan. ■

<p>D.10.1</p> <p>Tindakan</p>	<p>Jika memungkinkan, perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan menilai dampak potensial pemindahan fisik dan/atau ekonomi secara paksa terhadap orang-orang yang terdampak proyek, dan merancang serta mengimplementasikan strategi dan rencana untuk menghindari, meminimalkan, dan mengurangi dampak yang teridentifikasi.</p> <p><i>Jika memungkinkan, di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menilai dampak potensial pemindahan fisik dan/atau ekonomi secara paksa terhadap orang-orang yang terdampak proyek? Mengembangkan strategi dan rencana untuk menghindari, meminimalkan, dan mengurangi dampak negatif? Melibatkan orang-orang yang terdampak proyek ke dalam penilaian dampak dan dalam pengembangan strategi untuk mengatasi dampak tersebut? 	<ul style="list-style-type: none"> • ILO C169 • IFC PS5.2
<p>D.10.2</p> <p>Efektivitas</p>	<p>Jika memungkinkan, perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam memastikan perbaikan atau pemulihan sumber mata pencaharian warga menyusul pemukiman kembali secara paksa.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam memastikan perbaikan atau pemulihan sumber mata pencaharian warga menyusul pemukiman kembali secara paksa? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi pemukiman kembali secara paksa dengan cara yang menjamin perbaikan atau pemulihan sumber mata pencaharian warga? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mengatasi pemukiman kembali secara paksa dengan cara yang menjamin perbaikan atau pemulihan sumber mata pencaharian warga? 	<ul style="list-style-type: none"> • ILO C169 • IFC PS5.9; PS5.28

D.11 Pertambangan Rakyat dan Skala Kecil



Pertambangan rakyat dan skala kecil (ASM) sudah ada secara historis di banyak negara, dan menjadi sumber mata pencaharian tetap atau musiman secara turun-temurun bagi banyak sekali orang. ASM bersifat padat karya; cenderung mengeksploitasi deposit permukaan yang mungkin tidak berumur panjang bagi pertambangan skala besar (LSM); sering dikaitkan dengan investasi dan tingkat mekanisasi yang rendah; dan standar kesehatan serta keselamatan yang rendah, dan bisa menimbulkan dampak signifikan bagi lingkungan.

Aktivitas ASM kadang-kadang dipandang secara negatif oleh pemerintah, masyarakat sipil, dan pihak lain akibat permasalahan seperti pekerja anak-anak dan pekerja paksa (Lihat E.02), potensi pendapatan ASM untuk membiayai aktivitas yang ilegal atau konflik, pencemaran lingkungan, atau kekacauan sosial. Dalam situasi tertentu, muncul konflik antara ASM dengan perusahaan LSM; dalam situasi lain, ketegangan bisa muncul antara penambang ASM dengan masyarakat lokal, terutama jika ASM terbilang baru di wilayah tersebut atau ada sumber daya masyarakat yang terancam oleh operasi ASM.

Namun pertambangan rakyat dan skala kecil merupakan aktivitas yang mengurangi kemiskinan, dan bisa sangat penting bagi masyarakat dan perekonomian lokal ketika tidak banyak dijumpai alternatif sumber mata pencaharian lain yang layak.

Diperkirakan ada 40 juta orang terlibat langsung dalam ASM di seluruh dunia, termasuk anak-anak dan kaum perempuan. Diperkirakan sekitar 150 juta orang bergantung pada ASM secara tidak langsung. Meskipun faktanya pertambangan rakyat itu berisiko dan bersifat padat karya, jumlah komoditas yang ditambang dan jumlah pekerja ASM terus tumbuh pesat.

Risiko konflik dan interaksi dengan kekerasan antara ASM dengan operasi pertambangan skala besar bisa menimbulkan beberapa dampak. ASM bisa menimbulkan risiko reputasi dan investasi serta melemahkan izin sosial perusahaan LSM untuk beroperasi dengan memunculkan permasalahan lingkungan dan kesehatan publik, benturan dengan satuan keamanan pertambangan, berikutan sengketa hak atas tanah dan kepemilikan sumber daya alam. Risiko ini, pada gilirannya, bisa mengancam viabilitas proyek perusahaan LSM saat ini dan yang akan datang. Konsekuensinya, perusahaan LSM dan lainnya tengah berupaya menemukan cara-cara untuk meningkatkan dan mengelola hubungan antara ASM dengan LSM secara saling menguntungkan, dan meningkatkan potensi sektor ASM agar menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi lokal.

Keragaman sektor ASM menjadi kendala bagi solusi tunggal yang cocok untuk semua. Namun ada beberapa upaya menjanjikan yang bisa diterapkan secara strategis oleh perusahaan LSM, yang bergantung pada konteks pertambangan tertentu. Misalnya, keterlibatan penambang ASM dan masyarakat sepanjang tahap-tahap awal pengembangan pertambangan dan di sepanjang siklus hidup proyek dapat membantu meredakan ketegangan di antara kedua sektor. Dalam beberapa kasus, kiranya bermanfaat jika menggunakan fasilitator atau menyepakati aturan main bersama untuk menumbuhkan rasa saling percaya dan partisipasi efektif oleh semua pihak.

Dalam kondisi tertentu, perusahaan pertambangan skala besar mungkin juga tepat untuk: melibatkan pemerintah untuk membantu memajukan kebijakan yang akan menguntungkan sektor ASM dan mendukung hubungan ASM-LSM; berupaya menciptakan kerangka hukum dan regulasi ASM yang kuat; membantu pengesahan ASM; memberikan sebagian sewa pertambangan LSM kepada ASM; ▶

membeli bijih tambang dari penambang ASM; memberikan bantuan teknis kepada penambang ASM; mempekerjakan penambang ASM sebagai subkontraktor; mendorong diversifikasi sumber mata pencaharian; atau mendukung akses bagi penambang ASM dan masyarakat ke layanan dasar. Dasar keterlibatan atau aktivitas pendukungnya harus melibatkan identifikasi dan pemetaan secara inklusif atas individu dan kelompok ASM di sekitar lokasi tambang.

ASM berpotensi memberikan sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi produsen tambang skala kecil. Dengan berfokus

pada pembangunan hubungan dan pemberian keuntungan riil melalui prakarsa yang bertarget, perusahaan pertambangan skala besar bisa mengurangi konflik dengan ASM, dan meningkatkan sumber mata pencaharian pekerja ASM dan masyarakat lokal. Semua aktivitas di atas akan memberikan keuntungan reputasi bagi perusahaan, membantu mengurangi risiko, dan berkontribusi bagi tujuan pengentasan kemiskinan (SDG1) dengan menciptakan perekonomian lokal yang lebih kuat dan iklim investasi yang lebih stabil dan menarik di negara-negara produsen. ■

<p>D.11.1 Tindakan</p>	<p>Jika memungkinkan, perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu memfasilitasi keterlibatan masyarakat dan aktivitas pertambangan rakyat dan skala kecil (ASM) di dalam dan di seputar operasi mereka.</p> <p><i>Jika memungkinkan, di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan yang menjalankan aktivitas ASM di seputar operasinya? Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana melibatkan pemangku kepentingan yang teridentifikasi, termasuk melalui pembuatan perjanjian keterlibatan bilamana perlu? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis? 	
<p>D.11.2 Tindakan</p>	<p>Jika memungkinkan, perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan peluang untuk mendukung program bantuan teknis dan/atau program sumber mata pencaharian alternatif bagi penambang ASM di sekitar operasi tambang mereka.</p> <p><i>Jika memungkinkan, di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menilai kebutuhan, dan kelayakan, pemberian dukungan teknis dan/atau sumber mata pencaharian bagi penambang ASM? Mengembangkan strategi dan rencana berdasarkan penilaian tersebut? Melibatkan penambang ASM ke dalam penilaian kebutuhan di atas dan dalam pengembangan strategi dan rencana apa pun? 	

D.12 Keluhan dan Penyelesaian



Pertambahan skala besar berpotensi memengaruhi secara signifikan kehidupan, harta benda, sumber daya lingkungan, dan hak anggota masyarakat di sekitar dan para pemangku kepentingan lain. Oleh karena itu, pertanyaan, keprihatinan, dan keluhan sudah pasti akan dipicu oleh dampak baik itu nyata maupun sekadar persepsi dari operasi pertambangan.

Mekanisme keluhan tingkat operasional (atau tingkat-proyek) merupakan proses formal yang memungkinkan individu atau kelompok untuk mengadukan keprihatinan dan mencari penyelesaian atas dampak negatif dari aktivitas sebuah perusahaan tambang. Idealnya, mekanisme ini memberikan proses untuk menerima, mengevaluasi, dan menangani keprihatinan kecil dan permasalahan yang lebih besar, termasuk pelanggaran HAM. Namun ketika muncul tuduhan pelanggaran HAM yang serius atau marak, mekanisme keluhan tingkat operasional mungkin bukan merupakan sarana yang tepat untuk memberikan penyelesaian karena hal tersebut mungkin membutuhkan keterlibatan badan-badan negara. Lebih dari itu, pemanfaatan mekanisme keluhan tingkat operasional sebaiknya tidak menghalangi orang yang mengadukan keluhan untuk mengakses mekanisme keluhan yudisial atau nonyudisial.

Mekanisme keluhan tingkat operasional bisa menjadi sarana penyelesaian yang efektif bagi keluhan jika mekanisme tersebut memenuhi kriteria efektivitas yang dijelaskan dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Kriteria tersebut meliputi legitimasi, dapat diakses, dapat diprediksi, adil, transparan, cocok dengan hak, sumber pembelajaran terus-menerus, dan didasarkan pada keterlibatan dan dialog dengan para pemangku kepentingan. Selain itu, mekanisme keluhan seyogianya dirancang untuk menjamin penyelesaian keluhan tepat waktu. Jika

terjadi insiden yang menimbulkan trauma seperti penganiayaan seksual, mekanisme dan proses penyelesaian sebaiknya dirancang untuk menghindari risiko trauma ulang atas korban yang mengadu.

Penyelesaian yang ditawarkan melalui mekanisme keluhan sebaiknya meredakan atau memberikan kelegaan dari dampak buruk apa pun yang telah terjadi. Namun penyelesaian yang tepat bisa berbeda-beda bergantung pada kondisinya. Misalnya, penyelesaian bisa dalam bentuk permohonan maaf, ganti rugi, rehabilitasi, ganti rugi keuangan atau nonkeuangan, atau langkah-langkah untuk mencegah terulangnya tindakan yang membawa dampak buruk tersebut.

Mekanisme keluhan tingkat operasional tidak akan memenuhi tujuannya yang semestinya jika tidak dimanfaatkan. Dengan melibatkan beragam kelompok pemangku kepentingan yang terdampak ke dalam perancangan, aksesibilitas, dan pelaksanaan mekanisme keluhan, perusahaan tambang dapat membantu memastikan dirinya mampu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan dan tepat secara budaya, sehingga meningkatkan peluang bahwa pemangku kepentingan akan percaya dan memanfaatkan proses mekanisme keluhan, dan bahwa penyelesaiannya efektif dan tepat.

Orang-orang yang mengadu ingin diyakinkan bahwa mereka akan ditangani secara serius, dan diperlakukan dengan adil. Perusahaan tambang dapat menumbuhkan kepercayaan pada proses mekanisme keluhan dengan melibatkan pemangku kepentingan ke dalam pemantauan dan verifikasi kepatuhan pada komitmen yang dilakukan melalui mekanisme keluhan, dan dengan menciptakan banyak peluang bagi pemangku kepentingan untuk memberikan umpan balik terhadap efektivitasnya. Laporan publik

tentang keluhan, seperti jenis permasalahan yang diadukan, jumlah keluhan, dan proporsi masalah yang terselesaikan yang memuaskan pengadu, dapat membantu menunjukkan bahwa perusahaan menyikapi keprihatinan masyarakat lokal secara serius.

Muncul ekspektasi global yang semakin besar bahwa perusahaan akan menerapkan mekanisme keluhan di tingkat operasional. Jika terbukti efektif, mekanisme tersebut memungkinkan perusahaan

untuk mengidentifikasi keprihatinan kecil sebelum memanas menjadi konflik yang tak terkendali; membantu menghindarkan protes atau penentangan terhadap proyek pertambangan dan pertikaian hukum yang mahal; dan meningkatkan akses ke pembiayaan proyek. Informasi yang dihasilkan melalui mekanisme keluhan di tingkat operasional juga dapat memfasilitasi pembelajaran yang dapat mendukung manajemen hubungan dengan masyarakat yang lebih baik dalam jangka panjang. ■

D.12.1

Efektivitas

Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme keluhannya bagi masyarakat.

Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:

- a. Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kelancaran dan aplikasi mekanisme keluhannya bagi masyarakat, termasuk jumlah dan sifat keluhan dan tindakan yang diambil sebagai responsnya?
- b. Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas mekanisme keluhan bagi masyarakat?
- c. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas mekanisme keluhan bagi masyarakat?

- UNGP C.6.3, C.6.5
- Prinsip UNGC 1
- VPs B.8
- GRI 413
- IFC PS1.35



E Kondisi Kerja



Operasi tambang skala besar dapat menyediakan lapangan kerja bagi ratusan pekerja (karyawan dan pekerja kontrak). Namun, “pekerjaan yang layak,” seperti ditetapkan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO), tidak sekadar mencakup pekerjaan yang mapan. Pekerjaan yang layak meliputi pekerjaan yang memberikan pendapatan yang adil (Lihat 05); keamanan, kesehatan, dan keselamatan di tempat kerja (Lihat E.01); perlindungan sosial untuk keluarga; kebebasan bagi pekerja untuk menyatakan keprihatinan, mengorganisir diri, dan ikut serta dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka (Lihat E.04 dan E.07); dan kesamaan perlakuan serta peluang untuk memajukan semua pekerja (Lihat E.03).

Kebanyakan konsep di atas dikukuhkan sebagai hak asasi manusia yang diakui secara internasional di dalam delapan konvensi utama Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang

melindungi hak-hak dasar pekerja. Namun secara global, kondisi kerja yang membahayakan tetap ada, pekerja anak atau pekerja paksa dapat ditemukan di pertambangan dan di dalam rantai pasok pertambangan (Lihat E.02), dan diskriminasi serta ketidaksetaraan gender tetap menjadi tantangan pada banyak operasi pertambangan.

Beberapa perusahaan tambang mengakui bahwa penghormatan hak-hak pekerja dan penciptaan pekerjaan yang layak itu bagus bagi bisnis dan masyarakat. Produktivitas pertambangan akan meningkat ketika pekerjanya sehat secara fisik dan merasa dihargai serta mendapat dukungan. Selain itu, melalui penciptaan lapangan kerja yang aman dan terjamin serta peluang pelatihan, perusahaan tambang dapat membantu mengurangi angka kemiskinan dan memberikan peluang yang adil bagi pembangunan ekonomi dan sosial. ■

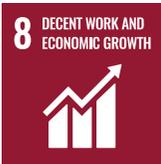
E.01 Kesehatan dan Keselamatan Kerja



Pertambangan merupakan pekerjaan yang memang berbahaya secara inheren. Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), hampir 8% kecelakaan fatal di tempat kerja di seluruh dunia berkaitan dengan pertambangan, meskipun sektor pertambangan hanya menyumbang 1% dari angkatan kerja global. Cedera di tempat kerja, hilangnya pendengaran akibat kebisingan, dampak terhadap kesehatan mental, dan sakit serta penyakit akibat zat-zat kimia, panas, radiasi, logam, dan partikulat juga tergolong signifikan di sektor pertambangan.



Seiring perubahan teknologi, beberapa operasi pertambangan menjadi semakin kurang bergantung pada tenaga kerja fisik dan beralih ke penggunaan peralatan dan mesin berteknologi tinggi yang dapat dioperasikan dari ruang kontrol jarak jauh. Meskipun kondisi kerja semacam itu bisa mengurangi potensi kecelakaan fatal dan memberikan kualitas udara, alat pelindung diri, serta pengamanan teknis yang lebih baik, lingkungan kerja tersebut membawa permasalahannya sendiri, seperti kecelakaan yang terus berulang dan tekanan psikologis.



Perusahaan tambang dapat mengatasi potensi risiko kesehatan dan keselamatan melalui sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja terpadu (K3) yang meliputi penilaian risiko K3 yang berkelanjutan; pengembangan dan pemutakhiran rencana manajemen risiko K3; pelatihan kesehatan dan keselamatan; pemantauan tempat kerja dan pengawasan kesehatan pekerja; inspeksi rutin; pelaporan; penyelidikan kecelakaan; penyediaan peralatan pelindung yang tepat dan efektif secara gratis kepada

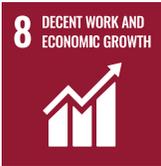
pekerja; dan partisipasi pekerja di dalam manajemen dan pengambilan keputusan kesehatan dan keselamatan.

Pertambangan yang bertanggung jawab mengharuskan perusahaan menempuh pendekatan yang adil-gender terhadap semua aspek operasi mereka, termasuk kesehatan dan keselamatan. Pendekatan manajemen risiko yang lebih holistik, termasuk pelibatan pekerja perempuan ke dalam penilaian dan pengambilan keputusan risiko kesehatan dan keselamatan kerja, bisa menghasilkan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja perempuan. Selama penilaian risiko dan penyusunan serta implementasi langkah-langkah K3, perhatian khusus perlu diberikan kepada risiko dan kebutuhan kesehatan dan keselamatan bagi pekerja perempuan, termasuk penyediaan fasilitas dan peralatan sanitasi yang tepat-gender, dan langkah-langkah untuk mencegah kekerasan seksual, intimidasi, dan pelecehan di pertambangan.

Budaya kesehatan dan keselamatan kerja perusahaan yang kuat mengakui bahwa pekerja harus sehat secara fisik dan mental agar lingkungan kerja yang aman dan produktif bisa berkembang. Ketika budaya semacam itu sudah terbentuk, proyek-proyek pertambangan akan meraih produktivitas pekerja yang lebih tinggi, dan perusahaan lebih mampu menarik dan mempertahankan karyawan dan investor. Selain itu, dengan mengurangi korban jiwa, kecelakaan, dan cedera, perusahaan akan merasakan manfaat reputasi, dan mengurangi biaya yang berkaitan dengan penyelidikan kecelakaan, pembayaran ganti rugi pekerja, premi asuransi yang lebih tinggi dan litigasi. ■

<p>E.01.1</p> <p>Komitmen</p>	<p>Perusahaan berkomitmen untuk menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat? Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini? Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini? 	<ul style="list-style-type: none"> • Prinsip 1 UNGC • ILO C169; C178 • GRI 403 • IFC PS2.23
<p>E.01.2</p> <p>Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk menjamin agar operasinya mampu melibatkan perwakilan pekerja untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengatasi risiko kesehatan dan keselamatan bagi tenaga kerjanya secara kolaboratif.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu melibatkan perwakilan pekerja untuk secara kolaboratif:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi dan menilai risiko kesehatan dan keselamatan bagi tenaga kerja? Mengembangkan strategi dan rencana untuk menghindari, meminimalkan, dan mengurangi risiko tersebut? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut? 	<ul style="list-style-type: none"> • GRI Disclosure 403-4
<p>E.01.3</p> <p>Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu melindungi pekerja perempuan dari pelecehan dan kekerasan.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengambil langkah-langkah khusus untuk mencegah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Intimidasi dan pelecehan moral terhadap pekerja perempuan? Pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan? Kekerasan terkait gender terhadap pekerja perempuan? 	<ul style="list-style-type: none"> • ILO C169 • IFC PS2.15
<p>E.01.4</p> <p>Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan keselamatan para pekerja perempuan.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya memberikan hal-hal berikut yang sesuai gender:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas sanitasi (misalnya: toilet, mandi)? Peralatan keselamatan (misalnya: APD yang dirancang untuk perempuan)? Layanan kesehatan (misalnya: untuk KB dan kesehatan seksual)? 	<ul style="list-style-type: none"> • IFC PS2.23
<p>E.01.5</p> <p>Tindakan</p>	<p>Perusahaan mengungkapkan data secara publik tentang insiden berpotensi tinggi terkait pertambangan, cedera parah, dan korban jiwa di kalangan angkatan kerjanya.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri secara publik:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengungkapkan jumlah insiden berpotensi tinggi terkait-pertambangan, cedera parah, dan korban jiwa di kalangan angkatan kerjanya, lintas kurun waktu yang berurutan? Mengungkapkan informasi tersebut dengan terpilah berdasarkan lokasi tambang? Memastikan laporan korban sudah meliputi korban jiwa pekerja kontrak dan karyawan? 	<ul style="list-style-type: none"> • ILO C176 • Pengungkapan 403-9; 403-10 GRI • IFC PS2.23 • SASB NR0302-18

E.02 Penghapusan Kerja Paksa dan Pekerja Anak



Kerja paksa atau wajib kerja adalah setiap pekerjaan atau layanan yang dilakukan di luar kehendak seseorang di bawah ancaman hukuman, dan meliputi jeratan utang, perdagangan manusia, dan bentuk-bentuk lain perbudakan modern. Diperkirakan lebih dari 20 juta orang di seluruh dunia terjebak dalam pekerjaan yang tidak bisa mereka tinggalkan, sehingga mengurung mereka di dalam hidup penuh kemiskinan atau penghambaan.

Pekerja anak adalah pekerjaan yang merampas masa kanak-kanak dari anak-anak di bawah usia 18 tahun, berikut potensi dan martabat mereka, dan membahayakan perkembangan fisik dan mental mereka. Banyak pekerja anak tidak menerima pendidikan yang memadai, dan menderita gangguan fisik atau psikologis sepanjang hayat. Meskipun ada capaian terbaru dalam mengurangi pekerja anak, diperkirakan masih ada 168 juta pekerja anak di dunia saat ini.

Kerja paksa dan pekerja anak sama-sama merupakan pelanggaran HAM. Meskipun ada beberapa kasus kerja paksa yang diduga atau ditemukan di pertambangan skala besar, mayoritas kasus kerja paksa dan pekerja anak terkait tambang diasosiasikan dengan pertambangan rakyat dan skala kecil (Lihat D.11). Namun, dalam kondisi tertentu, perusahaan tambang skala besar bisa jadi terlibat dalam penggunaan pekerja anak atau pekerja paksa melalui tindakan pihak-pihak lain, meliputi kontraktor, pemasok, atau bisnis yang berkaitan dengan pertambangannya.

Kini sudah menjadi ekspektasi global bahwa agar mampu memenuhi tanggung jawab dalam menghormati hak asasi manusia, semua perusahaan tambang harus menjalankan uji tuntas untuk menghapus pelanggaran HAM, termasuk pekerja anak dan pekerja paksa, di dalam operasi tambang mereka sendiri, dan berupaya

mencegah pelanggaran ini di dalam rantai pasokan mereka. Uji tuntas meliputi pengambilan langkah-langkah proaktif untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan menjelaskan cara mereka mengatasi dampak terhadap hak asasi manusia; serta mengimplementasikan proses yang memudahkan pemulihan dari dampak buruk HAM yang mereka timbulkan atau yang ikut mereka sumbang (Lihat D.01).

Penghapusan pekerja anak dan pekerja paksa masih tetap menjadi tantangan utama di seluruh dunia. Namun kemajuan di bidang tersebut telah mendorong ke arah peningkatan luas kualitas hidup individu dan masyarakat yang terdampak, serta manfaat ekonomi dan sosial yang besar di banyak negara. Seiring dengan terus tumbuhnya kesadaran akan permasalahan pekerja anak dan pekerja paksa di dalam rantai pasok global, perusahaan tambang, seperti halnya bisnis-bisnis yang lain, ditekan oleh investor, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan konsumen untuk memainkan peran utama dalam menghapus praktik-praktik ini.

Ketika perusahaan tambang menjalankan uji tuntas yang diperlukan untuk menyingkap dan menyelesaikan persoalan pekerja anak atau pekerja paksa di dalam operasi atau rantai pasok global, mereka bisa meraih keunggulan kompetitif karena mereka kemungkinan dipandang secara lebih positif oleh investor dan, yang penting, pelanggan, yang juga menghadapi risiko reputasi yang sama karena dihubungkan dengan perusahaan yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Perusahaan yang tidak menyikapi permasalahan pekerja anak atau pekerja paksa secara serius berisiko mengalami rusak reputasi, upaya hukum, dan menjadi sasaran kampanye tajam oleh organisasi masyarakat sipil atau investor. ■

E.02.1

Tindakan

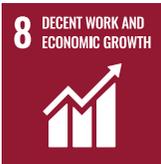
Perusahaan menerapkan sistem untuk mengidentifikasi dan menilai potensi risiko segala jenis pekerja paksa, wajib kerja, pekerja korban perdagangan orang, dan pekerja anak di wilayah operasinya dan seluruh rantai pasokan, serta merancang dan mengimplementasikan strategi untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- a. Menerapkan sistem untuk mengidentifikasi dan menilai potensi risiko segala jenis pekerja paksa, wajib kerja, pekerja korban perdagangan orang, dan pekerja anak di wilayah operasinya dan seluruh rantai pasok?
- b. Menerapkan sistem untuk mengembangkan strategi dan rencana untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi ini?
- c. Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis?

- UNGC Prinsip 1; Prinsip 4; Prinsip 5
- ILO C029; C105
- GRI 408; 409
- IFC PS2.21; PS2.22; PS2.27

E.03 Nondiskriminasi dan Kesempatan yang Sama



Nondiskriminasi dan kesempatan yang sama bertumpu pada prinsip bahwa semua keputusan ketenagakerjaan harus semata-mata didasarkan pada (a) kemampuan individu untuk mengerjakan tugas yang bersangkutan, bukan karakteristik pribadi yang tidak ada kaitannya dengan persyaratan inheren pekerjaan, dan bahwa (b) manfaat dari pekerjaan bersifat adil, dan bahwa (c) tidak ada pekerja yang mengalami diskriminasi dari jajaran manajemen atau sesama rekan pekerja. Konsep nondiskriminasi dan kesempatan yang sama dikukuhkan dalam berbagai instrumen internasional, termasuk konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Buruh Internasional (ILO).

Diskriminasi ketenagakerjaan kerja bisa meliputi pengecualian atau perlakuan pilih-kasih terhadap orang berdasarkan usia, ras, kesukuan, gender, agama, pandangan politik, asal-usul kedaerahan atau sosial, disabilitas, orientasi seksual, atau karakteristik lain. Diskriminasi bisa memengaruhi akses ke pekerjaan, promosi atau profesi tertentu; diskriminasi bisa tercermin dalam syarat dan ketentuan pekerjaan, atau bisa dirasakan di tempat kerja dalam bentuk pelecehan atau menjadi objek bulan-bulanan.

Di dalam konteks pertambangan, mungkin ada individu, kelompok, atau masyarakat rentan yang menghadapi risiko lebih tinggi terkena diskriminasi, seperti perempuan, Masyarakat Adat, orang-orang dari etnis tertentu atau minoritas lainnya, pekerja migran, atau pekerja pengidap HIV/AIDS atau penyakit lain, yang diskriminasinya sering terjadi akibat kumpulan banyak faktor. Diskriminasi bisa bersifat langsung atau tidak langsung. Bagi para pekerja perempuan secara khusus, berbagai tantangan terus muncul, seperti pelecehan seksual dan kurangnya penerimaan oleh rekan kerja laki-laki (Lihat juga E.01). Permasalahan tidak langsung meliputi penyeimbangan tanggung jawab keluarga dan kerja giliran.

Ketika pekerja, khususnya perempuan, didiskriminasi karena berbagai alasan (misalnya, perempuan dari kelompok minoritas atau perempuan masyarakat asli), diskriminasi lintas semacam itu ikut andil dalam membuat posisi mereka semakin lemah.

Banyak negara memiliki undang-undang yang melarang diskriminasi terkait pekerjaan, tetapi undang-undang tersebut sering kali lemah atau terbatas ruang lingkupnya. Di beberapa negara produsen, perilaku dan sikap budaya tertentu mungkin sudah kuat mengakar, yang memunculkan tantangan berat untuk melawan diskriminasi terhadap pekerja.

Perusahaan terkemuka semakin aktif berusaha melampaui persyaratan hukum, dan melakukan upaya bersama untuk menghapus diskriminasi dan membangun keragaman serta kesempatan yang sama di tempat kerja. Mereka melembagakan praktik perekrutan yang jelas dan transparan yang didasarkan pada kualifikasi dan pengalaman, bukan karakteristik pribadi; mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan antipelecehan; menyediakan mekanisme keluhan yang bersifat rahasia (Lihat E.07); menciptakan kebijakan ramah-keluarga; memberikan pelatihan budaya, keagamaan, gender, atau keragaman lain bagi supervisor dan pekerja; melatih dan merekrut kelompok-kelompok yang kurang terwakili; dan mengimplementasikan berbagai prakarsa lain.

Perusahaan tambang yang menempuh pendekatan antidiskriminasi dan kesempatan yang sama yang progresif bisa memetik sejumlah keunggulan bisnis, meliputi semangat pekerja yang meningkat, kumpulan pekerja berbakat yang lebih luas sebagai sumber perekrutan, rendahnya risiko menghadapi tantangan hukum, dan manfaat reputasi. ■

E.03.1

Tindakan

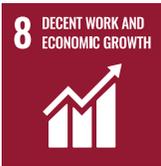
Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mendasarkan praktik perekrutan dan ketenagakerjaan mereka pada prinsip kesempatan kerja yang sama agar dapat mencegah semua bentuk diskriminasi di tempat kerja dan mendukung keragaman tenaga kerja.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya:

- a. Mengambil langkah-langkah khusus untuk menuangkan kebijakan nondiskriminasi di dalam syarat dan ketentuan?
- b. Mengambil langkah-langkah khusus untuk mengimplementasikan pelatihan guna menumbuhkan kesadaran akan diskriminasi di kalangan staf manajemen dan pekerja atau mengambil tindakan lain yang bertujuan mencegah dan mengatasi masalah diskriminasi di tempat kerja?
- c. Menetapkan target menyangkut keragaman dan inklusivitas dalam praktik perekrutan dan ketenagakerjaan?

- Prinsip 6 UNGC
- ILO C111; C169
- GRI 405; 406
- IFC PS2.15

E.04 Hak untuk Berkumpul, Berunding Bersama, dan Kebebasan Berserikat



Kebebasan berserikat, dan hak untuk berkumpul dan berunding bersama adalah hak mendasar bagi pekerja sekaligus hak asasi manusia yang kini diakui di sebagian besar belahan dunia, meskipun di beberapa negara, pekerja tambang dan perwakilan serikat pekerja masih belum menikmati hak-hak ini, ataupun diancam atau dibunuh jika menjalankan hak-hak tersebut; kekerasan dan ancaman fisik terhadap pekerja juga meningkat di beberapa negara.

Instrumen yang relevan yang melindungi hak-hak di atas adalah konvensi utama Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang berupa Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berkumpul, 1948 (No. 87) dan Hak untuk Berkumpul dan Berunding Bersama, 1949 (No. 98). Konvensi tersebut menetapkan hak-hak bagi pekerja dan pengusaha untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi pilihannya sendiri; perlindungan bagi pekerja dari tindakan diskriminasi antiserikat, seperti pemecatan dari keanggotaan serikat atau campur tangan oleh perusahaan dalam upaya-upaya berorganisasi (misalnya, menghalangi organisasi pekerja agar tidak bisa mengakses lokasi tambang); dan bagi pekerja, biasanya diatur sebagai sebuah serikat, untuk merundingkan syarat pekerjaan mereka dengan manajemen pertambangan secara kolektif.

Tujuan berunding bersama adalah untuk membentuk perjanjian tertulis gabungan yang mengatur hubungan kerja, meliputi gaji dan waktu kerja, dan bahkan permasalahan seperti keselamatan kerja, pelatihan, cuti kelahiran, dan kesempatan yang sama. Berunding bersama memberikan jalan untuk menyeimbangkan kekuasaan dan dengan demikian meningkatkan keadilan dalam distribusi manfaat dari pertambangan, dan memfasilitasi kestabilan dalam hubungan kerja.

Banyak perusahaan tambang telah mengesahkan kebijakan dan komitmen untuk memegang teguh konvensi inti ILO, dan semakin gencar menaruh ekspektasi yang sama pada kontraktor dan pemasok mereka. Beberapa perusahaan telah menandatangani perjanjian kerangka kerja internasional atau global dengan federasi serikat global, yang memperlihatkan komitmen yang lebih kuat untuk menerapkan standar tenaga kerja tinggi yang sama secara global di dalam anak perusahaan dan kontraktor mereka, berikut rantai pasok mereka.

Di banyak belahan dunia, muncul keprihatinan yang semakin besar terhadap meningkatnya ketidaksetaraan pendapatan, rasa tidak aman, ketidakstabilan sosial, dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Berunding bersama bisa menjadi sarana yang ampuh bagi keterlibatan antara organisasi pengusaha dengan organisasi pekerja untuk menyelesaikan keprihatinan ekonomi dan sosial, memperkuat suara kaum lemah, mengurangi angka kemiskinan, dan keterbelakangan sosial. Ini membantu menyumbang jalur pertumbuhan yang adil dan inklusif.

Bagi perusahaan tambang, selain mendorong hubungan yang lebih baik dengan pekerja, perjanjian berunding bersama bisa menghasilkan lingkungan operasional yang lebih stabil dan dapat diprediksi; dan bisa meningkatkan kinerja serta daya saing perusahaan. Perusahaan yang enggan menghormati hak-hak pekerja akan kebebasan berserikat dan berunding bersama akan menghadapi pemogokan, protes, dan kampanye dari organisasi pekerja dan pemegang saham. ■

E.04.1

Tindakan

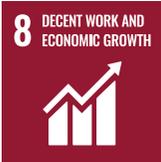
Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu secara aktif menghormati hak-hak pekerjanya untuk berkumpul, berunding bersama, dan kebebasan berserikat.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya menghormati hak-hak pekerja untuk:

- a. Berkumpul, termasuk dengan memberikan akses ke wilayah khusus bagi organisasi pekerja untuk menemui pekerja?
- b. Berunding bersama, termasuk dengan mengembangkan perjanjian kerja bersama secara formal?
- c. Kebebasan berserikat, termasuk dengan mengizinkan rapat serikat pekerja di tempat kerja?

- UNGC Prinsip 1; Prinsip 3
- ILO C087; C098; C169; C176
- GRI 407
- IFC PS2.13; PS2.14
- SASB NR0302-19

E.05 Upah Hidup



Upah hidup yang layak – yaitu yang memungkinkan pekerja dan keluarganya menjalani gaya hidup dasar tetapi layak, hidup di atas garis kemiskinan, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya – adalah hak asasi manusia. Sejumlah negara dan pemerintah daerah menerapkan undang-undang yang mengharuskan upah hidup dibayarkan kepada warga negara, dan berbagai sistem patokan atau standar yang mendorong praktik lingkungan dan sosial yang bertanggung jawab telah mengintegrasikan konsep upah hidup ke dalam persyaratan kerjanya.

Meskipun konsep upah hidup diakui secara luas, persoalan seperti pengukuran dan definisi tentang upah hidup sering digunakan sebagai alasan untuk tidak membayar upah hidup. Meskipun tidak ada satu pun metode untuk menghitung upah hidup, ada beberapa metodologi yang bisa diandalkan. Dalam kondisi tertentu, langkah perusahaan tambang sudah tepat untuk memastikan bahwa seluruh paket tunjangan bagi pekerja, termasuk, misalnya, perumahan yang disediakan beserta upah, memungkinkan pekerja menjalani standar hidup yang layak. Faktor terpenting bagi perusahaan tambang adalah untuk memastikan keterlibatan para pemangku kepentingan yang relevan, seperti pekerja dan

perwakilan masyarakat, dalam diskusi dan penilaian upah hidup sehingga perusahaan bisa memastikan kecukupan upah dalam memenuhi kebutuhan para pekerja dan keluarga mereka di dalam konteks lokal yang spesifik.

Beberapa perusahaan tambang mulai mengambil posisi di depan dengan memasukkan upah hidup ke dalam kebijakan atau komitmen perusahaan terkait upah yang dibayarkan kepada pekerja, kontraktor, dan pemasok.

Perusahaan tambang yang berupaya secara proaktif untuk memastikan pembayaran upah hidup kepada pekerja dan kontraktor tambang sesungguhnya sudah menunaikan tanggung jawab dalam menghormati hak-hak asasi para pekerja mereka. Baru kemudian perusahaan tambang dapat memperkuat hubungan dengan pekerja dan meningkatkan semangat kerja serta produktivitas mereka; dan menunjukkan kepada investor dan pemangku kepentingan bahwa mereka sudah memenuhi tanggung jawab dalam menghormati hak-hak pekerja. Pengupahan yang adil juga dapat membantu mengurangi potensi protes pekerja berikut kerugian keuangan dan rusaknya reputasi yang berkaitan dengannya. ■

E.05.1**Efektivitas**

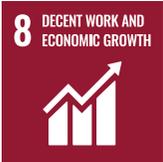
Perusahaan melacak, meninjau, dan berupaya meningkatkan kinerjanya untuk memastikan upah pekerjajanya memenuhi atau melampaui standar upah hidup layak yang diakui, atau upah minimum yang sah, mana saja yang paling tinggi.

Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:

- a. Melacak dan mengungkapkan tingkat gaji pekerjajanya berdasarkan standar upah hidup, atau upah minimum yang sah, mana saja yang paling tinggi?
- b. Mengaudit dan/atau meninjau tingkat upah berdasarkan standar upah hidup, atau upah minimum yang sah, mana pun yang paling tinggi?
- c. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan dari audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan perbaikan kinerjanya guna memastikan apakah upah pekerjajanya memenuhi atau melampaui standar upah hidup, atau upah minimum yang sah, mana saja yang paling tinggi?

• GRI 202

E.06 Manajemen Redundansi Kolektif



Hubungan kerja yang stabil biasanya melahirkan produktivitas pekerja dan efisiensi perusahaan yang lebih baik, sedangkan kepastian pekerjaan dan pendapatan bisa membantu negara-negara produsen meraih banyak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDG). Namun mungkin ada alasan ekonomi, teknis, atau organisasional perusahaan meninjau dan menyesuaikan ukuran angkatan kerjanya. Turunnya harga komoditas, perkembangan pasar yang tidak menguntungkan, gerakan ke arah otomatisasi atau perubahan prosedur akibat inovasi teknologi, atau organisasi ulang internal bisa memaksa perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerjanya secara besar-besaran.

Pemberhentian kerja (redundansi) massal bisa menimbulkan dampak besar tidak hanya bagi pekerja itu sendiri, tetapi juga masyarakat mereka, khususnya di wilayah yang pemberi kerja utamanya adalah perusahaan tambang. Tantangan yang muncul dari pemberhentian massal meliputi hilangnya pendapatan secara mendadak dan masalah psiko-sosial bagi sejumlah besar pekerja, ketidakpercayaan dan konflik antara masyarakat yang terdampak dengan perusahaan, semangat kerja yang rendah di dalam angkatan kerja yang bertahan, dan kesulitan ekonomi yang berat bagi masyarakat yang terdampak.

Dalam hal kemungkinan terjadinya perampingan, perusahaan dapat melakukan analisis alternatif terhadap redundansi dan merundingkannya dengan perwakilan pekerja, serikat buruh, atau kelompok-kelompok lain. Strategi potensial untuk meminimalkan dan mengurangi redundansi kolektif meliputi pemangkasan biaya, pengurangan jam kerja, atau orientasi ulang dan pelatihan ulang pekerja untuk posisi yang berbeda di dalam perusahaan.

Dalam hal redundansi massal yang tidak terelakkan, perusahaan dapat menunjukkan bahwa kriteria yang digunakan untuk memberhentikan pekerja itu objektif, adil, dan transparan. Dengan mengomunikasikan rencana redundansi secukupnya di depan, perusahaan bisa meluangkan waktu untuk melakukan telaah gabungan oleh pihak berwenang pemerintah yang relevan, para pekerja dan perwakilan mereka terhadap implikasi rencana agar bisa mengurangi dampak buruk sebisa mungkin, dan untuk menyusun rencana sosial dengan serikat buruh dan para pemangku kepentingan yang lain, jika memungkinkan. Strategi lain untuk mengurangi dampak terhadap angkatan kerja yang terdampak meliputi kolaborasi dengan pemerintah lokal, daerah, atau nasional, industri atau perusahaan lain untuk mencari peluang bagi transisi pekerja yang adil, termasuk kemungkinan pelatihan dan pemekerjaan ulang.

Dengan pendekatan inovatif untuk merespons kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan, perusahaan tambang dapat mempertahankan angkatan kerja yang stabil. Ketika redundansi tidak bisa dihindari, perusahaan dapat meminimalkan dan mengurangi dampaknya terhadap pekerja dengan memastikan penghormatan atas semua perjanjian berunding bersama dan dengan secara aktif berkonsultasi dengan perwakilan pekerja dalam mengembangkan rencana-rencana sosial. Pengelolaan redundansi kolektif secara bertanggung jawab dan adil tidak hanya akan meringankan dampak berat terhadap para pekerja dan masyarakat mereka, tetapi juga akan mendukung hubungan pekerja yang lebih baik dan mengurangi risiko hukum serta reputasi bagi perusahaan, sambil tetap berkontribusi bagi SDG PBB. ■

E.06.1**Komitmen**

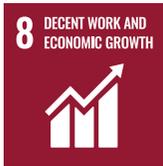
Perusahaan berkomitmen untuk meminimalkan dan memitigasi redundansi kolektif jika terjadi perampingan, gangguan operasi, atau perubahan otomatisasi/teknologis, termasuk melalui keterlibatan pekerja.

• IFC PS2.18

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- a. Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk meminimalkan dan memitigasi redundansi kolektif jika terjadi perampingan, gangguan operasi, atau perubahan otomatisasi/teknologis, termasuk melalui keterlibatan pekerja?
- b. Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini?
- c. Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini?

E.07 Jaminan Perlindungan Pekerja



Kini sudah menjadi ekspektasi agar perusahaan menyediakan sarana bagi pemangku kepentingan untuk mengadukan keluhan dan mendapatkan penyelesaian atas pelanggaran HAM terkait bisnis (Lihat D.01 dan D.12), yang meliputi pelanggaran hak-hak asasi buruh. Misalnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lainnya menganjurkan agar perusahaan membangun mekanisme yang memungkinkan mereka mendengar dan menyelesaikan keluhan yang diadakan oleh pemangku kepentingan, termasuk pekerja. Dalam konteks tempat kerja, mekanisme keluhan seyogianya memudahkan pekerja untuk mengadukan keluhan yang berkaitan dengan HAM buruh, kondisi kerja, atau syarat pekerjaan, dan memberi saran perbaikan tempat kerja.

Sebagian besar perusahaan tambang memiliki mekanisme keluhan bagi pekerja, tetapi efektivitas mekanisme tersebut tidak sama/sebanding. Seperti yang disebutkan dalam D.12, mekanisme keluhan di tingkat operasional akan menjadi sangat efektif jika memenuhi kriteria tertentu seperti: sah, dapat diakses oleh semua pekerja, bisa diprediksi, adil, transparan, dan sesuai-hak. Misalnya, dalam konteks pekerja, mekanisme yang adil bisa memudahkan pekerja untuk meminta kehadiran kolega atau perwakilan dari organisasi buruh ketika dia mengadukan keluhan, atau membekali pekerja dengan akses ke pelatihan atau nasihat untuk memfasilitasi partisipasi yang efektif dalam proses penyelesaian keluhan.

Mekanisme keluhan seyogianya memudahkan pekerja untuk mengadukan keluhan secara anonim atau rahasia, jika diminta, dan tanpa takut dihukum atau dibalas dendam. Selain itu, semua mekanisme keluhan di tingkat operasional yang tersedia bagi pekerja seyogianya tidak menghalangi mereka untuk mencari

penyelesaian melalui pengadilan hubungan industrial atau mekanisme yudisial atau nonyudisial yang lain.

Seperti halnya mekanisme keluhan yang dirancang untuk pemangku kepentingan yang lain, mekanisme keluhan pekerja akan sangat membantu dan efektif jika dirancang agar cocok dengan konteks budaya lokal dan dirancang secara kolaboratif dengan pekerja atau perwakilan pekerja. Proses keluhan yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik dapat membantu menumbuhkan budaya saling percaya dan mengurangi konflik dengan pekerja dengan menyediakan proses dengar pendapat dan penyelesaian yang adil, sehingga pekerja merasa puas karena keluhannya didengar dan disikapi secara serius, meskipun hasilnya tidak sepenuhnya dipandang optimal.

Jika sebuah perusahaan tambang tidak menyediakan sarana yang efektif untuk secara aktif melibatkan pekerja dalam penyelesaian dampak, perusahaan tambang tersebut tidak bisa dikatakan memenuhi tanggung jawabnya sepenuhnya dalam menghormati hak asasi manusia. Ketidakberhasilan mengidentifikasi keluhan sejak dini dan mengatasinya secara efektif juga bisa menimbulkan rentetan masalah negatif bagi operasi pertambangan. Rentetan masalah tersebut berkisar dari semangat kerja yang rendah, produktivitas berkurang, keluar-masuk pekerja yang tinggi, ketidakhadiran, dan sakit di kalangan pekerja, hingga pemogokan atau tindakan kekerasan terhadap perusahaan. Rusaknya reputasi yang kemudian terjadi bisa mengurangi kemampuan perusahaan dalam memenangi kontrak yang akan datang atau mewujudkan peluang investasi yang baru. ■

E.07.1**Efektivitas****Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme keluhannya bagi pekerja.**

- Prinsip UNGC 1
- IFC PS2.20

Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:

- Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kelancaran dan aplikasi mekanisme keluhannya bagi pekerja, termasuk jumlah dan sifat keluhan dan tindakan yang diambil sebagai responsnya?
- Mengaudit dan/atau meninjau, berdasarkan perspektif pihak yang mengeluh, efektivitas mekanisme keluhan bagi pekerja?
- Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan untuk mengupayakan peningkatan efektivitas mekanisme keluhan bagi pekerja?



F Tanggung Jawab Lingkungan



Pertambangan skala besar biasanya melibatkan penggundulan pepohonan dan tanah, perubahan aliran sungai, dan pergerakan bebatuan dalam jumlah besar. Aktivitas tersebut biasanya mengubah lanskap dan ekosistem secara permanen, dan menimbulkan dampak temporer seperti kebisingan, dan emisi air serta udara, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan masyarakat (Lihat D.06).

Ketika dikelola secara buruk, pertambangan dapat menimbulkan dampak yang membahayakan bagi lingkungan akibat kegagalan berat fasilitas limbah (lihat F.02), terciptanya masalah pencemaran yang bisa bertahan ratusan tahun, atau kerusakan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan yang menjadi gantungan hidup masyarakat (Lihat F.05).

Manajemen pertambangan yang bertanggung jawab menuntut perusahaan untuk memahami nilai-nilai lingkungan yang penting dan mengambil langkah-langkah untuk menghindari

timbulnya dampak yang mengancam ekosistem dan sumber daya alam yang sangat penting bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Ketika dampak tidak bisa dicegah, 'pendekatan hierarki mitigasi' bisa ditempuh, yang menuntut untuk sebisa mungkin menghindari dan meminimalkan dampak yang tak bisa dielakkan, memulihkan lanskap dan ekosistem yang rusak, dan perusahaan memberikan ganti rugi atas dampak yang tersisa (Lihat F.01 dan F.05).

Selain itu, pendekatan lanskap terhadap penilaian dampak dari sebuah proyek pertambangan dapat membantu perusahaan memahami dampak inkremental pertambangan ketika ada pembangunan besar yang lain di suatu wilayah, dan merencanakan strategi mitigasi yang tepat untuk memastikan agar dampak kumulatifnya tidak mengancam kesehatan manusia atau menimbulkan kerusakan yang parah terhadap lingkungan (Lihat F.01). ■

F.01 Pemeliharaan Lingkungan



Pemeliharaan lingkungan merupakan pemahaman yang komprehensif dan manajemen yang efektif terhadap risiko dan peluang lingkungan yang penting yang berkaitan dengan perubahan iklim, emisi, manajemen limbah, konsumsi sumber daya, konservasi air, dan keanekaragaman hayati serta perlindungan jasa lingkungan.



Menurut Kesepakatan Global PBB, pendekatan manajemen lingkungan perusahaan tradisional, yang sebagian besar didasarkan pada kepatuhan dan penilaian risiko sempit, tidak akan memadai untuk menjawab tantangan lingkungan besar abad ke-21 secara berhasil, seperti kelangkaan air, melakukan mitigasi dan adaptasi dengan dampak perubahan iklim, dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati global lebih jauh. Penyelesaian masalah seperti ini justru membutuhkan pendekatan manajemen lingkungan yang komprehensif dan bersifat siklus.

Perusahaan semakin giat menempuh pendekatan manajemen “Rencanakan, Lakukan, Periksa, Tindak Lanjuti” bersiklus terhadap perlindungan lingkungan. Elemen dasar di dalam jenis sistem manajemen lingkungan (EMS) ini meliputi: penetapan tujuan lingkungan, penilaian risiko dan dampak lingkungan potensial, pencegahan dan mitigasi dampak buruk, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi lingkungan (M&E), dan pelaporan tentang tindakan dan efektivitasnya. Rencana manajemen lingkungan kemudian memandu tindakan yang diperlukan, dan dimutakhirkan ketika M&E atau perubahan proses pertambangan memunculkan kebutuhan atas strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan lingkungan.

Meskipun penting, proses EMS yang andal itu tidak serta-merta cukup untuk menjamin perlindungan lingkungan yang juga harus memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak. Timbul

kesadaran yang semakin besar akan kesalingterkaitan di antara tantangan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang mengadung dunia; dan bahwa solusi yang ditujukan untuk menghapus kemiskinan dan mendorong perlindungan lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan perencanaan dan penilaian yang terpadu, dan sebuah pendekatan manajemen yang mempertimbangkan dampak langsung, tidak langsung, terpicu, dan kumulatif yang luas yang dapat ditimbulkan oleh proyek tertentu terhadap lanskap dan konteks regional yang lebih luas.

Penilaian Dampak Lingkungan (EIA) merupakan suatu alat, sering diwajibkan oleh undang-undang tetapi juga digunakan secara sukarela oleh beberapa perusahaan, untuk menilai dampak langsung, tidak langsung, dan kumulatif potensial dari proyek yang diusulkan, dan untuk mengevaluasi rancangan proyek alternatif. Pemutakhiran rutin penilaian ini (bukan semata-mata EIA satu kali) tentunya akan diperlukan untuk dijadikan masukan bagi strategi manajemen lingkungan perusahaan. Perusahaan yang berkomitmen untuk mengelola dampak lingkungannya secara efektif akan mengimplementasikan hierarki mitigasi yang sebisa mungkin memprioritaskan pencegahan dampak negatif, meminimalkan dampak yang tidak bisa dihindari, dan memulihkan lanskap serta sumber daya alam yang rusak menjadi ekosistem yang berfungsi seperti semula dan produktif yang dapat menopang tumbuhan, satwa liar, dan aktivitas manusia. Terakhir, hierarki mitigasi ini menuntut perusahaan agar mengompensasikan atau mengganti semua dampak sisa yang masih ada (Lihat juga F.05).

Ruang lingkup penilaian dampak lingkungan semakin mengalami perluasan melampaui lingkungan fisik. Penilaian terpadu yang menggabungkan kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, hak asasi manusia, budaya, dan psikologis serta lingkungan fisik,

biologis, dan geokimia, memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang hubungan timbal-balik yang kompleks antara umat manusia dengan lingkungan alami yang memengaruhi kesehatan dan kesejahteraan lingkungan dan manusia. Kesadaran ini membantu memastikan, jika memungkinkan, agar strategi mitigasi tidak semata-mata mengganti satu masalah dengan masalah yang lain lagi.

Selain itu, perencanaan di skala lanskap atau DAS yang lebih besar membantu pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mengidentifikasi tujuan pemanfaatan lahan atau sumber daya alam yang saling bersaing dan memahami dampak kumulatif yang negatif dari berbagai pembangunan. Informasi ini, pada gilirannya, mendukung rancangan dan implementasi proyek yang lebih optimal untuk memaksimalkan manfaat lingkungan saat ini dan di masa depan, berikut manfaat ekonomi dan sosial. Pemerintah semakin gencar mengembangkan Penilaian Lingkungan Strategis (SEA) nasionalnya sendiri untuk memastikan pertimbangan aspek-aspek lingkungan secara efektif di dalam pengembangan kebijakan dan program. Fakta ini memberikan kerangka kerja tambahan bagi perusahaan untuk menyelaraskan EIA-nya sendiri dengan prioritas dan bidang kepentingan nasional, sehingga melengkapi penyelarasan ekonomi lain (Lihat A.01).

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan komponen penting dari manajemen lingkungan yang efektif. Para pemangku kepentingan, termasuk anggota masyarakat terdampak dan perwakilan badan-badan pemerintah yang relevan, seyogianya dilibatkan ke dalam proses penilaian, pengembangan strategi mitigasi yang tepat, dan program pemantauan (Lihat juga D.03 dan F.03).

Secara bersama-sama, integrasi manajemen lingkungan dengan pertimbangan kemasyarakatan yang lebih luas, keterlibatan pemangku kepentingan yang bermakna, dan pengungkapan publik atas aktivitas manajemen lingkungan dapat meningkatkan akuntabilitas perusahaan, dan meningkatkan kemungkinan bahwa upaya-upayanya akan mendukung kesehatan dan sumber mata pencaharian masyarakat serta meninggalkan warisan lingkungan yang positif. Pemeliharaan lingkungan yang efektif, di samping melindungi nilai-nilai lingkungan dan sosial, berpeluang menciptakan hubungan pemangku kepentingan yang lebih baik, keterlibatan pekerja yang meningkat, manfaat keuangan, dan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. ■

<p>F.01.1</p> <p>Komitmen</p>	<p>Perusahaan berkomitmen untuk mengelola dampak lingkungannya secara sistematis melalui pendekatan hierarki mitigasi.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk mengelola dampak lingkungannya secara sistematis melalui pendekatan hierarki mitigasi? Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini? Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini? 	<ul style="list-style-type: none"> • IFC PS1.13; PS1.14 • SASB NR0302-10
<p>F.01.2</p> <p>Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak lingkungannya melalui pendekatan terpadu yang mempertimbangkan hubungan antara dampak sosio-ekonomi dengan dampak lingkungan.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi kondisi dasar dan perubahan lingkungan melalui pendekatan terpadu? Mengidentifikasi dan menilai dampak lingkungan dari aktivitasnya melalui pendekatan terpadu? Menyajikan dan mendiskusikan hasil penilaian mereka tentang dampak lingkungan dengan masyarakat lokal secara rutin dan sistematis? 	<ul style="list-style-type: none"> • GRI 300; 400 • IFC PS1

F.02 Manajemen Limbah Tambang



Penggalan atau peledakan bongkahan batu yang berisi bahan tambang mineral dan logam menghasilkan limbah bongkahan batu dalam jumlah besar yang sedikit atau tidak memiliki nilai ekonomi. Bijih yang tersisa, yang konsentrasi mineral dan logamnya berada di atas “kadar batas”, memasuki proses penggilingan dan pengolahan, untuk mengekstrak mineral dan logam dari bijih tersebut. Operasi tambang ini sering menggunakan zat-zat kimia dan menghasilkan limbah residu dalam jumlah besar. Limbah tambang, dikenal sebagai tailing, pada prinsipnya terdiri dari remukan batu, air, dan zat-zat kimia pengolah. Limbah tambang biasanya disalurkan melalui pipa ke bendungan dengan permukaan luas untuk disimpan dalam bendungan urugan. Cairan limbah didaur ulang, menguap, atau mengering seiring waktu. Ketika fasilitas penyimpanan limbah tambang sudah penuh, limbah tambang bisa mengalami reklamasi, seperti penanaman pepohonan, untuk menstabilkan area yang bersangkutan.

Terdapat beragam risiko dan dampak yang berkaitan dengan fasilitas penyimpanan limbah tambang. Limbah tambang biasanya berisi zat-zat kimia pengolah residu dan kadar logam yang tinggi, yang sering timbul akibat karakteristik bijih itu sendiri. Fasilitas sangat rentan terhadap rembesan, yang dapat menyebabkan kontaminasi air tanah dan air permukaan. Bendungan bisa meliputi wilayah yang sebelumnya berupa tanah pertanian yang produktif atau habitat satwa liar. Limbah tambang kering bisa menimbulkan permasalahan debu yang serius bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dan bendungan limbah tambang yang tidak stabil bisa mengalami kebocoran yang mengakibatkan bencana, dengan melepaskan limbah dalam jumlah besar yang bisa merusak sungai, mengubur rumah, menghancurkan sumber mata pencaharian, dan menimbulkan dampak serius bagi lingkungan dan masyarakat lokal.

Pembuangan limbah tambang ke aliran/genangan air (sungai, danau, laut) menimbulkan permasalahan lingkungan khusus dan juga risiko kesehatan bagi manusia. Misalnya, kadar logam yang tinggi, seperti tembaga, timbal, dan arsenik dapat menimbulkan keracunan akut langsung dan kronis serta bioakumulasi pada jaringan organ ikan yang bisa menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia. Beberapa perusahaan telah mengembangkan standar internal yang mencegah pembuangan limbah ke sungai atau laut, dan beberapa bank besar telah menyatakan tidak akan membiayai perusahaan yang melakukan pembuangan limbah tambang ke laut dan/atau sungai.

Kegagalan bendungan limbah tambang yang terjadi belum lama ini dan menarik perhatian masyarakat telah mendorong beberapa peninjauan dan tindakan terhadap industri pertambangan oleh perusahaan tambang dan para pemangku kepentingan lain, meliputi pemerintah dan investor, yang diharapkan dapat menghasilkan perbaikan praktik yang akan membantu mencegah bencana yang akan datang.

Selain memastikan perencanaan, perancangan, pembangunan, dan pengelolaan fasilitas limbah tambang sesuai dengan standar tertinggi oleh para profesional yang kompeten, terdapat praktik manajemen penting yang lain yang dapat membantu mencegah dan meminimalkan dampak dari limbah tambang. Praktik manajemen tersebut meliputi: penetapan akuntabilitas dan tanggung jawab atas manajemen limbah tambang kepada jajaran tertinggi perusahaan; pengadopsian teknologi terbaik yang tersedia; pelaksanaan peninjauan internal terhadap kinerja fasilitas limbah tambang secara sering dan pemastian implementasi tindakan perbaikan sesuai jadwal; dan upaya memudahkan peninjauan mandiri terhadap investigasi lokasi tambang berikut pemilihan, perancangan, pembangunan, operasi, penutupan

dan pascapenutupan fasilitas limbah tambang, disertai dengan pengungkapan hasil temuan secara publik.

Terlebih-lebih lagi, mengingat keputusan manajemen limbah tambang bisa menimbulkan implikasi jangka panjang bagi masyarakat dan sumber daya alami, semua pemangku kepentingan berkepentingan agar perusahaan melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak dan para pakar dari luar ketika menilai risiko yang berkaitan dengan beragam rancangan fasilitas limbah tambang, dan dalam perencanaan, pembangunan, dan pemantauan fasilitas limbah tambang. Risiko yang berkaitan dengan limbah tambang dapat bertahan selama ratusan tahun sehingga pengungkapan sistematis tentang lokasi pasti dan karakteristik semua fasilitas limbah tambang oleh perusahaan tambang memastikan data yang menjadi kepentingan-publik ini dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan dan juga terdokumentasi bagi generasi masa depan.

Ada dorongan yang kuat bagi perusahaan tambang untuk mengurangi risiko yang berkaitan dengan fasilitas limbah tambang. Kegagalan, entah berupa bobolnya bendungan yang membawa bencana atau rembesan lambat zat-zat kimia ke dalam air, bisa menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan yang signifikan bagi masyarakat lokal, kerusakan lingkungan yang luas, dan biaya pembersihan serta pemulihan yang tinggi yang pada akhirnya jatuh ke pundak pemerintah negara produsen. Perusahaan yang terlibat dalam kesalahan manajemen fasilitas limbah tambang menderita kerugian keuangan yang sangat besar, menghadapi upaya hukum, kehilangan izin sosial untuk beroperasi, dan tidak hanya membawa kerusakan reputasi bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi industri pertambangan secara keseluruhan. ■

<p>F.02.1</p> <p>Komitmen</p>	<p>Perusahaan berkomitmen untuk tidak menggunakan sungai, danau, atau laut untuk membuang limbah tambang.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk tidak menggunakan sungai, danau, atau laut untuk membuang limbah tambang? Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini? Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini? 	<p>• SASB NR0302-09</p>
<p>F.02.2</p> <p>Tindakan</p>	<p>Perusahaan secara publik mengungkapkan informasi tentang lokasi dan keamanan semua fasilitas penyimpanan limbah tambangnya.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengungkapkan secara publik jumlah dan lokasi akurat semua fasilitas penyimpanan limbah tambang (termasuk fasilitas yang saat ini masih aktif dan fasilitas yang sedang direhabilitasi atau sudah ditutup)? Mengungkapkan secara publik metode pembangunan dan kategori bahaya (berdasarkan penilaian dampak) dari setiap fasilitas penyimpanan limbah tambangnya? Membuat data tersebut tersedia secara bebas di situs web perusahaan? 	
<p>F.02.3</p> <p>Efektivitas</p>	<p>Jika memungkinkan, perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk menyempurnakan kinerjanya dalam menangani risiko potensial yang berkaitan dengan fasilitas limbah tambangnya, termasuk kegagalan pipa saluran limbah dan bendungan limbah tambang.</p> <p><i>Jika memungkinkan, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam menangani risiko potensial yang berkaitan dengan fasilitas limbah tambangnya, termasuk kegagalan pipa saluran limbah dan bendungan limbah tambang? Menjalankan audit dan/atau peninjauan pihak ketiga terhadap efektivitas langkah-langkah yang sudah diambil untuk mengatasi risiko potensial yang berkaitan dengan fasilitas limbah tambangnya, termasuk rembesan dan kegagalan bendungan limbah tambang? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan dari audit pihak ketiga tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang sudah diambil untuk mengatasi risiko potensial yang berkaitan dengan fasilitas limbah tambangnya, termasuk kegagalan pipa saluran limbah dan bendungan limbah tambang? 	<p>• IFC PS4.6</p>

F.03

Air



Air adalah masalah utama bagi pembangunan yang berkelanjutan dan pertumbuhan ekonomi. Air sangat penting bagi kelangsungan hidup dan ketahanan pangan jangka panjang, dan berjalan berkelindan dengan pembangunan infrastruktur energi. Selain menjadi hak asasi manusia, air bersih mendukung populasi dan ekosistem yang lebih sehat dan lebih produktif.



Air adalah masalah kunci bagi industri pertambangan global. Akses ke pasokan air yang stabil sangat penting bagi operasi pertambangan, tetapi memastikan akses bisa menjadi tantangan tersendiri. Seiring dengan meningkatnya kecemasan global terhadap kelangkaan air dan meluasnya pertambangan ke wilayah yang lebih terbatas airnya, persaingan untuk memperebutkan sumber daya air dapat menimbulkan konflik yang liar dan kadang-kadang penuh kekerasan antara perusahaan tambang dengan masyarakat. Konflik ini sering dihubungkan dengan pelanggaran HAM berat, yang diderita secara tidak adil oleh anggota masyarakat yang terdampak.



Manajemen pembuangan air yang baik, yang berkaitan dengan manajemen bahan-bahan berbahaya dan limbah-tambang yang bertanggung jawab (Lihat F.02 dan F.07), sangat penting di pertambangan. Manajemen air terkait-tambang mencakup pemahaman tentang status kualitas dan kuantitas air saat ini beserta konteks manajemen di lingkungan sekitar tambang dan di daerah DAS atau tangkapan air yang lebih luas; penilaian risiko aktivitas pertambangan terhadap air permukaan dan air bawah tanah; dan pengembangan serta implementasi strategi untuk meminimalkan risiko dan dampak terhadap pengguna air dan ekosistem. Kuantitas dan kualitas air harus dipantau di lokasi tambang dan di lokasi hilir untuk menentukan apakah strategi mitigasi sudah efektif, dan perlu-tidaknya tindakan perbaikan untuk meningkatkan hasil lingkungan.

Industri pertambangan juga semakin menyadari bahwa manajemen air yang efektif bergantung pada keterlibatan para pemangku kepentingan yang positif dan transparan. Dialog terus-menerus

membantu masyarakat memahami kebutuhan air perusahaan, dan membantu perusahaan tambang memahami persyaratan penggunaan air masyarakat serta kebutuhan, ekspektasi, dan prioritas pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penggunaan air dan perlindungan air.

Transparansi seputar dampak penggunaan air dan kualitas air menjadi ekspektasi bagi para pemangku kepentingan pertambangan, dan kini sudah menjadi praktik standar bagi perusahaan untuk melaporkan masalah air secara umum. Namun beberapa perusahaan menunjukkan keteladanan seputar transparansi air dengan menjadikan data pemantauan air dapat diakses oleh masyarakat yang terdampak dan khalayak umum.

Ketakutan akan pencemaran air bisa memicu perlawanan terhadap proyek-proyek pertambangan, dan peristiwa pencemaran aktual bisa merusak sumber mata pencaharian, merusak hubungan positif perusahaan-masyarakat, dan menciptakan biaya serta kewajiban hukum dan keuangan jangka pendek dan jangka panjang bagi perusahaan tambang. Konflik yang berkaitan dengan air menimbulkan risiko reputasi, operasional, hukum, kemanusiaan, dan keuangan bagi proyek-proyek pertambangan. Perusahaan tambang yang melibatkan masyarakat ke dalam perencanaan, manajemen, dan pemantauan air, serta transparan terkait dampak air lebih berpeluang mampu menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat yang memang diperlukan untuk menghindari konflik dan menjaga izin sosial untuk beroperasi.

Implementasi praktik manajemen air yang terdepan dari segi teknis dan sosial, seperti meningkatkan efisiensi penggunaan air, juga dapat membantu perusahaan mengurangi biaya operasional dan denda lingkungan potensial, mempercepat proses perizinan, memfasilitasi perluasan pertambangan, mengamankan akses ke sumber daya (air, bijih tambang, tanah), dan mempertahankan atau meningkatkan reputasi perusahaan. ■

<p>F.03.1 Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu merancang dan mengimplementasikan strategi dan rencana pemeliharaan air, berdasarkan pendekatan daerah tangkapan air, untuk mengatasi keamanan air di wilayah yang terdampak bagi pengguna air saat ini dan yang akan datang serta lingkungan.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana pemeliharaan air, berdasarkan pendekatan daerah tangkapan air, untuk menghormati kebutuhan air dan hak pengguna air saat ini dan yang akan datang serta lingkungan? Menerapkan sistem agar operasinya mampu mengajak konsultasi pengguna air yang berpotensi terdampak ke dalam pengembangan strategi dan rencana pemeliharaan air tersebut? Melacak implementasi strategi pemeliharaan air ini secara sistematis? 	<ul style="list-style-type: none"> • GRI 303 • IFC PS3.6; PS3.9
<p>F.03.2 Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya dalam mengurangi konsumsi air.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam mengurangi konsumsi air? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi konsumsi air? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mengurangi konsumsi air? 	<ul style="list-style-type: none"> • GRI 303
<p>F.03.3 Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya dalam mengurangi dampak buruk terhadap kualitas air.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam mengurangi dampak buruk terhadap kualitas air? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak buruk terhadap kualitas air? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mengurangi dampak buruk terhadap kualitas air? 	<ul style="list-style-type: none"> • GRI 306

F.04 Kebisingan dan Getaran



Kebisingan adalah sumber umum keprihatinan masyarakat terkait dengan pertambangan. Selama tahap operasional pertambangan, kebisingan bisa timbul 24 jam dalam sehari, tujuh hari dalam seminggu, dan pertambangan bisa beroperasi selama bertahun-tahun. Sumber kebisingan dan getaran terkait pertambangan yang berpotensi besar meliputi helikopter yang digunakan selama eksplorasi, peralatan berat yang digunakan selama pembangunan tambang, pengeboran, peledakan, pemuatan dan pembuangan bongkahan batu, penyaringan dan peremukan, serta pengangkutan mineral (misalnya, lori untuk rel, jalan, dan sabuk konveyor).

Kebisingan bisa menimbulkan efek samping terhadap kesehatan manusia, meliputi penyakit terkait stres, gangguan tidur, tekanan darah tinggi, hilangnya pendengaran, dan kelainan wicara. Kebisingan juga bisa menimbulkan efek sosial dan perilaku, meliputi kejengkelan, yang merupakan indikator yang diterima luas dari gangguan kesehatan manusia yang berkaitan dengan kebisingan lingkungan. Tambahan lagi, getaran dari ledakan dan lalu lintas truk berat sering dirasakan oleh warga sekitar, dan dikaitkan, atau diduga sebagai penyebab, kerusakan struktural terhadap rumah-rumah yang berada di dekat lokasi tambang.

Satwa liar mungkin juga terdampak oleh kebisingan antropogenik. Pertambangan atau sumber kebisingan industri yang lain bisa menyebabkan peningkatan stres, gangguan perilaku alami, kerusakan pendengaran sementara atau permanen, perubahan keberhasilan perkembangbiakan, dan penghindaran habitat yang cocok. Dampak terhadap satwa liar dapat, pada gilirannya, menimbulkan implikasi bagi Masyarakat Adat atau masyarakat lokal yang sumber makanannya ikut terdampak.

Agar dapat menyelesaikan masalah kebisingan dan getaran, perusahaan tambang biasanya melibatkan penilaian kebisingan sebagai bagian dari penilaian dampak lingkungan dan sosial mereka,

dan menjalankan studi kebisingan patokan untuk mendapatkan pemahaman tentang kondisi kebisingan pratambang di masyarakat dan area operasi proyek. Beberapa pemerintah nasional atau subnasional mungkin menerapkan peraturan kebisingan dan getaran. Namun tanpa keberadaan regulasi sekalipun, ada standar yang sudah diterima secara internasional yang dapat membantu perusahaan tambang mengukur tingkat kebisingan dan getaran yang dapat diterima di rumah, sekolah, atau “penerima” kebisingan lain di sekitar.

Ada bermacam-macam langkah mitigasi yang dapat ditempuh untuk meminimalkan efek kebisingan dan getaran terkait tambang terhadap masyarakat dan satwa liar, meliputi pembatasan sumber kebisingan yang sangat keras atau getaran kuat yang sudah dikenali, seperti ledakan, pada jam-jam kerja siang hari, serta peredaman atau pengontrolan kebisingan dan getaran hanya di sumber saja.

Masalah kebisingan dan getaran sebaiknya dibicarakan sejak awal pelibatan para pemangku kepentingan (Lihat D.03), dan di sepanjang siklus hidup pertambangan. Masyarakat kemungkinan lebih bisa menerima kebisingan dan getaran terkait tambang jika perusahaan bersikap transparan dan bekerja sama dengan mereka untuk mengembangkan strategi mitigasi yang dapat diterima. Jika keprihatinan masyarakat tidak dipertimbangkan atau diselesaikan secara memadai, permasalahan ini bisa memicu perlawanan masyarakat terhadap operasi tambang, dan menciptakan ketegangan besar terhadap hubungan masyarakat-perusahaan.

Meskipun membutuhkan investasi modal di awal, beberapa strategi mitigasi kebisingan dan getaran pada akhirnya dapat menghemat biaya bagi perusahaan dalam bentuk efisiensi yang meningkat dan kesehatan serta keselamatan kerja yang lebih baik. Manajemen kebisingan dan getaran yang efektif juga memberi keuntungan bagi industri yang lebih besar dengan memperbaiki sikap masyarakat terhadap aktivitas pertambangan. ■

F.04.1**Tindakan**

Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu membatasi dampak kebisingan dan getaran terhadap masyarakat, struktur bangunan, properti, dan satwa liar yang terdampak.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya:

- a. Secara rutin menilai, berdasarkan data awal/angka dasar, tingkat kebisingan dan getaran yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka?
- b. Mengembangkan strategi dan rencana untuk membatasi dampak kebisingan dan getaran yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka terhadap wilayah di sekitarnya?
- c. Secara sistematis melibatkan masyarakat yang terdampak dan para pemangku kepentingan yang lain ke dalam pengembangan strategi tersebut?

F.05 Keragaman Hayati dan Jasa Lingkungan



Keanekaragaman biologis – atau keanekaragaman hayati – mengacu pada keragaman tanaman, binatang, dan mikroorganisme yang hidup, gen yang dikandungnya, dan ekosistem yang menjadi habitat hidupnya. Ekosistem yang secara genetik beragam dan kaya-spesies lebih tahan dan mudah beradaptasi dengan tekanan dari luar, serta memiliki kemampuan yang lebih besar untuk pulih dari gangguan seperti banjir, kebakaran, dan penyakit. Keanekaragaman hayati memainkan peran penting dalam menstabilkan iklim bumi; berkontribusi bagi sumber mata pencaharian dan perekonomian yang berkelanjutan; dan menciptakan kondisi-kondisi yang memungkinkan tumbuh suburnya keragaman budaya.

Pemeliharaan keanekaragaman hayati global sangat relevan bagi masyarakat perdesaan di negara-negara berkembang dan bagi Masyarakat Adat, yang sumber mata pencaharian dan kelangsungan hidupnya sangat bergantung pada jasa lingkungan yang didukung melalui keanekaragaman hayati, seperti makanan, nutrisi, obat-obatan, bahan bakar, serat, kontrol makanan, air minum bersih, dan situs sakral.

Perusahaan tambang, seperti halnya bisnis lain dan masyarakat secara keseluruhan, mengandalkan ekosistem dan jasa yang diberikannya. Namun pertambangan juga berpotensi memengaruhi keanekaragaman hayati secara langsung, misalnya melalui penebangan pepohonan untuk jalan, penggundulan hutan primer dan lahan untuk mengakses tambang bijih, konversi lahan, lahan basah, atau perairan menjadi situs pembuangan limbah, dan pembuangan produk limbah ke lingkungan baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Juga mungkin dijumpai dampak tidak langsung pertambangan terhadap keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, seperti meningkatnya tekanan terhadap satwa liar untuk

perdagangan atau dimakan ketika jalan-jalan tambang dibangun di wilayah yang sebelumnya tidak bisa diakses, atau gencarnya pembukaan lahan akibat migrasi masuk pekerja tambang atau pihak-pihak lain yang mencari peluang ekonomi.

Kesadaran yang meningkat akan dampak potensial langsung, tidak langsung, dipicu, dan kumulatif dari pertambangan terhadap keanekaragaman hayati dan akan ketergantungan perusahaan pada keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan mendorong banyak perusahaan tambang untuk melakukan penilaian keanekaragaman hayati dan mengembangkan sistem serta pendekatan untuk menghindari habitat penting dan wilayah keanekaragaman hayati utama bilamana memungkinkan.

Beberapa perusahaan tambang juga menerapkan “hierarki mitigasi” sebagai sarana untuk mengelola risiko keanekaragaman hayati. Hierarki mitigasi adalah sebuah kerangka kerja yang diakui secara internasional yang memprioritaskan penghindaran dampak terhadap keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan, dan, jika hal itu mustahil dilakukan, beralih ke minimalisasi, restorasi, dan, sebagai solusi terakhir, penggantian dampak residu. Meskipun mitigasi dampak adalah sebuah proses interaktif di sepanjang siklus hidup proyek, peluang terbesar untuk menghindari dampak ada di tahap perencanaan pengembangan.

Penggantian (offsetting) adalah opsi terakhir dalam hierarki karena membawa serentetan risiko, meliputi ketidakpastian keberhasilan, tantangan ekonomi dan tata kelola untuk mempertahankan pengganti secara terus-menerus tanpa henti, dan potensi proyek pengganti yang diusulkan tidak dapat diterima secara budaya oleh pemangku kepentingan yang bersangkutan. Ketika ditempuh, penggantian harus dirancang dengan cermat dan dipandu oleh

prinsip-prinsip seperti penggantian keanekaragaman hayati yang terdampak berdasarkan prinsip setara-secara-ekologis, sebanding, atau lebih baik; tidak boleh ada kerugian bersih dan lebih disukai perolehan bersih keanekaragaman hayati; konsultasi dengan para pemangku kepentingan untuk menentukan ganti yang dapat diterima; dan penciptaan mekanisme jangka panjang untuk membiayai proyek-proyek pengganti.

Seperti halnya semua sistem manajemen lingkungan yang bertanggung jawab, identifikasi risiko, pengembangan strategi mitigasi dan rencana pemantauan yang efektif meliputi keterlibatan pemangku kepentingan yang relevan. Tindakan juga dapat dirancang atau ditinjau oleh pakar biologi berpengalaman dan spesialis lain untuk memastikan pengoptimalan mitigasi sesuai dengan hierarki. Perusahaan semakin giat menugaskan audit atau pengawasan eksternal independen untuk memastikan apakah strategi manajemen keanekaragaman hayati mereka sudah diimplementasikan secara efektif. Pengawasan eksternal semacam itu merupakan sarana yang bermanfaat dalam membangun

kepercayaan dan keyakinan diri pemangku kepentingan bahwa aktivitas pertambangan tidak menimbulkan ancaman besar terhadap keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan penting.

Dalil bisnis untuk manajemen keanekaragaman hayati yang bertanggung jawab tergolong kuat. Perusahaan yang menempuh pendekatan manajemen proaktif terhadap keanekaragaman dan jasa lingkungan akan meraih keunggulan kompetitif karena aturan regulasi di wilayah-wilayah dengan tekanan tinggi pada keanekaragaman hayati bergeser ke kebijakan yang lebih protektif. Perusahaan yang memperlihatkan praktik manajemen yang baik, termasuk penerapan hierarki mitigasi dan audit eksternal terhadap praktik manajemennya, akan mendapatkan akses yang lebih mudah dan lebih murah ke modal, tanah, dan sumber daya. Pendekatan yang kuat terhadap perlindungan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan membantu membangun kepercayaan dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, pemerintah negara produsen, dan para pemangku kepentingan yang lain, sehingga memperkuat izin sosial perusahaan untuk beroperasi. ■

<p>F.05.1 Komitmen</p>	<p>Perusahaan berkomitmen untuk tidak melakukan eksplorasi atau menambang di Situs Warisan Dunia dan untuk menghormati kawasan lindung bumi dan maritim yang lain yang ditetapkan untuk melestarikan warisan budaya atau alam.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk tidak melakukan eksplorasi atau menambang di Situs Warisan Dunia dan untuk menghormati kawasan lindung bumi dan maritim yang lain yang ditetapkan untuk melestarikan warisan budaya atau alam? Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini? Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini? 	<p>• IFC PS8</p>
<p>F.05.2 Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya terkait manajemen keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam manajemen keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengelola keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mengelola keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan? 	<p>• GRI Pengungkapan 304-3 • IFC PS6.7</p>

F.06 Perubahan Iklim dan Efisiensi Energi



Perubahan iklim adalah isu global, tetapi efeknya tidak tersebar rata di seluruh dunia atau di dalam negara-negara tertentu. Negara-negara berkembang sering terdampak secara parah, dan Masyarakat Adat serta kelompok-kelompok miskin dan rawan di dalam masyarakat terlebih-lebih rawan terhadap dampak perubahan iklim.



Karena dunia mengalami peningkatan dampak yang berkaitan dengan perubahan iklim, seperti perubahan presipitasi (curah hujan), meningkatnya frekuensi peristiwa ekstrem, naiknya tingkat suhu dan permukaan air laut, perusahaan tambang dituntut oleh investor dan para pemangku kepentingan tambang untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan risiko dan dampak terkait iklim.



Di sektor pertambangan mineral dan logam, sebagian besar emisi gas rumah kaca berkaitan langsung dengan konsumsi energi, yang emisinya utamanya diproduksi melalui pembakaran bahan bakar fosil untuk menghangatkan/menerangi bangunan dan mengoperasikan tambang serta peralatan pengolahan dan kendaraan. Pertambangan merupakan proyek yang padat energi, dan konsumsi energi masa depan diprediksi akan meningkat di sektor pertambangan karena deposit bijih tambang yang layak menjadi semakin dalam dan berkadar lebih rendah. Pertambangan batu bara menimbulkan emisi gas rumah kaca tambahan seperti pelepasan metana bebas atau karbon dioksida selama penambangan, dan emisi gas rumah kaca susulan yang ditimbulkan oleh pembakaran batu bara. Pertambangan juga dapat menimbulkan tambahan neto karbon ke atmosfer melalui hilangnya "kolam karbon" seperti hutan, yang juga menimbulkan dampak pada keanekaragaman hayati (Lihat F.05).

Banyak pihak di dalam industri pertambangan menyadari tantangan global yang berkaitan dengan emisi gas rumah kaca dan perubahan iklim. Perusahaan tambang juga semakin giat memantau dan melaporkan secara publik penggunaan energi dan

emisi gas rumah kacanya, dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi penggunaan energi dan emisi dengan menggunakan energi terbarukan dan mengadopsi teknologi rendah emisi, serta meningkatkan efisiensi energi. Beberapa perusahaan juga mulai bekerja sama dengan masyarakat untuk menilai risiko dan mengembangkan strategi untuk merencanakan, memitigasi, dan beradaptasi dengan perubahan iklim.

Ada banyak manfaat potensial bagi perusahaan yang secara proaktif mengurangi konsumsi energi, emisi gas rumah kaca, dan ketergantungan bahan bakar fosil. Perusahaan yang mencurahkan diri sejak awal untuk mengambil langkah-langkah efisiensi energi dapat merasakan keunggulan kompetitif daripada perusahaan yang ketinggalan dalam hal tersebut, karena efisiensi yang lebih tinggi dapat membantu melindungi perusahaan dari biaya bahan bakar yang meningkat, meredam dampak regulasi yang dapat membatasi atau memberlakukan harga pada emisi karbon, sehingga menghasilkan kinerja pasar yang lebih baik.

Selain itu, pertambangan yang diusulkan di wilayah-wilayah yang rawan perubahan iklim semakin besar peluangnya menghadapi skeptisisme dari perusahaan asuransi dan investor. Hasilnya, perusahaan yang transparan dalam hal emisi gas rumah kaca, target penurunan emisi, dan strategi adaptasi iklimnya, dan yang dapat memperlihatkan rekam jejak positif perihal pengurangan emisi dan peningkatan efisiensi energi, lebih besar kemungkinannya dipandang kondusif oleh perusahaan asuransi, investor, dan masyarakat di wilayah-wilayah yang rawan, atau di tempat mana pun mereka hendak beroperasi. Perusahaan yang secara proaktif mengembangkan strategi untuk beradaptasi dengan perubahan iklim juga dapat berkontribusi bagi tujuan pembangunan yang berkelanjutan terkait penurunan angka kemiskinan dan tindakan iklim (SDG1 dan SDG13). ■

<p>F.06.1 Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi implikasi perubahan iklim dari dampak operasi tambangnya saat ini dan yang akan datang terhadap masyarakat, pekerja, dan lingkungan, serta untuk merancang dan mengimplementasikan strategi adaptasi dan transisi yang tepat.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan melaporkan potensi implikasi perubahan iklim dari dampak operasi tambangnya saat ini dan yang akan datang terhadap masyarakat, pekerja, dan lingkungan? Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna mengatasi implikasi tersebut? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis? 	<ul style="list-style-type: none"> • IFC PS1.7; PS4.8
<p>F.06.2 Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengatasi emisi gas rumah kaca (GRK) yang ditimbulkan oleh aktivitas dan penggunaan energinya.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam mengatasi emisi gas rumah kaca (GRK) yang ditimbulkan oleh aktivitas dan penggunaan energinya? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi emisi GRK yang ditimbulkan oleh aktivitas dan penggunaan energinya? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan terus-menerus efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mengatasi emisi GRK yang ditimbulkan oleh aktivitas dan penggunaan energinya agar dapat meminimalkannya? 	<ul style="list-style-type: none"> • GRI Pengungkapan 305-5 • IFC PS3.7; PS3.8 • SASB NR0302-02
<p>F.06.3 Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola konsumsi energi di sepanjang operasinya.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam mengelola konsumsi energi di sepanjang operasinya? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengelola konsumsi energi di sepanjang operasinya? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mengelola konsumsi energi di sepanjang operasinya? 	<ul style="list-style-type: none"> • GRI 302 • IFC PS3.6

F.07

Manajemen Bahan-Bahan Berbahaya



Bahan-bahan berbahaya adalah bahan-bahan yang membawa risiko bagi kesehatan manusia, harta benda, atau lingkungan akibat karakteristik fisik atau kimiawinya. Ada banyak sekali bahan-bahan yang berpotensi berbahaya yang dihasilkan atau digunakan oleh operasi pertambangan.

Beberapa zat berbahaya, seperti air raksa, arsen, timbal, atau kadmium, menjadi semakin banyak tersedia akibat pertambangan. Misalnya, air raksa, yang berkaitan dengan deposit emas, perak, tembaga, atau seng, bisa terangkut selama pembakaran atau pengolahan, atau lepas atau lolos ke tanah, air, atau udara dari limbah tambang. Asam sulfat, zat kimia yang sering digunakan dalam pengolahan bijih tambang dan merupakan produk sampingan dari bijih tambang yang mengandung sulfida, bisa menyebabkan drainase asam dan lepasnya logam berat ke lingkungan.

Zat-zat kimia berbahaya lainnya digunakan untuk mengekstraksi logam dan mineral dari bijih tambang. Misalnya, sianida lazimnya digunakan untuk mengolah emas dan perak, dan bisa menjadi reagen pengolah kecil pada pertambangan logam basa. Sianida, jika lepas di tempat kerja atau lingkungan, bisa mematikan banyak organisme hidup. Asam nitrat, amonium nitrat, dan minyak bakar sering digunakan sebagai bahan peledak. Selain berpotensi menjadi pencemar lingkungan, zat-zat peledak tersebut bisa menimbulkan risiko keamanan bagi perusahaan, dan seyogianya dikelola dengan semestinya.

Semua bahan berbahaya membutuhkan manajemen risiko kesehatan kerja, lingkungan, dan sosial yang matang di sepanjang

siklus hidup tambang - termasuk selama penambangan, pengangkutan, penyimpanan, penggunaan, produksi, dan pembuangan. Manajemen bahan-bahan berbahaya yang bertanggung jawab lazimnya memprioritaskan penghindaran, seperti dengan menggunakan zat-zat dan proses kimia yang lebih aman sebagai pengganti. Jika penghindaran mustahil dilakukan, praktik utama berupa minimalisasi penggunaan atau produksi bahan-bahan berbahaya, dan pencegahan serta kontrol pelepasan dan kecelakaan.

Tujuan ini bisa dicapai melalui penilaian bahaya secara terus-menerus dan persiapan rencana manajemen risiko bahan-bahan berbahaya. Langkah-langkah selanjutnya meliputi implementasi tindakan seperti program pendidikan dan pelatihan bagi pekerja, kontraktor, dan masyarakat; inspeksi dan pemeliharaan peralatan dan fasilitas; pemantauan konsentrasi bahan-bahan berbahaya dalam limbah; dan pengembangan prosedur untuk mengatasi risiko residual yang tidak bisa dicegah atau dikontrol.

Jika tidak dikelola dengan semestinya, lepasnya zat-zat berbahaya di tempat kerja atau lingkungan bisa menimbulkan dampak negatif berat dan jangka panjang terhadap kualitas air, kesehatan ekosistem, pekerja, dan masyarakat lokal. Lepasnya zat-zat berbahaya juga dapat menimbulkan rentetan masalah keuangan dan reputasi bagi perusahaan atau pemerintah yang harus menanggung biaya pemulihan pencemaran dan memberikan ganti rugi bagi pekerja atau anggota masyarakat yang terdampak. ■

<p>F.07.1</p> <p>Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan menilai risiko potensial yang berkaitan dengan pengangkutan, penanganan, penyimpanan, emisi, dan pembuangan bahan-bahan berbahaya, dan untuk merancang serta mengimplementasikan strategi dan rencana untuk mengatasi risiko yang sudah teridentifikasi.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan berbahaya? Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna mengatasi risiko ini? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis? 	<p>• IFC PS3.13</p>
---	--	---------------------

F.08

Kesiapan Kedaruratan



Pertambangan skala besar membawa risiko operasional yang besar. Pembuangan atau tumpahan zat-zat kimia berbahaya, kegagalan bendungan limbah tambang, ledakan, kebakaran, dan sekian banyak kecelakaan potensial lain menimbulkan risiko bagi pekerja tambang dan masyarakat di sekitar. Kecelakaan bisa terjadi karena kesalahan manusia, kegagalan peralatan, atau manajemen limbah tambang atau bahan-bahan berbahaya yang buruk (Lihat F.02 dan F.07). Kekuatan alam, seperti gempa bumi, banjir, tornado, atau kebakaran hutan juga bisa menyebabkan atau memperparah kondisi darurat di operasi tambang.

Kecelakaan atau insiden terkait tambang bisa menyebabkan dampak yang besar dan jangka panjang, meliputi kerusakan lingkungan, kerusakan harta benda, cedera, hilangnya nyawa, dan trauma psikologis. Kecelakaan/insiden tersebut juga bisa menyebabkan kerugian keuangan yang besar bagi masyarakat, pemerintah, dan perusahaan, dan rusaknya citra industri pertambangan secara keseluruhan.

Kendatipun upaya terbaik sudah dilakukan, kecelakaan dan kondisi darurat terkait tambang tidak pernah bisa dicegah sepenuhnya. Namun perusahaan tambang, bekerja sama dengan pemerintah lokal, pekerja, dan masyarakat, dapat mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan manajemen krisis dan kesiagaan gawat darurat, program pelatihan, dan prosedur untuk meminimalkan konsekuensi negatif dari gawat darurat tersebut.

Panduan telah dikembangkan untuk membantu perusahaan tambang mempersiapkan diri, pekerja, dan masyarakat lokal untuk menghadapi gawat darurat terkait tambang. Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNEP) dan program lain telah menganjurkan agar perusahaan menempuh pendekatan

kolaboratif terhadap perencanaan tanggap darurat yang melibatkan pihak berwenang lokal, para petugas tanggap darurat, dan anggota masyarakat dalam mengidentifikasi potensi kecelakaan terkait tambang; pengembangan strategi untuk mengurangi dan mengelola risiko yang teridentifikasi; dan penyusunan rencana tanggap darurat. Untuk meningkatkan efektivitas rencana tanggap darurat, perusahaan tambang dapat mengujinya bersama pihak-pihak yang berpeluang terimbas dan mengomunikasikannya ke masyarakat secara umum agar para pelaku utama sudah siap sedia menanggapi beraneka ragam keadaan gawat darurat secara efektif.

Pendekatan tanggap darurat yang bersifat kolaboratif dapat membantu mengurangi ketakutan masyarakat terhadap dampak potensial terkait pertambangan, mengurangi risiko bagi masyarakat yang rentan yang sering terdampak paling parah dan paling lama oleh bencana dan gawat darurat, dan menumbuhkan kepercayaan dan keyakinan yang lebih besar antara operasi pertambangan dengan masyarakat. Jika terjadi kecelakaan terkait pertambangan, tanggap darurat yang terencana dengan baik dapat mengurangi korban jiwa, membatasi dampak terhadap harta benda dan lingkungan, dan meminimalkan kerugian keuangan bagi perusahaan.

Kesiapan keuangan merupakan komponen tambahan dari kesiapsiagaan darurat yang penuh tanggung jawab. Bagi perusahaan, praktik utamanya adalah mengantisipasi dan membekali diri untuk biaya pemulihan dari kecelakaan atau bencana alam, menjamin ketersediaan dana untuk mengimplementasikan tanggap darurat yang efektif, membayar ganti rugi atas kerusakan, cedera, atau hilangnya nyawa, dan perusahaan hendaknya membiayai pemulihan serta rekonstruksi secara tepat waktu dan efisien. ■

<p>F.08.1</p> <p>Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu melibatkan otoritas lokal, pekerja, dan masyarakat ke dalam pengembangan, pengomunikasian, dan pengujian kesiapan kedaruratan dan rencana tanggap darurat.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengembangkan dan mempertahankan kesiapan kedaruratan dan rencana tanggap darurat? Melibatkan pemangku kepentingan lokal secara sistematis (misalnya, otoritas dan masyarakat lokal) ke dalam perancangan rencana tanggap darurat? Secara sistematis melibatkan pemangku kepentingan lokal ke dalam pengujian rencana tanggap darurat ini? 	<ul style="list-style-type: none"> • ILO C176 • IFC PS1.20; PS1.21
<p>F.08.2</p> <p>Tindakan</p>	<p>Perusahaan secara publik mengungkapkan semua Informasi yang relevan tentang jaminan keuangan yang diberikan untuk manajemen dan pemulihan bencana, di sepanjang operasinya.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Secara publik mengungkapkan semua Informasi yang relevan tentang jaminan keuangan yang diberikan untuk manajemen dan pemulihan bencana? Menyertakan ketentuan jaminan keuangan khusus ke dalam informasi yang diungkap ini yang dipilah berdasarkan lokasi tambang? Memperbarui informasi ini setiap tahun? 	<ul style="list-style-type: none"> • IFC PS1.21



MS Indikator lokasi tambang dan pertanyaan metrik



Subbagian ini meliputi sepuluh indikator lokasi tambang RMI 2020, berikut profil dan pertanyaan metriknya. Pertanyaan tersebut menilai tingkat keberhasilan perusahaan yang mengoperasikan lokasi tambang dalam membagikan informasi yang memiliki kepentingan khusus kepada masyarakat yang terdampak tambang, dan melibatkan masyarakat dalam permasalahan tersebut. Para pemangku kepentingan yang lain, seperti investor, lembaga pembiayaan, manufaktur, masyarakat sipil, pekerja, dan pemerintah juga tertarik pada jenis informasi yang dipilah-pilah sesuai lokasi tambang yang diulas dalam indikator ini.

MS.01 Tenaga Kerja Lokal

MS.01 *Pengungkapan publik atas data angkatan kerja yang sudah dipilah-pilah memudahkan perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka dalam mencurahkan perhatian bagi pembangunan ekonomi masyarakat lokal dan memastikan bahwa perekrutan dan praktik di tempat kerja tidak merugikan kaum perempuan. Karena pekerja kontrak semakin lazim digunakan di seluruh industri pertambangan, perusahaan perlu membedakan data angkatan kerja mereka agar dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kondisi tenaga kerja.*

- Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan jumlah karyawannya yang diambil dari masyarakat lokal?
- Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan jumlah pekerja kontraknya yang diambil dari masyarakat lokal?
- Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan jumlah pekerja perempuannya yang diambil dari masyarakat lokal?

MS.02 Pengadaan Lokal

MS.02 *Pengambilan barang dan jasa secara lokal akan mendukung pengembangan bisnis dan pertumbuhan ekonomi di wilayah lokal, di samping juga berpotensi mengurangi biaya pengadaan dalam jangka panjang. Pengungkapan dan diskusi publik tentang data pengadaan lokal memudahkan bisnis lokal mengidentifikasi peluang untuk menjadi pemasok bagi lokasi tambang, dan masyarakat lokal untuk melibatkan diri dalam upaya-upaya perusahaan untuk menciptakan ruang bersaing yang sehat bagi pemasok lokal.*

- Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan jumlah uang yang dibelanjakan untuk barang dan jasa dari provinsi/negara bagian lokal?
- Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan jenis barang dan jasa yang diperoleh dari provinsi/negara bagian lokal?
- Apakah perusahaan mendiskusikan target programnya untuk pengadaan lokal dengan masyarakat lokal?

MS.03 Perencanaan Pascapenutupan

MS.03

Perencanaan warisan yang positif menuntut langkah-langkah untuk memastikan masyarakat yang terdampak proyek memiliki sumber mata pencaharian yang layak dan berkelanjutan setelah penutupan tambang. Ini meliputi rencana untuk menjaga atau membangun kembali akses ke sumber daya alam yang sehat (tanah, air, dll.) dan peluang ekonomi. Proses perencanaan penutupan tambang yang efektif meliputi komunikasi yang terbuka dengan masyarakat terdampak dan pelibatan masyarakat tersebut ke dalam penetapan tujuan penutupan dan pengembangan rencana tindakan.

- Apakah perusahaan sudah memberi tahu masyarakat yang terdampak tentang kapan operasi pertambangan akan dihentikan atau ditutup secara permanen?
- Apakah perusahaan melibatkan masyarakat yang terdampak dalam menyusun rencana pascapenutupan?
- Apakah perusahaan mendiskusikan implementasi rencana pascapenutupannya dengan masyarakat lokal?

MS.04 Keluhan Masyarakat

MS.04

Mekanisme keluhan masyarakat merupakan proses formal yang memungkinkan individu atau kelompok dari masyarakat yang terdampak proyek untuk mengadukan keprihatinan dan mencari penyelesaian atas dampak negatif dari aktivitas perusahaan tambang. Mekanisme ini memungkinkan perusahaan untuk mengetahui dan menanggapi keprihatinan tersebut tepat waktu. Anggota masyarakat kemungkinan besar akan percaya dan menggunakan mekanisme tersebut jika perusahaan mengungkapkan pola penggunaan mekanismenya, dan cara perusahaan menyelesaikan permasalahan yang sudah diadukan berulang kali.

- Apakah perusahaan memiliki mekanisme keluhan bagi masyarakat lokal dan individu untuk mengadukan hal-hal yang menjadi keprihatinan?
- Apakah perusahaan secara publik mengungkap jumlah dan jenis keluhan yang diadukan oleh masyarakat dan individu lokal?
- Apakah perusahaan mendiskusikan langkah-langkah yang diambilnya dengan masyarakat lokal untuk menghindari agar keluhan yang sama tidak diadukan berulang kali?

MS.05 Keluhan Pekerja

MS.05

Mekanisme keluhan yang efektif bagi pekerja memberikan proses penyimakian dan penyelesaian yang adil sehingga pekerja bisa merasa puas karena keluhan mereka didengar dan ditanggapi secara serius, yang menghasilkan hubungan kerja yang lebih konstruktif. Perusahaan tambang bisa menumbuhkan kepercayaan pada proses keluhan dengan mengungkapkan pola penggunaan mekanisme keluhan dan cara perusahaan menyelesaikan permasalahan yang sudah berulang kali diadukan.

- Apakah perusahaan memiliki mekanisme keluhan bagi pekerjanya untuk mengadukan hal-hal yang menjadi keprihatinan?
- Apakah perusahaan secara publik mengungkap jumlah dan jenis keluhan yang diadukan oleh pekerjanya?
- Apakah perusahaan mendiskusikan langkah-langkah yang diambilnya dengan perwakilan pekerja untuk menghindari agar keluhan yang sama tidak terus-menerus diadukan?

MS.06 Kualitas Udara

MS.06

Bagi kebanyakan masyarakat yang terdampak proyek, pencemaran udara merupakan masalah besar yang berkaitan dengan kehadiran operasi tambang karena memengaruhi kesehatan, sistem makanan, dan, dalam beberapa kasus, sumber mata pencaharian mereka. Pengungkapan rutin data kualitas udara yang khas-tambang dan diskusi dengan masyarakat tentang manajemen perusahaan terhadap kualitas udara dapat menunjukkan kewarganegaraan yang baik dan membantu menumbuhkan kepercayaan serta mengurangi ketakutan terhadap debu dan zat-zat pencemar udara.

- Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan, secara rutin, data kualitas udara untuk setiap titik pemantauan?
- Apakah perusahaan menyoroti kapan dan di mana kualitas udara mengalami penurunan di bawah batas aman?
- Apakah perusahaan mendiskusikan tindakan yang diambilnya dengan masyarakat yang terdampak untuk menangani kualitas udara?

MS.07 Kualitas Air

MS.07

Meskipun kini sudah menjadi praktik standar bagi perusahaan tambang untuk melaporkan secara umum kualitas air, perusahaan bisa menjadikan informasi ini jauh lebih bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak dengan secara rutin mengungkapkan data kualitas air di setiap titik pemungutan data tersebut. Perusahaan juga dapat menunjukkan kewarganegaraan yang baik dan membantu menumbuhkan kepercayaan dengan memerinci waktu dan tempat kualitas air mengalami penurunan di bawah batas baku, dan dengan mendiskusikan upaya-upaya yang diambil untuk mengatasi kualitas air dengan masyarakat yang terdampak.

- Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan, secara rutin, data kualitas air untuk setiap titik pemantauan?
- Apakah perusahaan menyoroti kapan dan di mana kualitas air mengalami penurunan di bawah batas aman?
- Apakah perusahaan mendiskusikan tindakan yang diambilnya dengan masyarakat yang terdampak untuk mengatasi kualitas air?

MS.08 Kuantitas Air

MS.08

Persaingan untuk memperebutkan sumber daya air merupakan sumber konflik antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang terdampak, khusus di wilayah-wilayah yang langka air. Perusahaan dapat menunjukkan kewarganegaraan yang baik dan menghormati masyarakat yang terdampak dengan mengungkapkan jumlah air yang diambilnya dan dengan mendiskusikan dengan masyarakat yang terdampak bahwa tingkat konsumsi air mereka tetap memperhatikan kebutuhan air para pemangku kepentingan lokal tersebut, dan tentang upaya mereka untuk mengurangi konsumsi air.

- Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan, secara rutin, jumlah air yang diambilnya dari lingkungan?
- Apakah perusahaan mendiskusikan cara mengelola kebutuhan air dengan masyarakat yang terdampak?
- Apakah perusahaan mendiskusikan tindakan yang diambilnya dengan masyarakat yang terdampak untuk mengurangi konsumsi airnya?

MS.09 Manajemen Limbah Tambang

MS.09

Fasilitas penyimpanan limbah tambang berpotensi menimbulkan risiko parah bagi pekerja, masyarakat yang terdampak, dan lingkungan. Bendungan limbah tambang yang tidak stabil bisa mengalami kebocoran yang mengakibatkan bencana, melepaskan kuantitas limbah dalam jumlah besar yang bisa mengakibatkan korban jiwa, merusak sungai, mengubur rumah, menghancurkan sumber mata pencaharian, dan menimbulkan dampak serius bagi lingkungan dan masyarakat lokal. Perusahaan dapat membuktikan diri sudah menyikapi masalah ini secara serius dengan mengungkapkan informasi praktis tentang fasilitas limbah tambangnya dan dengan memberi tahu masyarakat lokal tentang prosedur gawat darurat jika terjadi insiden terkait limbah tambang.

- a. Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan lokasi semua fasilitas limbah tambangnya secara akurat?
- b. Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan wilayah mana saja tepatnya yang berpotensi terdampak oleh kegagalan fasilitas limbah tambangnya?
- c. Apakah perusahaan sudah memberi tahu masyarakat yang terdampak tentang tindakan yang harus dilakukan untuk menghadapi insiden terkait limbah tambang?

MS.10 Kesiapan Kedaruratan

MS.10

Meskipun kondisi darurat terkait tambang tidak bisa sepenuhnya dicegah, perusahaan dapat meminimalkan konsekuensi negatif dari kondisi darurat tersebut dengan mengembangkan manajemen krisis dan rencana kesiapan kedaruratan. Prosedur yang terencana akan lebih efektif jika para pemangku kepentingan yang terdampak-proyek (misalnya, anggota masyarakat, otoritas lokal, dan para relawan gawat darurat) diberi tahu tentang tindakan yang akan diambil jika terjadi kondisi gawat darurat dan dilibatkan di dalam pengujian prosedur tersebut.

- a. Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan rencana kesiapan kedaruratan dan tanggap daruratnya?
- b. Apakah perusahaan sudah memberi tahu masyarakat yang terdampak tentang tindakan yang harus dilakukan untuk menghadapi gawat darurat?
- c. Apakah perusahaan melibatkan masyarakat yang terdampak dalam menguji rencana tanggap daruratnya?

Lampiran

Jenis-Jenis Bukti: Contoh-Contoh Jenis Bukti yang relevan untuk indikator

Tabel ini mencantumkan semua indikator dan pertanyaan metrik RMI 2020 dan memperlihatkan, di kolom terakhir, beberapa contoh jenis bukti yang relevan bagi setiap indikator.

A Pembangunan Ekonomi 	
A.01 Perencanaan Pembangunan Sosio-Ekonomi Nasional dan Supranasional	
A.01.1 Komitmen	<p>Perusahaan berkomitmen untuk mempertimbangkan rencana pembangunan sosio-ekonomi nasional dan supranasional dalam membuat keputusan investasi dan bisnis terkait pertambangan di negara-negara produsen, dengan tujuan meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Memformalkan komitmennya, yang telah didukung oleh manajemen senior, untuk memperhatikan rencana pembangunan sosial dan ekonomi di tingkat nasional dan supranasional dalam melakukan penanaman modal dan keputusan bisnis terkait pertambangan di negara produsen, dengan tujuan meningkatkan pembangunan sosial ekonomi? Menugaskan manajemen senior atau direksi untuk mengemban tanggung jawab dan akuntabilitas untuk menjalankan komitmen tersebut? Mengalokasikan sumber daya keuangan dan manusia untuk menjalankan komitmen tersebut?
A.01.2 Tindakan	<p>Jika memungkinkan, perusahaan menerapkan sistem untuk menjamin agar operasinya mampu bekerja secara kolaboratif dengan pemerintah subnasional negara-negara produsen terkait perencanaan pembangunan sosio-ekonomi.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Sudah menerapkan sistem untuk menjamin agar operasinya bekerja sama dengan pemerintah subnasional negara-negara produsen guna mengidentifikasi prioritas pembangunan sosio-ekonomi yang dapat dimainkan peran kolaboratif di dalamnya? Sudah menerapkan sistem untuk menjamin agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna mewujudkan prioritas pembangunan bekerja sama dengan pemerintah subnasional? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis dan kolaboratif dengan pemerintah subnasional?

A.02 Pengadaan Nasional dan Supranasional		
A.02.1 Tindakan	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu menciptakan peluang pengadaan bagi pemasok di tingkat nasional dan supranasional.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi peluang bagi, dan kendala akses ke, pengadaan dari pemasok di tingkat nasional dan/atau supranasional? Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna menciptakan peluang pengadaan bagi pemasok di tingkat nasional dan/atau supranasional? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan Prosedur operasi yang relevan Daftar periksa, pedoman, standar manajemen yang relevan Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses yang relevan Jumlah strategi dan rencana operasi yang sudah dikembangkan berikut status dari proses pengembangan tersebut Bukti lain yang relevan
A.02.2 Efektivitas	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya terkait pengadaan nasional dan supranasional.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan lintas kurun waktu yang berurutan, tentang pengadaan nasional dan supranasionalnya, yang memperlihatkan proporsi dan jumlah yang dibelanjakan? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk menciptakan peluang pengadaan bagi pemasok di tingkat nasional dan/atau supranasional? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna menciptakan peluang pengadaan bagi pemasok di tingkat nasional dan/atau supranasional? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Data tentang jumlah belanja di tingkat nasional dan supranasional dibandingkan dengan total pengadaan, lintas kurun waktu yang berurutan dan berdasarkan target, di sepanjang operasi perusahaan Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin Survei karyawan Mekanisme pemantauan dan evaluasi pemasok Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons Bukti aksi atau prakarsa yang ditempuh sebagai respons Bukti lain yang relevan
A.03 Penelitian dan Pengembangan Kolaboratif		
A.03.1 Tindakan	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk bekerja sama dengan institusi negara produsen di bidang Penelitian & Pengembangan yang bertujuan mengatasi masalah-masalah sosio-ekonomi dan lingkungan terkait pertambangan yang menjadi prioritas.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk bekerja sama dengan institusi negara produsen untuk:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi prioritas Litbang untuk mengatasi dampak sosio-ekonomi dan lingkungan dari pertambangan di dalam negara-negara produsen? Mengembangkan program Litbang untuk menyusun prioritas tersebut? Melacak implementasi program Litbang ini? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Kotak alat, toolkit, atau pedoman yang relevan Daftar periksa, pedoman, standar manajemen yang relevan Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses yang relevan Prosedur operasi yang relevan Informasi tentang upaya-upaya pengembangan keterampilan di dalam konteks pembangunan nasional Bukti lain yang relevan

A.04 Meningkatkan Basis Keterampilan Nasional	
A.04.1 Tindakan	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mendukung pendidikan STEM dan pengembangan kecakapan teknis/kejuruan di kalangan masyarakat yang lebih luas di negara-negara produsen melalui kemitraan dengan institusi dalam negeri.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk menjamin agar operasinya:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mendukung pendidikan STEM di kalangan masyarakat yang lebih luas lewat kerja sama dengan institusi dalam negeri? Mendukung pengembangan kecakapan teknis/kejuruan di kalangan masyarakat yang lebih luas melalui kerja sama dengan institusi dalam-negeri? Memperlihatkan kesesuaian upaya-upaya pengembangan kecakapan mereka dengan agenda pengembangan kecakapan nasional?
A.04.2 Tindakan	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mendukung pengembangan kecakapan teknis dan manajerial tenaga kerja lokalnya di negara-negara produsen.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk menjamin agar operasinya mendukung pengembangan kecakapan teknis tenaga kerja lokalnya di negara-negara produsen? Menerapkan sistem untuk menjamin agar operasinya mendukung pengembangan kecakapan manajerial tenaga kerja lokalnya di negara-negara produsen? Secara sistematis melacak implementasi program pengembangan kecakapan mereka?

- Contoh Jenis Bukti yang relevan**
- Kotak alat, toolkit, atau pedoman yang relevan
 - Daftar periksa, pedoman, standar manajemen yang relevan
 - Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses yang relevan
 - Prosedur operasi yang relevan
 - Informasi tentang upaya-upaya pengembangan keterampilan di dalam konteks pembangunan nasional
 - Bukti lain yang relevan

- Contoh Jenis Bukti yang relevan**
- Kotak alat, toolkit, atau pedoman yang relevan
 - Daftar periksa, pedoman, standar manajemen yang relevan
 - Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses yang relevan
 - Jumlah program pengembangan keterampilan operasional yang sudah dikembangkan berikut status dari program tersebut
 - Bukti lain yang relevan



B Pelaksanaan Bisnis

B.01 Etika Bisnis, Antisuap, dan Antikorupsi

B.01.1

Komitmen

Perusahaan berkomitmen untuk mencegah segala bentuk suap dan korupsi baik langsung maupun tidak langsung.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk mencegah segala bentuk suap dan korupsi baik langsung maupun tidak langsung?
- Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini?
- Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Kebijakan resmi yang didukung oleh manajemen senior
- Laporan dalam dokumen resmi perusahaan (misalnya, kode perilaku, daftar prinsip, sistem manajemen, standar, pedoman khusus, atau kerangka kerja, ...) yang didukung oleh manajemen senior, atau disebutkan secara tersurat dalam dokumen lain yang didukung oleh manajemen senior
- Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang individu/tim/subkomite yang spesifik di tingkat manajemen senior, meliputi deskripsi tentang tanggung jawab dan ruang lingkup
- Prosedur operasi perusahaan meliputi tanggung jawab manajemen senior
- Kelompok kerja/subkomite/departemen/satuan tugas yang mapan yang bertanggung jawab atas implementasi komitmen
- Deskripsi kerja pegawai yang relevan
- Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang mandat bagi saran dari luar
- Informasi terperinci tentang aktivitas yang relevan (pelatihan, lokakarya, prakarsa untuk menumbuhkan kesadaran...)
- Bukti lain yang relevan

B.01.2

Efektivitas

Perusahaan melacak, meninjau, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya terkait antisuap dan antikorupsi.

Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan sudah secara sistematis:

- Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang pencegahan suap dan korupsi, termasuk jumlah dan sifat/bentuk insiden dan tindakan yang diambil sebagai responsnya?
- Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mencegah semua bentuk suap dan korupsi baik langsung maupun tidak langsung?
- Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mencegah segala bentuk suap dan korupsi baik langsung maupun tidak langsung?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Jumlah dan ciri khas insiden di sepanjang kurun waktu berurutan, berikut tindakan yang diambil sebagai respons, di sepanjang operasi perusahaan
- Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal
- Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin
- Survei karyawan
- Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan
- Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi
- Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons
- Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons
- Bukti lain yang relevan

<p>B.01.3 Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk menyempurnakan efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran untuk melaporkan keprihatinan terhadap perilaku yang tidak etis.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kelancaran fungsi dan aplikasi mekanisme pelaporan pelanggaran, termasuk jumlah dan sifat/bentuk insiden dan tindakan yang diambil sebagai responsnya? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas mekanisme pelaporan pelanggaran? 	<p><i>Contoh Jenis Bukti yang relevan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan ciri khas insiden di sepanjang kurun waktu berurutan, berikut tindakan yang diambil sebagai respons, di sepanjang operasi perusahaan Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin Survei karyawan Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons Bukti aksi atau prakarsa yang ditempuh sebagai respons Bukti lain yang relevan
<p>B.02 Pertanggungjawaban dan Keragaman Direksi dan Manajemen Senior</p>		
<p>B.02.1 Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk meminta pertanggungjawaban direksi dan manajer senior secara perseorangan atas pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab terkait masalah-masalah ESG.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah mengambil langkah-langkah khusus untuk memastikan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing anggota dewan direksi dan manajer senior atas pelaksanaan bisnis yang bertanggung jawab terkait permasalahan ESG? Berlakunya persyaratan kompetensi bagi masing-masing anggota manajemen senior utama dan jabatan direksi yang bertanggung jawab atas permasalahan ESG? Pertanggungjawaban masing-masing anggota direksi dan manajer senior atas kelancaran hal-hal tersebut di atas melalui langkah-langkah yang terdokumentasi? 	<p><i>Contoh Jenis Bukti yang relevan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Kerangka Acuan Kerja untuk komite/subkomite yang relevan di tingkat direksi dengan detail tentang ruang lingkup ESG Detail tentang tanggung jawab anggota direksi dan manajer senior atas ESG Fungsi ESG dalam bagan organisasi Detail tentang persyaratan penunjukan (pengalaman, kualifikasi, ...) Program pelatihan untuk posisi direksi dan jabatan senior yang bertanggung jawab atas permasalahan ESG Metrik untuk Rencana Bagi-Bagi Bonus yang mencakup permasalahan ESG Indikator/Insentif/Hukuman Kinerja Utama bagi posisi direksi dan jabatan senior yang bertanggung jawab atas permasalahan ESG Program insentif tahunan Data tentang implementasi dan hasil aktual dari program/metrik tersebut Bukti lain yang relevan

<p>B.02.2 Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan keberimbangan gendernya di tingkat direksi dan manajemen senior.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan lintas kurun waktu yang berurutan, tentang persentase perempuan di tingkat direksi dan manajemen senior? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas intervensinya (program, prakarsa, dll.) untuk meningkatkan keberimbangan gender di tingkat manajemen senior? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan keberimbangan gender di tingkat manajemen senior? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase kaum perempuan di tingkat direksi dan manajemen senior, lintas kurun waktu yang berurutan dan berdasarkan target Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin Survei karyawan Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons Bukti lain yang relevan
<p>B.03 Pengungkapan Kontrak</p>		
<p>B.03.1 Tindakan</p>	<p>Perusahaan secara publik mengungkapkan seluruh dokumen hukum yang memberinya hak untuk melakukan ekstraksi sumber daya mineral di lokasi tambang.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Secara publik mengungkapkan semua dokumen hukumnya (misalnya, kontrak, surat izin, lisensi, sewa, konvensi, perjanjian) yang memberinya hak untuk melakukan ekstraksi sumber daya mineral di lokasi tambang? Membuat dokumen tersebut tersedia bebas di situs web perusahaan? Secara publik mengungkapkan semua dokumen ini sebagai dokumen dengan teks lengkap tanpa redaksi ulang atau pengurangan? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrak, izin, lisensi, sewa, konvensi, perjanjian, nama pertambangan lain untuk semua lokasi tambang Repositori/perpustakaan data terbuka yang terpusat tentang situs web perusahaan Dokumen dengan teks lengkap Lampiran Amandemen, pemutakhiran, dokumen dan perjanjian terkait Bukti lain yang relevan
<p>B.04 Transparansi Pajak</p>		
<p>B.04.1 Tindakan</p>	<p>Perusahaan mempraktikkan transparansi pajak di semua yurisdiksi pajaknya.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri secara publik:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengungkapkan struktur perusahaan yang mencantumkan semua yurisdiksi pajak yang menjadi wilayah pendaftaran bagi badan hukum perusahaan dan nama (misalnya, nama anak perusahaan atau cabang perusahaan) yang digunakan di tempat tersebut? Laporan tentang pendekatannya terhadap transparansi pajak, termasuk strategi yang berkaitan dengan eksistensinya di yurisdiksi rendah-pajak? Mengungkapkan semua insentif pajak dan pengurangan pajak yang diterima di tingkat lokal dan nasional di semua yurisdiksi pajak tempatnya mendaftarkan badan hukum perusahaan? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Nama dan negara registrasi untuk semua entitas perusahaan dan anak perusahaan Informasi tentang entitas perusahaan yang dimiliki sepenuhnya dan dimiliki sebagian (detail tentang kepemilikan dan kontrol) Kebijakan Manajemen Pajak Strategi pajak Laporan tentang pendekatan pajak dan transparansi pajak di dalam yurisdiksi produksi dan nonproduksi Data tentang bantuan keuangan dari pemerintah Data tentang tunjangan pajak dan hari libur yang diterima yang dipilah-pilah berdasarkan tingkat yurisdiksi dan pemerintah Informasi tentang negara produsen dan yurisdiksi nonproduksi Bukti lain yang relevan

B.05 Kepemilikan Manfaat yang Sebenarnya		
B.05.1	Perusahaan mengungkapkan para pemilik manfaat yang sebenarnya.	Contoh Jenis Bukti yang relevan
Tindakan	<p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri secara publik:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengungkapkan nama-nama pemilik manfaat yang sebenarnya (yaitu, tidak hanya pemegang saham langsung), dengan memerinci tingkat kepemilikan ambang batas yang berlaku pada pengungkapan ini? Mengungkapkan pola kepemilikan dan pelaksanaan kontrol? Mengidentifikasi para penerima manfaat yang merupakan orang-orang dengan ekspos politik dan mengungkapkan pemutakhiran informasi secara rutin? 	<ul style="list-style-type: none"> Detail tentang setiap kepemilikan ambang batas yang berlaku bagi pemilik yang dilaporkan secara publik Nama semua pemilik manfaat yang sebenarnya di atas tingkat kepemilikan ambang batas Nama dan detail tentang pemegang saham dalam jumlah yang sangat besar Detail tentang struktur kepemilikan, saham, dan kekuatan voting Detail tentang hubungan antara masing-masing pemilik manfaat yang sebenarnya dengan entitas hukum Detail tentang peran politik, eksposur politik, atau hubungan di kalangan pemilik manfaat yang sebenarnya Pemutakhiran rutin Bukti lain yang relevan
B.06 Pembayaran ke Negara-Negara Produsen		
B.06.1	Perusahaan secara publik mengungkapkan semua pembayaran yang dilakukannya ke pemerintah subnasional dan nasional, dengan memberikan data terpilah di tingkat proyek.	Contoh Jenis Bukti yang relevan
Tindakan	<p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Secara publik mengungkapkan informasi yang terpilah di tingkat proyek tentang semua pembayaran yang dilakukan ke pemerintah subnasional dan nasional? Membuat informasi ini tersedia bebas di situs web utama perusahaan? Memutakhirkan informasi ini setiap tahun? 	<ul style="list-style-type: none"> Data tentang pembayaran ke pemerintah yang dipilah-pilah berdasarkan proyek Data tentang pembayaran ke pemerintah yang dipilah-pilah berdasarkan tingkat dan kategori pemerintah Repositori/perpustakaan data terbuka yang terpusat tentang situs web perusahaan Pemutakhiran/perbandingan tahunan dengan tahun-tahun sebelumnya Akses terbuka ke data dan laporan sebelumnya Bukti lain yang relevan
B.07 Praktik-Praktik Lobi		
B.07.1	Jika memungkinkan, perusahaan secara publik mengungkapkan praktik-praktik lobi dan posisinya di semua yurisdiksi.	Contoh Jenis Bukti yang relevan
Tindakan	<p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri secara publik:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengungkapkan peran dan tanggung jawab orang-orang yang terlibat dalam aktivitas lobi di semua yurisdiksi? Mengungkapkan materi dari aktivitas lobi berikut hasil yang dicari? Mengungkapkan nama-nama pejabat publik atau institusi yang terlibat? 	<ul style="list-style-type: none"> Peran dan tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas lobi Repositori terpusat untuk aktivitas lobi Materi dari aktivitas lobi dan hasil yang dicari Repositori terpusat untuk aktivitas lobi Nama pejabat dan institusi yang terlibat Bukti lain yang relevan

B.08 Penandatanganan Kontrak dan Pemerolehan Sumber Daya yang Bertanggung Jawab

B.08.1

Tindakan

Perusahaan menerapkan sistem untuk mengidentifikasi dan menilai risiko hak asasi manusia, tenaga kerja, dan lingkungan yang berkaitan dengan pemasok dan kontraktornya.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan pemasok dan kontraktor seputar:

- a. Masalah hak asasi manusia?
- b. Masalah tenaga kerja?
- c. Masalah lingkungan?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan
- Prosedur operasi yang relevan
- Daftar periksa, pedoman, standar manajemen uji tuntas yang relevan
- Pedoman/kerangka kerja/templat penilaian risiko dan dampak yang relevan
- Deskripsi yang terperinci tentang pendekatan/proses untuk mengidentifikasi dan menilai risiko
- Bukti lain yang relevan



C Manajemen Daur Hidup

C.01 Manajemen Daur Hidup Tambang

C.01.1

Komitmen

Perusahaan berkomitmen untuk menempuh pendekatan daur hidup di sepanjang tahap pengembangan dan operasional proyeknya.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk menempuh pendekatan daur hidup di sepanjang tahap pengembangan dan operasional proyeknya?
- Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini?
- Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Kebijakan resmi yang didukung oleh manajemen senior
- Laporan dalam dokumen resmi perusahaan (misalnya, kode perilaku, daftar prinsip, sistem manajemen, standar, pedoman khusus, atau kerangka kerja, ...) yang didukung oleh manajemen senior, atau disebutkan secara tersurat dalam dokumen lain yang didukung oleh manajemen senior
- Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang individu/tim/subkomite yang spesifik di tingkat manajemen senior, meliputi deskripsi tentang tanggung jawab dan ruang lingkup
- Prosedur operasi perusahaan meliputi tanggung jawab manajemen senior
- Kelompok kerja/subkomite/departemen/satuan tugas yang mapan yang bertanggung jawab atas implementasi komitmen
- Deskripsi kerja pegawai yang relevan
- Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang mandat bagi saran dari luar
- Informasi terperinci tentang aktivitas yang relevan (pelatihan, lokakarya, prakarsa lain...)
- Bukti lain yang relevan

C.02 Proses Persetujuan Proyek

C.02.1

Tindakan

Perusahaan menerapkan sistem untuk mengintegrasikan kriteria ESG ke dalam proses bertahap (stage-gate) dalam pengambilan keputusan investasi.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk:

- Mengidentifikasi kriteria ESG untuk dipenuhi di masing-masing tahap dari proses pengambilan keputusan investasi?
- Menerapkan kriteria ESG yang sudah teridentifikasi ini di masing-masing tahap dari proses pengambilan keputusan investasi?
- Memastikan bahwa pegawai yang bertanggung jawab telah memenuhi kualifikasi dalam menerapkan kriteria ESG yang sudah teridentifikasi ini ke dalam proses pengambilan keputusan investasi?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan
- Prosedur operasi yang relevan
- Daftar periksa, pedoman, standar manajemen uji tuntas yang relevan
- Pedoman/kerangka kerja/templat penilaian risiko dan dampak yang relevan
- Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses
- Prosedur manajemen untuk keputusan investasi
- Kerangka Acuan Kerja komite yang bertanggung jawab atas keputusan investasi
- Bukti lain yang relevan

C.03 Penutupan Tambang dan Viabilitas Pascapenutupan

C.03.1 Tindakan	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengelola transisi pascapenutupan bagi masyarakat yang terdampak, agar dapat memastikan viabilitas yang berkelanjutan bagi sumber mata pencaharian mereka.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya:</i></p> <ol style="list-style-type: none">Mengidentifikasi, dari tahap paling awal dan dengan berkonsultasi bersama pemangku kepentingan lokal, dampak yang akan ditimbulkan oleh penutupan tambang mereka terhadap masyarakat yang terdampak?Menyusun rencana manajemen transisi pascapenutupan dari tahap paling awal dan dengan berkonsultasi bersama pemangku kepentingan lokal, yang bertujuan memastikan viabilitas sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak?Mempertimbangkan peluang pemanfaatan lahan pascapenutupan dalam menyusun rencana manajemen ini?	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none">• Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan• Prosedur operasi yang relevan• Pedoman/kerangka kerja/templat penilaian risiko dan dampak yang relevan• Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses• Prosedur manajemen yang relevan• Bukti lain yang relevan
C.03.2 Tindakan	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya menyusun rencana transisi pascapenutupan tambang yang adil bagi pekerja.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk:</i></p> <ol style="list-style-type: none">Mengidentifikasi, dari tahap paling awal, dampak yang akan ditimbulkan oleh penutupan tambang mereka terhadap pekerja?Menyusun rencana manajemen transisi pascapenutupan, dari tahap paling awal, yang memastikan viabilitas sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi pekerja?Menjalin kemitraan dengan pemerintah, industri atau perusahaan lain untuk menjawab kebutuhan sumber mata pencaharian pekerja?	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none">• Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan• Prosedur operasi yang relevan• Pedoman/kerangka kerja/templat penilaian risiko dan dampak yang relevan• Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses• Pedoman, standar manajemen yang relevan• Bukti lain yang relevan

<p>C.03.3 Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya terkait rehabilitasi tambang progresif.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang implementasi rencana rehabilitasi progresifnya di sepanjang operasi? Mengaudit dan/atau meninjau kinerjanya atas rehabilitasi tambang progresif? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan kinerjanya atas rehabilitasi tambang progresif? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelacakan data tentang implementasi rencana rehabilitasi progresif, lintas kurun waktu yang berurutan, di sepanjang operasi perusahaan • Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal • Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin • Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan • Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi • Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons • Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons • Bukti lain yang relevan
<p>C.03.4 Tindakan</p>	<p>Perusahaan mengungkapkan perjanjian jaminan keuangan atas kewajiban sosio-ekonomi yang berkaitan dengan penutupan dan pascapenutupan tambang.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri secara publik sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengungkapkan perjanjian jaminan keuangan untuk penutupan semua operasinya, yang berkaitan dengan pekerja dan masyarakat? Mengungkapkan perjanjian keuangan untuk menjamin tanggungan aspek sosio-ekonomi jangka panjang dari pascapenutupan? Mengungkapkan informasi ini secara terpilah sesuai proyek? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan jaminan keuangan bagi penutupan tambang dan kewajiban pascapenutupan, yang berkaitan dengan karyawan dan komunitas • Kesepakatan jaminan keuangan bagi penutupan tambang dan kewajiban pascapenutupan, yang berkaitan dengan karyawan dan komunitas yang meliputi aspek sosio-ekonomi • Kesepakatan jaminan keuangan dipilah-pilah berdasarkan lokasi tambang • Bukti lain yang relevan
<p>C.04 Uji Tuntas Merger, Akuisisi, dan Pelepasan</p>		
<p>C.04.1 Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk mengidentifikasi dan menilai risiko ESG potensial, termasuk hak asasi manusia, yang berkaitan dengan merger, akuisisi, dan pelepasan.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan bahwa uji tuntas terhadap merger, akuisisi, dan pelepasan turut mencakup:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Permasalahan lingkungan yang penting? Permasalahan sosial dan hak asasi manusia yang penting? Permasalahan tata kelola yang penting? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan • Prosedur operasi yang relevan • Pedoman/kerangka kerja/templat penilaian risiko dan dampak yang relevan • Daftar periksa, pedoman, standar manajemen uji tuntas yang relevan • Bukti lain



D Kesejahteraan Masyarakat

D.01 Hak Asasi Manusia

D.01.1

Komitmen

Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak-Hak Asasi Manusia dari PBB.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan UNGP?
- Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini?
- Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Kebijakan resmi yang didukung oleh manajemen senior
- Laporan dalam dokumen resmi perusahaan (misalnya, kode perilaku, daftar prinsip, sistem manajemen, standar, pedoman khusus, atau kerangka kerja, ...) yang didukung oleh manajemen senior, atau disebutkan secara tersurat dalam dokumen lain yang didukung oleh manajemen senior
- Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang individu/tim/subkomite yang spesifik di tingkat manajemen senior, meliputi deskripsi tentang tanggung jawab dan ruang lingkup
- Prosedur operasi perusahaan meliputi tanggung jawab manajemen senior
- Kelompok kerja/subkomite/departemen/satuan tugas yang mapan yang bertanggung jawab atas implementasi komitmen
- Deskripsi kerja pegawai yang relevan
- Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang mandat bagi saran dari luar
- Informasi terperinci tentang aktivitas yang relevan (pelatihan, lokakarya, prakarsa untuk menumbuhkan kesadaran...)
- Bukti lain yang relevan

D.01.2

Tindakan

Perusahaan menerapkan sistem, sesuai dengan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan Hak-Hak Asasi Manusia dari PBB, untuk melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia secara rutin di seluruh operasinya, untuk menilai dan mengatasi risiko hak-hak asasi manusia.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan menilai dampak nyata aktivitasnya terhadap hak asasi manusia?
- Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna mencegah, mengurangi, dan mempertimbangkan cara menyelesaikan dampak-dampak yang sudah teridentifikasi ini?
- Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan
- Prosedur operasi yang relevan
- Daftar periksa, pedoman, standar manajemen uji tuntas hak asasi manusia
- Pedoman/kerangka kerja/templat penilaian risiko dan dampak yang relevan
- Deskripsi yang terperinci tentang pendekatan/proses untuk mengidentifikasi dan menilai dampak
- Kotak alat dan toolkit yang relevan tentang mitigasi dampak
- Dokumen strategi yang relevan tentang pencegahan dan mitigasi dampak
- Jumlah strategi dan rencana operasi yang sudah diimplementasikan berikut status dari proses implementasi tersebut
- Bukti lain yang relevan

<p>D.01.3 Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya terkait manajemen masalah hak asasi manusia.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam menangani masalah hak-hak asasi manusia, termasuk data terpilah di tingkat lokasi tambang tentang implementasi proses uji tuntas hak asasi manusia? Mengaudit dan/atau meninjau kinerjanya dalam menangani masalah hak asasi manusia? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan kinerjanya dalam menangani masalah hak asasi manusia? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah lokasi tambang yang sudah mengimplementasikan proses uji tuntas hak asasi manusia dan status dari proses tersebut, lintas kurun waktu yang berurutan, di sepanjang operasi perusahaan Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal Data tentang pemeriksaan dadakan/rutin Hasil/buah dari survei komunitas Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons Bukti lain yang relevan
<p>D.01.4 Komitmen</p>	<p>Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak dan perlindungan yang diberikan kepada para pembela HAM di dalam wilayah operasinya.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk menghormati hak dan perlindungan yang diberikan kepada para pembela HAM di dalam wilayah operasinya? Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini? Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan resmi yang didukung oleh manajemen senior Laporan dalam dokumen resmi perusahaan (misalnya, kode perilaku, daftar prinsip, sistem manajemen, standar, pedoman khusus, atau kerangka kerja, ...) yang didukung oleh manajemen senior, atau disebutkan secara tersurat dalam dokumen lain yang didukung oleh manajemen senior Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang individu/tim/subkomite yang spesifik di tingkat manajemen senior, meliputi deskripsi tentang tanggung jawab dan ruang lingkup Prosedur operasi perusahaan meliputi tanggung jawab manajemen senior Kelompok kerja/subkomite/departemen/satuan tugas yang mapan yang bertanggung jawab atas implementasi komitmen Deskripsi kerja pegawai yang relevan Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang mandat bagi saran dari luar Informasi terperinci tentang aktivitas yang relevan (pelatihan, lokakarya, prakarsa untuk menumbuhkan kesadaran...) Bukti lain yang relevan

D.02 Keamanan dan Wilayah yang Terdampak Konflik	
<p>D.02.1 Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mencegah dan menyelesaikan pelanggaran HAM yang berkaitan dengan manajemen keamanan, sejalan dengan Prinsip-Prinsip Sukarela tentang Keamanan dan Hak-Hak Asasi Manusia.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM yang berkaitan dengan manajemen keamanannya? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM yang berkaitan dengan manajemen keamanannya? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM yang berkaitan dengan manajemen keamanannya? <p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan ciri khas insiden yang berkaitan dengan manajemen keamanan, berikut pemulihan yang diberikan, lintas kurun waktu yang berurutan, di sepanjang operasi perusahaan Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin Hasil/buah dari survei komunitas Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons Bukti lain yang relevan
<p>D.02.2 Tindakan</p>	<p>Jika memungkinkan, perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mengidentifikasi dan menilai risiko bagi pekerja dan masyarakat yang berkaitan dengan kehadiran operasi tambang di wilayah yang terdampak konflik dan rawan, serta merancang dan mengimplementasikan strategi untuk mengatasi risiko yang sudah teridentifikasi.</p> <p><i>Jika memungkinkan, di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan menilai risiko bagi pekerja dan masyarakat yang berkaitan dengan kehadiran mereka di wilayah yang terdampak konflik dan rawan? Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna mengatasi risiko yang sudah teridentifikasi ini? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis? <p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan Prosedur operasi yang relevan Daftar periksa, pedoman, standar manajemen uji tuntas yang relevan Pedoman/kerangka kerja/templat penilaian risiko dan dampak yang relevan Deskripsi yang terperinci tentang pendekatan/proses untuk mengidentifikasi dan menilai risiko Kotak alat dan toolkit yang relevan tentang mitigasi dampak Pedoman, standar manajemen yang relevan Jumlah strategi dan rencana operasi yang sudah diimplementasikan berikut status dari proses implementasi tersebut Bukti lain yang relevan

D.03 Keterlibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

D.03.1

Tindakan

Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan operasinya mengambil langkah-langkah khusus untuk memudahkan partisipasi perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas dalam diskusi dan pengambilan keputusan tentang permasalahan yang mungkin memengaruhi hidup mereka.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mengambil langkah-langkah khusus untuk memudahkan partisipasi:

- a. Perempuan dalam diskusi dan pengambilan keputusan tentang permasalahan yang mungkin memengaruhi hidup mereka?
- b. Pemuda dalam diskusi dan pengambilan keputusan tentang permasalahan yang mungkin memengaruhi hidup mereka?
- c. Penyandang disabilitas dalam diskusi dan pengambilan keputusan tentang permasalahan yang mungkin memengaruhi hidup mereka?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Kotak alat, toolkit, pedoman, prosedur operasi yang relevan
- Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses
- Bukti lain yang relevan

D.03.2

Efektivitas

Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas hubungannya dengan masyarakat terdampak.

Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:

- a. Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kualitas hubungannya dengan masyarakat terdampak?
- b. Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk membangun dan menjaga hubungan saling percaya dengan masyarakat terdampak?
- c. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna membangun dan menjaga hubungan saling percaya dengan masyarakat terdampak?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Hasil, statistik dari survei opini dan persepsi, di sepanjang operasi perusahaan
- Hasil dari program pemantauan hubungan masyarakat, di sepanjang operasi perusahaan
- Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal
- Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin
- Hasil/buah dari survei komunitas
- Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan
- Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi
- Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons
- Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons
- Bukti lain yang relevan

D.04 Viabilitas Ekonomi dan Sosial		
D.04.1 Tindakan	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mendorong kewirausahaan lokal dan mendukung pengembangan bisnis lokal, termasuk bagi perempuan.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana untuk mengembangkan kewirausahaan dan bisnis lokal? b. Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu melibatkan secara aktif perempuan dalam strategi dan rencana tersebut? c. Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan • Pedoman, standar manajemen yang relevan • Prosedur operasi yang relevan • Jumlah strategi dan rencana operasi yang sudah diimplementasikan berikut status dari proses implementasi tersebut • Bukti lain yang relevan
D.04.2 Tindakan	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mengembangkan peluang pengadaan lokal, termasuk bagi perempuan.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana untuk mengembangkan peluang pengadaan lokal? b. Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu melibatkan secara aktif perempuan dalam strategi dan rencana tersebut? c. Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan • Pedoman, standar manajemen yang relevan • Prosedur operasi yang relevan • Jumlah strategi dan rencana operasi yang sudah diimplementasikan berikut status dari proses implementasi tersebut • Bukti lain yang relevan
D.04.3 Tindakan	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak aktivitas mereka terhadap perempuan, generasi muda, dan anak-anak.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak aktivitas mereka terhadap perempuan? b. Melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak aktivitas mereka terhadap generasi muda? a. Melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak aktivitas mereka terhadap anak-anak? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotak alat, toolkit, pedoman, prosedur operasi penilaian yang relevan • Pedoman/kerangka kerja/templat penilaian risiko dan dampak yang relevan • Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses • Bukti lain yang relevan

<p>D.04.4 Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk menyempurnakan kinerjanya dalam mengatasi dampak sosio-ekonomi aktivitasnya terhadap masyarakat yang terdampak.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam mengatasi dampak sosio-ekonomi aktivitasnya di dalam masyarakat terdampak? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dampak sosio-ekonomi aktivitasnya di dalam masyarakat terdampak? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mengatasi dampak sosio-ekonomi aktivitasnya di dalam masyarakat terdampak? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan data tentang indikator sosio-ekonomi (kesempatan kerja, peluang pengadaan, pengembangan bisnis, pengembangan kecakapan, banjir populasi, rehabilitasi situs-tambang, pemberdayaan gender, dampak kesehatan dan keselamatan, kekacauan sosial, dll) lintas kurun waktu yang berurutan, di sepanjang operasi perusahaan • Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal • Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin • Hasil/buah dari survei komunitas • Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan • Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi • Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons • Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons • Bukti lain yang relevan
<p>D.05 Pemanfaatan Lahan</p>		
<p>D.05.1 Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan menilai dampak buruk terhadap pemanfaatan lahan dan akses lahan oleh masyarakat yang terdampak, dan merancang serta mengimplementasikan strategi dan rencana untuk meminimalkan dan mengurangi dampak buruk ini.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan menilai dampak buruk aktivitasnya terhadap pemanfaatan lahan dan akses lahan oleh masyarakat yang terdampak? Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna meminimalkan dan mengurangi dampak buruk ini? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan • Prosedur operasi yang relevan • Daftar periksa, pedoman, standar manajemen uji tuntas yang relevan • Pedoman/kerangka kerja/templat penilaian risiko dan dampak yang relevan • Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses untuk mengidentifikasi dan menilai dampak terhadap pemanfaatan lahan dan akses ke lahan oleh masyarakat yang terdampak • Kotak alat dan toolkit yang relevan tentang mitigasi dampak • Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses • Dokumen strategi yang relevan tentang pencegahan dan mitigasi dampak • Jumlah strategi dan rencana operasi yang sudah diimplementasikan berikut status dari proses implementasi tersebut • Bukti lain yang relevan

D.06 Kesehatan Masyarakat		
D.06.1 Tindakan	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak aktivitas mereka terhadap kesehatan masyarakat, dan mengimplementasikan rencana manajemen untuk mengatasi dampak tersebut.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu melaksanakan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak aktivitasnya terhadap kesehatan masyarakat? Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna mengatasi dampak tersebut? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan Prosedur operasi yang relevan Daftar periksa, pedoman, standar manajemen uji tuntas yang relevan Pedoman/kerangka kerja/templat penilaian risiko dan dampak yang relevan Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses Kotak alat dan toolkit yang relevan tentang mitigasi dampak Dokumen strategi yang relevan tentang pencegahan dan mitigasi dampak Jumlah strategi dan rencana operasi yang sudah diimplementasikan berikut status dari proses implementasi tersebut Bukti lain yang relevan
D.07 Kesetaraan Gender		
D.07.1 Efektivitas	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengatasi dampak aktivitasnya terhadap perempuan.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam mengatasi dampak aktivitasnya terhadap perempuan? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi dampak aktivitasnya terhadap perempuan? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mengatasi dampak aktivitasnya terhadap perempuan? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Hasil/buah dari penilaian dampak terhadap perempuan, lintas kurun waktu yang berurutan, di sepanjang operasi perusahaan Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin Hasil/buah dari survei komunitas Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons Bukti lain yang relevan

D.08 Masyarakat Adat

D.08.1

Tindakan

Jika memungkinkan, perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu merancang dan mengimplementasikan, melalui partisipasi yang inklusif, strategi dan rencana untuk menghormati hak, kepentingan, dan kebutuhan Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak oleh operasi pertambangan.

Jika memungkinkan, di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu:

- Mengidentifikasi, melalui partisipasi yang inklusif, semua Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak oleh pertambangan saat ini dan yang direncanakan berikut fasilitas kaitannya?
- Mengidentifikasi, melalui partisipasi yang inklusif, hak, kepentingan, dan kebutuhan Masyarakat Adat ini?
- Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi dan rencana, melalui partisipasi yang inklusif, untuk menghormati hak, kepentingan, dan kebutuhan Masyarakat Adat ini?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan
- Prosedur operasi yang relevan
- Daftar periksa, pedoman, standar manajemen yang relevan
- Pedoman/kerangka kerja/templat penilaian risiko dan dampak yang relevan
- Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses
- Kotak alat dan toolkit yang relevan tentang mitigasi dampak
- Daftar periksa, pedoman, standar manajemen uji tuntas yang relevan
- Bukti lain yang relevan

D.08.2

Efektivitas

Jika memungkinkan, perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam menghormati hak dan aspirasi Masyarakat Adat serta menghindari dampak buruk terhadap aktivitas mereka.

Jika memungkinkan, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:

- Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam menghormati hak dan aspirasi, dan menghindari dampak buruk aktivitasnya terhadap, Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak oleh pertambangan saat ini dan yang direncanakan berikut fasilitas kaitannya?
- Mengaudit dan/atau meninjau, berdasarkan patokan dan/atau target, efektivitas langkah-langkah yang diambilnya dalam menghormati semua hak dan aspirasi, dan menghindari dampak buruk aktivitasnya terhadap, Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak oleh pertambangan saat ini dan yang direncanakan berikut fasilitas kaitannya?
- Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan penyempurnaan kinerjanya dalam menghormati hak dan aspirasi, dan menghindari dampak buruk aktivitasnya terhadap, Masyarakat Adat yang berpotensi terdampak oleh pertambangan saat ini dan yang direncanakan berikut fasilitas kaitannya?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Pelacakan data lintas kurun waktu berurutan berdasarkan perjanjian yang ditandatangani bersama Masyarakat Adat, di sepanjang operasi perusahaan
- Pemantauan data tentang Indikator Kinerja Utama yang dikembangkan bersama Masyarakat Adat, di sepanjang operasi perusahaan
- Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal
- Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin
- Hasil/buah dari survei komunitas
- Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan
- Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi
- Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons
- Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons
- Bukti lain yang relevan

D.09 Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan		
D.09.1 Komitmen	<p>Perusahaan berkomitmen untuk menghormati hak Masyarakat Adat akan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC), dan untuk mendukung perluasan prinsip FPIC ke kelompok-kelompok lain yang terdampak-proyek.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk menghormati hak Masyarakat Adat akan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (FPIC), dan untuk mendukung perluasan prinsip FPIC ke kelompok-kelompok lain yang terdampak-proyek? Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini? Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Kebijakan resmi yang didukung oleh manajemen senior Laporan dalam dokumen resmi perusahaan (misalnya, kode perilaku, daftar prinsip, sistem manajemen, standar, pedoman khusus, atau kerangka kerja, ...) yang didukung oleh manajemen senior, atau disebutkan secara tersurat dalam dokumen lain yang didukung oleh manajemen senior Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang individu/tim/subkomite yang spesifik di tingkat manajemen senior, meliputi deskripsi tentang tanggung jawab dan ruang lingkup Prosedur operasi perusahaan meliputi tanggung jawab manajemen senior Kelompok kerja/subkomite/departemen/satuan tugas yang mapan yang bertanggung jawab atas implementasi komitmen Deskripsi kerja pegawai yang relevan Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang mandat bagi saran dari luar Informasi terperinci tentang aktivitas yang relevan (pelatihan, lokakarya, prakarsa untuk menumbuhkan kesadaran...) Bukti lain yang relevan
D.10 Pemindahan dan Pemukiman Kembali		
D.10.1 Tindakan	<p>Jika memungkinkan, perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan menilai dampak potensial pemindahan fisik dan/atau ekonomi secara paksa terhadap orang-orang yang terdampak proyek, dan merancang serta mengimplementasikan strategi dan rencana untuk menghindari, meminimalkan, dan mengurangi dampak yang teridentifikasi.</p> <p><i>Jika memungkinkan, di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menilai dampak potensial pemindahan fisik dan/atau ekonomi secara paksa terhadap orang-orang yang terdampak proyek? Mengembangkan strategi dan rencana untuk menghindari, meminimalkan, dan mengurangi dampak negatif? Melibatkan orang-orang yang terdampak proyek ke dalam penilaian dampak dan dalam pengembangan strategi untuk mengatasi dampak tersebut? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan Prosedur operasi yang relevan Daftar periksa, pedoman, standar manajemen uji tuntas yang relevan Pedoman/kerangka kerja/templat penilaian risiko dan dampak yang relevan Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses Kotak alat dan toolkit yang relevan tentang mitigasi dampak Dokumen strategi yang relevan tentang pencegahan dan mitigasi dampak Penilaian, rencana, dan strategi dampak melibatkan warga yang terdampak-proyek Bukti lain yang relevan

<p>D.10.2 Efektivitas</p>	<p>Jika memungkinkan, perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam memastikan perbaikan atau pemulihan sumber mata pencaharian warga menyusul pemukiman kembali secara paksa.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam memastikan perbaikan atau pemulihan sumber mata pencaharian warga menyusul pemukiman kembali secara paksa? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi pemukiman kembali secara paksa dengan cara yang menjamin perbaikan atau pemulihan sumber mata pencaharian warga? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mengatasi pemukiman kembali secara paksa dengan cara yang menjamin perbaikan atau pemulihan sumber mata pencaharian warga? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan data, berdasarkan target dan lintas kurun waktu yang berurutan, tentang restorasi/perbaikan sumber mata pencaharian menyusul pemukiman kembali sementara, di sepanjang operasi perusahaan • Hasil survei komunitas setelah pemukiman kembali, berdasarkan target dan lintas kurun waktu yang berurutan, di sepanjang operasi perusahaan • Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal • Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin • Hasil/buah dari survei komunitas • Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan • Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi • Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons • Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons • Bukti lain yang relevan
<p>D.11 Pertambangan Rakyat dan Skala Kecil</p>		
<p>D.11.1 Tindakan</p>	<p>Jika memungkinkan, perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu memfasilitasi keterlibatan masyarakat dan aktivitas pertambangan rakyat dan skala kecil (ASM) di dalam dan di seputar operasi mereka.</p> <p><i>Jika memungkinkan, di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan yang menjalankan aktivitas ASM di seputar operasinya? Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana melibatkan pemangku kepentingan yang teridentifikasi, termasuk melalui pembuatan perjanjian keterlibatan bilamana perlu? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan • Prosedur operasi yang relevan • Daftar periksa, pedoman, standar manajemen uji tuntas yang relevan • Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses • Kotak alat, toolkit, pedoman yang relevan tentang penetapan perjanjian keterlibatan • Jumlah strategi dan rencana operasi yang sudah diimplementasikan berikut status dari proses implementasi tersebut • Pelacakan data tentang jumlah perjanjian keterlibatan yang dibangun bersama dengan para pemangku kepentingan yang beroperasi dalam aktivitas ASM di seputar operasinya • Bukti lain yang relevan

<p>D.11.2 Tindakan</p>	<p>Jika memungkinkan, perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan peluang untuk mendukung program bantuan teknis dan/atau program sumber mata pencaharian alternatif bagi penambang ASM di sekitar operasi tambang mereka.</p> <p><i>Jika memungkinkan, di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menilai kebutuhan, dan kelayakan, pemberian dukungan teknis dan/atau sumber mata pencaharian bagi penambang ASM? Mengembangkan strategi dan rencana berdasarkan penilaian tersebut? Melibatkan penambang ASM ke dalam penilaian kebutuhan di atas dan dalam pengembangan strategi dan rencana apa pun? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan Prosedur operasi yang relevan Daftar periksa, pedoman, standar manajemen uji tuntas yang relevan Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses Kotak alat, toolkit, pedoman yang relevan tentang penetapan perjanjian keterlibatan Membutuhkan penilaian, rencana, dan strategi untuk melibatkan para penambang ASM Bukti lain yang relevan
<p>D.12 Keluhan dan Penyelesaian</p>		
<p>D.12.1 Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme keluhannya bagi masyarakat.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kelancaran dan aplikasi mekanisme keluhannya bagi masyarakat, termasuk jumlah dan sifat keluhan dan tindakan yang diambil sebagai responsnya? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas mekanisme keluhan bagi masyarakat? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas mekanisme keluhan bagi masyarakat? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah dan ciri khas keluhan di sepanjang kurun waktu berurutan, berikut tindakan yang diambil sebagai respons, di sepanjang operasi perusahaan Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin Hasil/buah dari survei komunitas Hasil survei kepuasan Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan Mekanisme keluhan yang sudah direvisi Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons Bukti lain yang relevan



E Kondisi Kerja

E.01 Kesehatan dan Keselamatan Kerja

E.01.1

Komitmen

Perusahaan berkomitmen untuk menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk menjamin kondisi kerja yang aman dan sehat?
- Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini?
- Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Kebijakan resmi yang didukung oleh manajemen senior
- Laporan dalam dokumen resmi perusahaan (misalnya, kode perilaku, daftar prinsip, sistem manajemen, standar, pedoman khusus, atau kerangka kerja, ...) yang didukung oleh manajemen senior, atau disebutkan secara tersurat dalam dokumen lain yang didukung oleh manajemen senior
- Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang individu/tim/subkomite yang spesifik di tingkat manajemen senior, meliputi deskripsi tentang tanggung jawab dan ruang lingkup
- Prosedur operasi perusahaan meliputi tanggung jawab manajemen senior
- Kelompok kerja/subkomite/departemen/satuan tugas yang mapan yang bertanggung jawab atas implementasi komitmen
- Deskripsi kerja pegawai yang relevan
- Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang mandat bagi saran dari luar
- Informasi terperinci tentang aktivitas yang relevan (pelatihan, lokakarya, prakarsa untuk menumbuhkan kesadaran...)
- Bukti lain yang relevan

E.01.2

Tindakan

Perusahaan menerapkan sistem untuk menjamin agar operasinya mampu melibatkan perwakilan pekerja untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengatasi risiko kesehatan dan keselamatan bagi tenaga kerjanya secara kolaboratif.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu melibatkan perwakilan pekerja untuk secara kolaboratif:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesehatan dan keselamatan bagi tenaga kerja?
- Mengembangkan strategi dan rencana untuk menghindari, meminimalkan, dan mengurangi risiko tersebut?
- Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan
- Prosedur operasi yang relevan, meliputi komite kesehatan dan keselamatan gabungan
- Daftar periksa, pedoman, standar manajemen uji tuntas yang relevan
- Pedoman/kerangka kerja/templat penilaian risiko yang relevan
- Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses
- Kotak alat dan toolkit yang relevan tentang mitigasi risiko
- Pedoman, standar manajemen yang relevan
- Dokumen strategi tentang pencegahan dan mitigasi risiko
- Jumlah strategi dan rencana operasi yang sudah diimplementasikan berikut status dari proses implementasi tersebut
- Bukti lain yang relevan

<p>E.01.3 Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu melindungi pekerja perempuan dari pelecehan dan kekerasan.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengambil langkah-langkah khusus untuk mencegah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Intimidasi dan pelecehan moral terhadap pekerja perempuan? Pelecehan seksual terhadap pekerja perempuan? Kekerasan terkait gender terhadap pekerja perempuan? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Prosedur operasi yang relevan, daftar periksa uji tuntas, pedoman, standar manajemen Pedoman/kerangka kerja/templat penilaian risiko yang relevan Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses Kebijakan pelecehan seksual dengan pedoman implementasi Standar khusus terkait gender Komite khusus yang menangani keluhan atau masalah terkait gender Bukti lain yang relevan
<p>E.01.4 Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan keselamatan para pekerja perempuan.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya memberikan hal-hal berikut yang sesuai gender:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Fasilitas sanitasi (misalnya: toilet, mandi)? Peralatan keselamatan (misalnya: APD yang dirancang untuk perempuan)? Layanan kesehatan (misalnya: untuk KB dan kesehatan seksual)? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Kotak alat, toolkit, pedoman, prosedur operasi, standar manajemen yang relevan Bukti lain yang relevan
<p>E.01.5 Tindakan</p>	<p>Perusahaan mengungkapkan data secara publik tentang insiden berpotensi tinggi terkait pertambangan, cedera parah, dan korban jiwa di kalangan angkatan kerjanya.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri secara publik:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengungkapkan jumlah insiden berpotensi tinggi terkait-pertambangan, cedera parah, dan korban jiwa di kalangan angkatan kerjanya, lintas kurun waktu yang berurutan? Mengungkapkan informasi tersebut dengan terpilah berdasarkan lokasi tambang? Memastikan laporan korban sudah meliputi korban jiwa pekerja kontrak dan karyawan? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah kecelakaan, cedera, dan korban jiwa terkait pertambangan lintas kurun waktu yang berurutan Data dipilah-pilah berdasarkan lokasi tambang Data dipilah-pilah berdasarkan jenis kontrak Bukti lain yang relevan

E.02 Penghapusan Kerja Paksa dan Pekerja Anak

E.02.1 Tindakan

Perusahaan menerapkan sistem untuk mengidentifikasi dan menilai potensi risiko segala jenis pekerja paksa, wajib kerja, pekerja korban perdagangan orang, dan pekerja anak di wilayah operasinya dan seluruh rantai pasokan, serta merancang dan mengimplementasikan strategi untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- Menerapkan sistem untuk mengidentifikasi dan menilai potensi risiko segala jenis pekerja paksa, wajib kerja, pekerja korban perdagangan orang, dan pekerja anak di wilayah operasinya dan seluruh rantai pasok?
- Menerapkan sistem untuk mengembangkan strategi dan rencana untuk mengatasi risiko yang teridentifikasi ini?
- Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan
- Prosedur operasi yang relevan
- Pedoman/kerangka kerja/templat penilaian risiko dan dampak yang relevan
- Deskripsi yang terperinci tentang pendekatan/proses untuk mengidentifikasi dan menilai risiko
- Jumlah strategi dan rencana operasi yang sudah diimplementasikan berikut status dari proses implementasi tersebut
- Bukti lain yang relevan

E.03 Nondiskriminasi dan Kesempatan yang Sama

E.03.1 Tindakan

Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mendasarkan praktik perekrutan dan ketenagakerjaan mereka pada prinsip kesempatan kerja yang sama agar dapat mencegah semua bentuk diskriminasi di tempat kerja dan mendukung keragaman tenaga kerja.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya:

- Mengambil langkah-langkah khusus untuk menuangkan kebijakan nondiskriminasi di dalam syarat dan ketentuan?
- Mengambil langkah-langkah khusus untuk mengimplementasikan pelatihan guna menumbuhkan kesadaran akan diskriminasi di kalangan staf manajemen dan pekerja atau mengambil tindakan lain yang bertujuan mencegah dan mengatasi masalah diskriminasi di tempat kerja?
- Menetapkan target menyangkut keragaman dan inklusivitas dalam praktik perekrutan dan ketenagakerjaan?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Kotak alat, toolkit, pedoman, prosedur operasi yang relevan
- Kebijakan tentang nondiskriminasi dengan pedoman terkait
- Bukti lain yang relevan

E.04 Hak untuk Berkumpul, Berunding Bersama, dan Kebebasan Berserikat

E.04.1

Tindakan

Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu secara aktif menghormati hak-hak pekerja untuk berkumpul, berunding bersama, dan kebebasan berserikat.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya menghormati hak-hak pekerja untuk:

- Berkumpul, termasuk dengan memberikan akses ke wilayah khusus bagi organisasi pekerja untuk menemui pekerja?
- Berunding bersama, termasuk dengan mengembangkan perjanjian kerja bersama secara formal?
- Kebebasan berserikat, termasuk dengan mengizinkan rapat serikat pekerja di tempat kerja?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Kotak alat, toolkit, pedoman, prosedur operasi yang relevan
- Kebijakan dengan pedoman implementasi terkait
- Bukti lain yang relevan

E.05

Upah Hidup

E.05.1

Efektivitas

Perusahaan melacak, meninjau, dan berupaya meningkatkan kinerjanya untuk memastikan upah pekerjaannya memenuhi atau melampaui standar upah hidup layak yang diakui, atau upah minimum yang sah, mana saja yang paling tinggi.

Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:

- Melacak dan mengungkapkan tingkat gaji pekerjaannya berdasarkan standar upah hidup, atau upah minimum yang sah, mana saja yang paling tinggi?
- Mengaudit dan/atau meninjau tingkat upah berdasarkan standar upah hidup, atau upah minimum yang sah, mana pun yang paling tinggi?
- Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan dari audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan perbaikan kinerjanya guna memastikan apakah upah pekerjaannya memenuhi atau melampaui standar upah hidup, atau upah minimum yang sah, mana saja yang paling tinggi?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Tingkat upah karyawan lintas kurun waktu yang berurutan berdasarkan standar upah hidup, di sepanjang operasi perusahaan
- Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal
- Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin
- Survei karyawan
- Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan
- Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi
- Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons
- Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons
- Bukti lain yang relevan

E.06**Manajemen Redundansi Kolektif****E.06.1****Komitmen**

Perusahaan berkomitmen untuk meminimalkan dan memitigasi redundansi kolektif jika terjadi perampangan, gangguan operasi, atau perubahan otomatisasi/teknologis, termasuk melalui keterlibatan pekerja.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk meminimalkan dan memitigasi redundansi kolektif jika terjadi perampangan, gangguan operasi, atau perubahan otomatisasi/teknologis, termasuk melalui keterlibatan pekerja?
- Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini?
- Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Kebijakan resmi yang didukung oleh manajemen senior
- Laporan dalam dokumen resmi perusahaan (misalnya, kode perilaku, daftar prinsip, sistem manajemen, standar, pedoman khusus, atau kerangka kerja, ...) yang didukung oleh manajemen senior, atau disebutkan secara tersurat dalam dokumen lain yang didukung oleh manajemen senior
- Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang individu/tim/subkomite yang spesifik di tingkat manajemen senior, meliputi deskripsi tentang tanggung jawab dan ruang lingkup
- Prosedur operasi perusahaan meliputi tanggung jawab manajemen senior
- Kelompok kerja/subkomite/departemen/satuan tugas yang mapan yang bertanggung jawab atas implementasi komitmen
- Deskripsi kerja pegawai yang relevan
- Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang mandat bagi saran dari luar
- Informasi terperinci tentang aktivitas yang relevan (pelatihan, lokakarya, prakarsa lain...)
- Bukti lain yang relevan

E.07**Jaminan Perlindungan Pekerja****E.07.1****Efektivitas**

Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan efektivitas mekanisme keluhannya bagi pekerja.

Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:

- Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kelancaran dan aplikasi mekanisme keluhannya bagi pekerja, termasuk jumlah dan sifat keluhan dan tindakan yang diambil sebagai responsnya?
- Mengaudit dan/atau meninjau, berdasarkan perspektif pihak yang mengeluh, efektivitas mekanisme keluhan bagi pekerja?
- Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan untuk mengupayakan peningkatan efektivitas mekanisme keluhan bagi pekerja?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Jumlah dan ciri khas keluhan yang diajukan oleh karyawan, berikut tindakan yang diambil sebagai respons, lintas kurun waktu yang berurutan di sepanjang operasi perusahaan
- Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal
- Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin
- Survei karyawan
- Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan
- Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi
- Mekanisme keluhan yang sudah direvisi
- Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons
- Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons
- Bukti lain yang relevan



F Tanggung Jawab Lingkungan

F.01 Pemeliharaan Lingkungan

F.01.1 Komitmen	Perusahaan berkomitmen untuk mengelola dampak lingkungannya secara sistematis melalui pendekatan hierarki mitigasi. <i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i> a. Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk mengelola dampak lingkungannya secara sistematis melalui pendekatan hierarki mitigasi? b. Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini? c. Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini?	Contoh Jenis Bukti yang relevan <ul style="list-style-type: none">• Kebijakan resmi yang didukung oleh manajemen senior• Laporan dalam dokumen resmi perusahaan (misalnya, kode perilaku, daftar prinsip, sistem manajemen, standar, pedoman khusus, atau kerangka kerja, ...) yang didukung oleh manajemen senior, atau disebutkan secara tersurat dalam dokumen lain yang didukung oleh manajemen senior• Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang individu/tim/subkomite yang spesifik di tingkat manajemen senior, meliputi deskripsi tentang tanggung jawab dan ruang lingkup• Prosedur operasi perusahaan meliputi tanggung jawab manajemen senior• Kelompok kerja/subkomite/departemen/satuan tugas yang mapan yang bertanggung jawab atas implementasi komitmen• Deskripsi kerja pegawai yang relevan• Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang mandat bagi saran dari luar• Informasi terperinci tentang aktivitas yang relevan (pelatihan, lokakarya, prakarsa lain...)• Bukti lain yang relevan
F.01.2 Tindakan	Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu melakukan dan mengungkapkan penilaian rutin terhadap dampak lingkungannya melalui pendekatan terpadu yang mempertimbangkan hubungan antara dampak sosio-ekonomi dengan dampak lingkungan. <i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya:</i> a. Mengidentifikasi kondisi dasar dan perubahan lingkungan melalui pendekatan terpadu? b. Mengidentifikasi dan menilai dampak lingkungan dari aktivitasnya melalui pendekatan terpadu? c. Menyajikan dan mendiskusikan hasil penilaian mereka tentang dampak lingkungan dengan masyarakat lokal secara rutin dan sistematis?	Contoh Jenis Bukti yang relevan <ul style="list-style-type: none">• Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan• Prosedur operasi yang relevan• Pedoman/kerangka kerja/templat penilaian risiko dan dampak yang relevan• Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses• Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan yang membutuhkan presentasi dan pembahasan tentang hasil dengan masyarakat lokal• Bukti lain yang relevan

F.02**Manajemen Limbah Tambang**

<p>F.02.1</p> <p>Komitmen</p>	<p>Perusahaan berkomitmen untuk tidak menggunakan sungai, danau, atau laut untuk membuang limbah tambang.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk tidak menggunakan sungai, danau, atau laut untuk membuang limbah tambang? Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini? Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan resmi yang didukung oleh manajemen senior • Laporan dalam dokumen resmi perusahaan (misalnya, kode perilaku, daftar prinsip, sistem manajemen, standar, pedoman khusus, atau kerangka kerja, ...) yang didukung oleh manajemen senior, atau disebutkan secara tersurat dalam dokumen lain yang didukung oleh manajemen senior • Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang individu/tim/subkomite yang spesifik di tingkat manajemen senior, meliputi deskripsi tentang tanggung jawab dan ruang lingkup • Prosedur operasi perusahaan meliputi tanggung jawab manajemen senior • Kelompok kerja/subkomite/departemen/satuan tugas yang mapan yang bertanggung jawab atas implementasi komitmen • Deskripsi kerja pegawai yang relevan • Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang mandat bagi saran dari luar • Informasi terperinci tentang aktivitas yang relevan (pelatihan, lokakarya, prakarsa lain...) • Bukti lain yang relevan
<p>F.02.2</p> <p>Tindakan</p>	<p>Perusahaan secara publik mengungkapkan informasi tentang lokasi dan keamanan semua fasilitas penyimpanan limbah tambangnya.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Mengungkapkan secara publik jumlah dan lokasi akurat semua fasilitas penyimpanan limbah tambang (termasuk fasilitas yang saat ini masih aktif dan fasilitas yang sedang direhabilitasi atau sudah ditutup)? Mengungkapkan secara publik metode pembangunan dan kategori bahaya (berdasarkan penilaian dampak) dari setiap fasilitas penyimpanan limbah tambangnya? Membuat data tersebut tersedia secara bebas di situs web perusahaan? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah dan lokasi semua fasilitas penyimpanan limbah tambang • Penilaian dampak risiko untuk semua fasilitas penyimpanan limbah tambang • Metode pembangunan dan kategori bahaya dari masing-masing fasilitas penyimpanan limbah tambangnya • Repositori/perpustakaan data terbuka yang terpusat tentang situs web perusahaan • Bukti lain yang relevan

<p>F.02.3 Efektivitas</p>	<p>Jika memungkinkan, perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk menyempurnakan kinerjanya dalam menangani risiko potensial yang berkaitan dengan fasilitas limbah tambangnya, termasuk kegagalan pipa saluran limbah dan bendungan limbah tambang.</p> <p><i>Jika memungkinkan, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam menangani risiko potensial yang berkaitan dengan fasilitas limbah tambangnya, termasuk kegagalan pipa saluran limbah dan bendungan limbah tambang? Menjalankan audit dan/atau peninjauan pihak ketiga terhadap efektivitas langkah-langkah yang sudah diambil untuk mengatasi risiko potensial yang berkaitan dengan fasilitas limbah tambangnya, termasuk rembesan dan kegagalan bendungan limbah tambang? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan dari audit pihak ketiga tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang sudah diambil untuk mengatasi risiko potensial yang berkaitan dengan fasilitas limbah tambangnya, termasuk kegagalan pipa saluran limbah dan bendungan limbah tambang? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasil/buah dari penilaian risiko yang terkait dengan fasilitas limbah tambang, lintas kurun waktu yang berurutan, di sepanjang operasi perusahaan • Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal • Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin • Survei karyawan • Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan • Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi • Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons • Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons • Bukti lain yang relevan
<p>F.03 Air</p>		
<p>F.03.1 Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu merancang dan mengimplementasikan strategi dan rencana pemeliharaan air, berdasarkan pendekatan daerah tangkapan air, untuk mengatasi keamanan air di wilayah yang terdampak bagi pengguna air saat ini dan yang akan datang serta lingkungan.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana pemeliharaan air, berdasarkan pendekatan daerah tangkapan air, untuk menghormati kebutuhan air dan hak pengguna air saat ini dan yang akan datang serta lingkungan? Menerapkan sistem agar operasinya mampu mengajak konsultasi pengguna air yang berpotensi terdampak ke dalam pengembangan strategi dan rencana pemeliharaan air tersebut? Melacak implementasi strategi pemeliharaan air ini secara sistematis? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotak alat, toolkit, pedoman, prosedur operasi yang relevan • Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses • Kotak alat, toolkit, pedoman, prosedur operasi yang relevan yang membutuhkan konsultasi dengan pengguna air yang berpotensi-terdampak dalam pembangunan strategi dan rencana pemeliharaan air • Jumlah strategi pemeliharaan air operasional yang sudah diimplementasikan berikut status dari proses implementasi tersebut • Bukti lain yang relevan

<p>F.03.2 Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya dalam mengurangi konsumsi air.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam mengurangi konsumsi air? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi konsumsi air? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mengurangi konsumsi air? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Data tentang konsumsi air, lintas kurun waktu yang berurutan dan berdasarkan target, di sepanjang operasi perusahaan Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons Bukti lain yang relevan
<p>F.03.3 Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya dalam mengurangi dampak buruk terhadap kualitas air.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam mengurangi dampak buruk terhadap kualitas air? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi dampak buruk terhadap kualitas air? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mengurangi dampak buruk terhadap kualitas air? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Data tentang kualitas air, lintas kurun waktu yang berurutan dan berdasarkan target, di sepanjang operasi perusahaan Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin Survei karyawan Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons Bukti lain yang relevan
<p>F.04 Kebisingan dan Getaran</p>		
<p>F.04.1 Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu membatasi dampak kebisingan dan getaran terhadap masyarakat, struktur bangunan, properti, dan satwa liar yang terdampak.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Secara rutin menilai, berdasarkan data awal/angka dasar, tingkat kebisingan dan getaran yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka? Mengembangkan strategi dan rencana untuk membatasi dampak kebisingan dan getaran yang ditimbulkan oleh aktivitas mereka terhadap wilayah di sekitarnya? Secara sistematis melibatkan masyarakat yang terdampak dan para pemangku kepentingan yang lain ke dalam pengembangan strategi tersebut? 	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> Kotak alat, toolkit, pedoman, prosedur operasi penilaian yang relevan Pedoman/kerangka kerja/templat penilaian risiko dan dampak yang relevan Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses Kotak alat dan toolkit yang relevan tentang mitigasi dampak Pedoman, standar manajemen yang relevan Dokumen strategi tentang pencegahan dan mitigasi dampak Kotak alat, toolkit, pedoman manajemen, standar, prosedur operasi yang relevan Bukti lain yang relevan

F.05 Keragaman Hayati dan Jasa Lingkungan

F.05.1

Komitmen

Perusahaan berkomitmen untuk tidak melakukan eksplorasi atau menambang di Situs Warisan Dunia dan untuk menghormati kawasan lindung bumi dan maritim yang lain yang ditetapkan untuk melestarikan warisan budaya atau alam.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- a. Meresmikan komitmen, yang didukung oleh manajemen senior, untuk tidak melakukan eksplorasi atau menambang di Situs Warisan Dunia dan untuk menghormati kawasan lindung bumi dan maritim yang lain yang ditetapkan untuk melestarikan warisan budaya atau alam?
- b. Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas ke manajemen senior atau direksi untuk menjalankan komitmen ini?
- c. Mengalokasikan sumber daya keuangan dan pegawai untuk mengimplementasikan komitmen ini?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Kebijakan resmi yang didukung oleh manajemen senior
- Laporan dalam dokumen resmi perusahaan (misalnya, kode perilaku, daftar prinsip, sistem manajemen, standar, pedoman khusus, atau kerangka kerja, ...) yang didukung oleh manajemen senior, atau disebutkan secara tersurat dalam dokumen lain yang didukung oleh manajemen senior
- Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang individu/tim/subkomite yang spesifik di tingkat manajemen senior, meliputi deskripsi tentang tanggung jawab dan ruang lingkup
- Prosedur operasi perusahaan meliputi tanggung jawab manajemen senior
- Kelompok kerja/subkomite/departemen/satuan tugas yang mapan yang bertanggung jawab atas implementasi komitmen
- Deskripsi kerja pegawai yang relevan
- Informasi terperinci (misalnya, Kerangka Acuan Kerja) tentang mandat bagi saran dari luar
- Informasi terperinci tentang aktivitas yang relevan (pelatihan, lokakarya, prakarsa lain...)
- Bukti lain yang relevan

F.05.2

Efektivitas

Perusahaan melacak, meninjau, dan melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerjanya terkait manajemen keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan.

Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah secara sistematis:

- a. Melacak dan mengungkapkan data, lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam manajemen keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan?
- b. Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengelola keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan?
- c. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mengelola keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Hasil/buah dari program manajemen keragaman hayati, yang mempertimbangkan layanan ekosistem, lintas kurun waktu yang berurutan, di sepanjang operasi perusahaan
- Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal
- Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin
- Survei karyawan
- Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan
- Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi
- Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons
- Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons
- Bukti lain yang relevan

F.06 Perubahan Iklim dan Efisiensi Energi

**F.06.1
Tindakan**

Perusahaan menerapkan sistem untuk mengidentifikasi dan melaporkan potensi implikasi perubahan iklim dari dampak operasi tambangnya saat ini dan yang akan datang terhadap masyarakat, pekerja, dan lingkungan, serta untuk merancang dan mengimplementasikan strategi adaptasi dan transisi yang tepat.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- a. Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan melaporkan potensi implikasi perubahan iklim dari dampak operasi tambangnya saat ini dan yang akan datang terhadap masyarakat, pekerja, dan lingkungan?
- b. Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna mengatasi implikasi tersebut?
- c. Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan
- Prosedur operasi yang relevan
- Pedoman/kerangka kerja/templat penilaian risiko dan dampak yang relevan
- Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses
- Pedoman, standar manajemen yang relevan
- Jumlah strategi dan rencana operasi yang sudah diimplementasikan berikut status dari proses implementasi tersebut
- Bukti lain yang relevan

**F.06.2
Efektivitas**

Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengatasi emisi gas rumah kaca (GRK) yang ditimbulkan oleh aktivitas dan penggunaan energinya.

Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan sudah secara sistematis:

- a. Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam mengatasi emisi gas rumah kaca (GRK) yang ditimbulkan oleh aktivitas dan penggunaan energinya?
- b. Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi emisi GRK yang ditimbulkan oleh aktivitas dan penggunaan energinya?
- c. Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan terus-menerus efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mengatasi emisi GRK yang ditimbulkan oleh aktivitas dan penggunaan energinya agar dapat meminimalkannya?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Data tentang emisi GRK yang ditimbulkan oleh semua aktivitas, lintas kurun waktu yang berurutan dan berdasarkan target
- Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal
- Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin
- Survei karyawan
- Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan
- Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi
- Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons
- Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons
- Bukti lain yang relevan

<p>F.06.3 Efektivitas</p>	<p>Perusahaan melacak, meninjau, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola konsumsi energi di sepanjang operasinya.</p> <p><i>Apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan sudah secara sistematis:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Melacak dan mengungkapkan data, berdasarkan target dan lintas kurun waktu yang berurutan, tentang kinerjanya dalam mengelola konsumsi energi di sepanjang operasinya? Mengaudit dan/atau meninjau efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengelola konsumsi energi di sepanjang operasinya? Mengambil tindakan responsif, berdasarkan temuan audit dan/atau tinjauan tersebut, untuk mengupayakan peningkatan efektivitas langkah-langkah yang diambil guna mengelola konsumsi energi di sepanjang operasinya? 	<p><i>Contoh Jenis Bukti yang relevan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Data tentang konsumsi energi yang mencakup semua aktivitas, lintas kurun waktu yang berurutan dan berdasarkan target • Audit/peninjauan/evaluasi/inspeksi eksternal atau internal • Informasi tentang pemeriksaan di tempat/rutin • Survei karyawan • Hasil/notula rapat peninjauan dengan kelompok kerja/komite yang relevan • Strategi/struktur manajemen/dll. di tingkat perusahaan yang sudah direvisi • Rencana aksi berjangka waktu yang disusun sebagai respons • Informasi terperinci tentang tindakan/prakarsa yang diambil sebagai respons • Bukti lain yang relevan
<p>F.07 Manajemen Bahan-Bahan Berbahaya</p>		
<p>F.07.1 Tindakan</p>	<p>Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan menilai risiko potensial yang berkaitan dengan pengangkutan, penanganan, penyimpanan, emisi, dan pembuangan bahan-bahan berbahaya, dan untuk merancang serta mengimplementasikan strategi dan rencana untuk mengatasi risiko yang sudah teridentifikasi.</p> <p><i>Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan berbahaya? Menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu mengembangkan strategi dan rencana guna mengatasi risiko ini? Melacak implementasi strategi dan rencana tersebut secara sistematis? 	<p><i>Contoh Jenis Bukti yang relevan</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Kotak alat, toolkit, atau pedoman penilaian yang relevan • Prosedur operasi, pedoman, standar manajemen yang relevan • Deskripsi terperinci tentang pendekatan/proses untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan berbahaya • Kotak alat dan toolkit yang relevan tentang mitigasi dampak • Pedoman, standar manajemen yang relevan • Prosedur operasi yang relevan • Jumlah strategi dan rencana operasi yang sudah diimplementasikan berikut status dari proses implementasi tersebut • Bukti lain yang relevan

F.08 Kesiapan Kedaruratan

F.08.1

Tindakan

Perusahaan menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya mampu melibatkan otoritas lokal, pekerja, dan masyarakat ke dalam pengembangan, pengomunikasian, dan pengujian kesiapan kedaruratan dan rencana tanggap darurat.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah menerapkan sistem untuk memastikan agar operasinya:

- a. Mengembangkan dan mempertahankan kesiapan kedaruratan dan rencana tanggap darurat?
- b. Melibatkan pemangku kepentingan lokal secara sistematis (misalnya, otoritas dan masyarakat lokal) ke dalam perancangan rencana tanggap darurat?
- c. Secara sistematis melibatkan pemangku kepentingan lokal ke dalam pengujian rencana tanggap darurat ini?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Pedoman, kotak alat, toolkit, prosedur operasi yang relevan
- Pedoman, standar manajemen yang relevan
- Bukti lain yang relevan

F.08.2

Tindakan

Perusahaan secara publik mengungkapkan semua Informasi yang relevan tentang jaminan keuangan yang diberikan untuk manajemen dan pemulihan bencana, di sepanjang operasinya.

Di tingkat korporasi, apakah perusahaan Anda dapat menunjukkan diri sudah:

- a. Secara publik mengungkapkan semua Informasi yang relevan tentang jaminan keuangan yang diberikan untuk manajemen dan pemulihan bencana?
- b. Menyertakan ketentuan jaminan keuangan khusus ke dalam informasi yang diungkap ini yang dipilah berdasarkan lokasi tambang?
- c. Memperbarui informasi ini setiap tahun?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Data tentang jaminan keuangan yang diberikan untuk manajemen dan pemulihan bencana
- Informasi tentang jaminan keuangan yang diberikan untuk manajemen dan pemulihan bencana
- Data dipilah-pilah berdasarkan lokasi tambang
- Bukti bahwa informasi tentang jaminan keuangan dimutakhirkan setiap tahun
- Akses terbuka ke periode pelaporan sebelumnya
- Bukti lain yang relevan

MS Indikator lokasi tambang



MS.01 Tenaga Kerja Lokal

MS.01

- Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan jumlah karyawannya yang diambil dari masyarakat lokal?
- Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan jumlah pekerja kontraknya yang diambil dari masyarakat lokal?
- Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan jumlah pekerja perempuannya yang diambil dari masyarakat lokal?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Data kuantitatif yang dipilah-pilah
- Bagan terperinci
- Bukti lain yang relevan

MS.02 Pengadaan Lokal

MS.02

- Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan jumlah uang yang dibelanjakan untuk barang dan jasa dari provinsi/negara bagian lokal?
- Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan jenis barang dan jasa yang diperoleh dari provinsi/negara bagian lokal?
- Apakah perusahaan mendiskusikan target programnya untuk pengadaan lokal dengan masyarakat lokal?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Data kuantitatif yang dipilah-pilah
- Bagan terperinci
- Notula rapat dengan masyarakat (juga: agenda, informasi yang diberikan sebelum rapat, hasil, dan rekomendasi/keputusan)
- Nawala, siaran radio, poster informasi, materi komunikasi yang lain
- Informasi dibagikan di jaringan sosial
- Grup fokus/aktivitas keterlibatan yang relevan terkait target pengadaan lokal
- Agenda dan hasil lokakarya yang relevan dengan para pemangku kepentingan yang terdampak proyek
- Bukti lain yang relevan

MS.03 Perencanaan Pascapenutupan

S.03

- Apakah perusahaan sudah memberi tahu masyarakat yang terdampak tentang kapan operasi pertambangan akan dihentikan atau ditutup secara permanen?
- Apakah perusahaan melibatkan masyarakat yang terdampak dalam menyusun rencana pascapenutupan?
- Apakah perusahaan mendiskusikan implementasi rencana pascapenutupannya dengan masyarakat lokal?

Contoh Jenis Bukti yang relevan

- Notula rapat dengan masyarakat lokal tentang perencanaan dan implementasi penutupan/pascapenutupan
- Identifikasi dan desain kolaboratif tentang peluang pascapenutupan dengan masyarakat
- Nawala, siaran radio, poster informasi, materi komunikasi yang lain
- Informasi dibagikan di jaringan sosial
- Grup fokus/aktivitas keterlibatan yang relevan terkait penutupan/pascapenutupan
- Agenda dan hasil lokakarya yang relevan dengan para pemangku kepentingan yang terdampak proyek
- Bukti lain yang relevan

MS.04 Keluhan Masyarakat	
MS.04	<p>a. Apakah perusahaan memiliki mekanisme keluhan bagi masyarakat lokal dan individu untuk mengadukan hal-hal yang menjadi keprihatinan?</p> <p>b. Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan jumlah dan jenis keluhan yang diadukan oleh masyarakat dan individu lokal?</p> <p>c. Apakah perusahaan mendiskusikan langkah-langkah yang diambilnya dengan masyarakat lokal untuk menghindari agar keluhan yang sama tidak diadukan berulang kali?</p>
	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi terperinci tentang mekanisme keluhan masyarakat • Nawala, siaran radio, poster informasi, materi komunikasi yang lain • Data kuantitatif yang dipilah-pilah • Bagan terperinci • Notula rapat dengan masyarakat tentang keluhan dan penyelesaian • Agenda dan hasil lokakarya yang relevan dengan para pemangku kepentingan yang terdampak proyek • Laporan tentang langkah-langkah yang diambil untuk memberikan penyelesaian • Hasil survei kepuasan • Bukti lain yang relevan
MS.05 Keluhan Pekerja	
MS.05	<p>a. Apakah perusahaan memiliki mekanisme keluhan bagi pekerjanya untuk mengadukan hal-hal yang menjadi keprihatinan?</p> <p>b. Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan jumlah dan jenis keluhan yang diadukan oleh pekerjanya?</p> <p>c. Apakah perusahaan mendiskusikan langkah-langkah yang diambilnya dengan perwakilan pekerja untuk menghindari agar keluhan yang sama tidak terus-menerus diadukan?</p>
	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi terperinci tentang mekanisme keluhan karyawan • Nawala, siaran radio, poster informasi • Data kuantitatif yang dipilah-pilah • Bagan terperinci • Notula rapat dengan karyawan tentang keluhan dan penyelesaian • Laporan tentang langkah-langkah yang diambil untuk memberikan penyelesaian • Hasil survei kepuasan • Bukti lain yang relevan
MS.06 Kualitas Udara	
MS.06	<p>a. Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan, secara rutin, data kualitas udara untuk setiap titik pemantauan?</p> <p>b. Apakah perusahaan menyoroti kapan dan di mana kualitas udara mengalami penurunan di bawah batas aman?</p> <p>c. Apakah perusahaan mendiskusikan tindakan yang diambilnya dengan masyarakat yang terdampak untuk menangani kualitas udara?</p>
	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data yang dipilah-pilah tentang kualitas udara di setiap titik pengukuran, berdasarkan nilai batas yang berlaku • Informasi terperinci tentang batas keselamatan yang berlaku • Bagan terperinci yang memperlihatkan kapan dan di mana kualitas udara mengalami penurunan di bawah batas aman • Notula rapat dengan masyarakat • Nawala, dukungan informasi yang digunakan untuk mengomunikasikan hasil • Agenda dan hasil lokakarya yang relevan dengan para pemangku kepentingan yang terdampak proyek • Bukti lain yang relevan

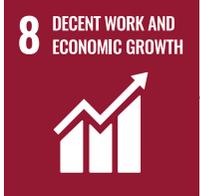
MS.07 Kualitas Air	
MS.07	<p>a. Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan, secara rutin, data kualitas air untuk setiap titik pemantauan?</p> <p>b. Apakah perusahaan menyoroti kapan dan di mana kualitas air mengalami penurunan di bawah batas aman?</p> <p>c. Apakah perusahaan mendiskusikan tindakan yang diambilnya dengan masyarakat yang terdampak untuk mengatasi kualitas air?</p>
	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data yang dipilah-pilah tentang kualitas air di setiap titik pengukuran, berdasarkan nilai batas yang berlaku • Informasi terperinci tentang batas keselamatan yang berlaku • Bagan terperinci yang memperlihatkan kapan dan di mana kualitas air mengalami penurunan di bawah batas aman • Notula rapat dengan masyarakat • Nawala, dukungan informasi yang digunakan untuk mengomunikasikan hasil • Agenda dan hasil lokakarya yang relevan dengan para pemangku kepentingan yang terdampak proyek • Bukti lain yang relevan
MS.08 Kuantitas Air	
MS.08	<p>a. Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan, secara rutin, jumlah air yang diambilnya dari lingkungan?</p> <p>b. Apakah perusahaan mendiskusikan cara mengelola kebutuhan air dengan masyarakat yang terdampak?</p> <p>c. Apakah perusahaan mendiskusikan tindakan yang diambilnya dengan masyarakat yang terdampak untuk mengurangi konsumsi airnya?</p>
	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data yang dipilah-pilah tentang kuantitas air yang diambil • Informasi terperinci tentang sumber air dan proses manajemen air • Notula rapat dengan masyarakat • Agenda dan hasil lokakarya yang relevan dengan para pemangku kepentingan yang terdampak proyek • Bukti lain yang relevan
MS.09 Manajemen Limbah Tambang	
MS.09	<p>a. Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan lokasi semua fasilitas limbah tambangnya secara akurat?</p> <p>b. Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan wilayah mana saja tepatnya yang berpotensi terdampak oleh kegagalan fasilitas limbah tambangnya?</p> <p>c. Apakah perusahaan sudah memberi tahu masyarakat yang terdampak tentang tindakan yang harus dilakukan untuk menghadapi insiden terkait limbah tambang?</p>
	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informasi terperinci tentang lokasi semua fasilitas limbah tambang • Data yang dipilah-pilah tentang fasilitas limbah tambang • Penilaian dampak kegagalan limbah tambang • Informasi terperinci tentang wilayah yang terdampak • Rencana gawat darurat khusus untuk bendungan limbah tambang dan fasilitas limbah yang lain • Notula rapat dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lokal yang lain tentang kesiapsiagaan darurat dan tanggapan terhadap insiden terkait limbah tambang • Agenda dan hasil lokakarya yang relevan dengan para pemangku kepentingan yang terdampak proyek • Nawala, siaran radio, poster informasi, materi komunikasi yang lain • Laporan tentang pelatihan dan pengujian dengan para pemangku kepentingan yang terdampak-proyek • Bukti lain yang relevan

MS.10 Kesiapan Kedaruratan	
MS.10	<p>a. Apakah perusahaan secara publik mengungkapkan rencana kesiapan kedaruratan dan tanggap daruratnya?</p> <p>b. Apakah perusahaan sudah memberi tahu masyarakat yang terdampak tentang tindakan yang harus dilakukan untuk menghadapi gawat darurat?</p> <p>c. Apakah perusahaan melibatkan masyarakat yang terdampak dalam menguji rencana tanggap daruratnya?</p>
	<p>Contoh Jenis Bukti yang relevan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana Kesiapsiagaan Darurat, rencana tanggap Darurat • Notula rapat dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lokal yang lain tentang kesiapsiagaan darurat dan tanggap darurat • Agenda dan hasil lokakarya yang relevan dengan para pemangku kepentingan yang terdampak proyek • Laporan tentang pelatihan dan pengujian dengan para pemangku kepentingan yang terdampak-proyek • Nawala, siaran radio, poster informasi, materi komunikasi yang lain • Bukti lain yang relevan

Lampiran 2

SDG: RMI 2020 mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB

Tabel ini memperlihatkan bidang-bidang yang memiliki kesesuaian luas antara indikator yang tercantum dalam RMI 2020 dengan target yang ditetapkan untuk setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

 <p>1 NO POVERTY</p>	<p>A.01.1 D.04.1 D.08.1 A.01.2 D.04.2 D.08.2 A.02.1 D.04.3 D.11.2 C.03.1 D.04.4 E.05.1 C.03.2 D.07.1 E.06.1</p>	 <p>6 CLEAN WATER AND SANITATION</p>	<p>F.03.1 F.03.2 F.03.3</p>
 <p>2 ZERO HUNGER</p>	<p>C.03.1 F.03.2 D.05.1 D.08.2 D.10.2 F.03.1</p>	 <p>7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY</p>	<p>F.06.3</p>
 <p>3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING</p>	<p>D.02.2 E.01.1 F.03.3 D.04.3 E.01.3 F.04.1 D.04.4 E.01.4 F.08.1 D.06.1 E.01.5 F.08.2 D.07.1 F.02.3</p>	 <p>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH</p>	<p>A.01.1 E.01.1 E.02.1 E.07.1 A.02.1 E.01.2 E.03.1 A.04.1 E.01.3 E.04.1 C.03.2 E.01.4 E.05.1 D.04.1 E.01.5 E.06.1</p>
 <p>4 QUALITY EDUCATION</p>	<p>A.04.1 A.04.2</p>	 <p>9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE</p>	<p>A.01.1 A.03.1 F.06.2 F.06.3</p>
 <p>5 GENDER EQUALITY</p>	<p>B.02.2 D.07.1 D.03.1 E.01.3 D.04.1 E.01.4 D.04.2 E.03.1 D.04.3</p>	 <p>10 REDUCED INEQUALITIES</p>	<p>A.01.1 B.05.1 D.04.2 E.03.1 A.02.1 B.06.1 D.04.3 A.04.1 B.07.1 D.07.1 B.02.2 D.03.1 D.08.1 B.04.1 D.04.1 E.01.4</p>



F.02.3	F.06.1
F.03.2	F.06.3
F.03.3	F.07.1
F.04.1	F.08.1
F.05.1	



B.08.1	F.01.1	F.03.2	F.06.3
C.01.1	F.01.2	F.03.3	F.07.1
C.02.1	F.02.1	F.05.1	F.08.1
C.03.3	F.02.3	F.05.2	F.08.2
C.04.1	F.03.1	F.06.2	



F.02.2	F.08.1
F.02.3	F.08.2
F.06.1	
F.06.2	
F.06.3	



F.02.1
F.02.3
F.05.1



C.03.3	F.05.1
C.03.4	F.05.2
F.01.1	
F.01.2	
F.04.1	



B.01.1	B.06.1	D.02.2	E.01.5
B.01.2	B.07.1	D.03.1	E.02.1
B.03.1	D.01.1	D.09.1	E.04.1
B.04.1	D.01.4	D.12.1	E.07.1
B.05.1	D.02.1	E.01.3	



A.03.1
B.03.1
B.04.1
B.06.1

Penafian

Isi dari dokumen ini *Responsible Mining Index Framework 2020* tidak serta-merta mewakili pandangan pemberi dana, wali, dan karyawan Responsible Mining Foundation (RMF), dan pihak-pihak lain yang ikut serta dalam konsultasi dan sebagai penasihat laporan.

Dokumen ini hanya dimaksudkan untuk keperluan informasi dan sama sekali bukan sebagai bahan promosi. Laporan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat atau rekomendasi akuntansi, hukum, pajak, atau investasi, tidak pula dimaksudkan sebagai tawaran atau bujukan untuk membeli atau menjual instrumen keuangan apa pun.

Meskipun segala upaya sudah ditempuh untuk memverifikasi akurasi terjemahan, versi Bahasa Inggris harus dianggap sebagai versi penentu. RMF berhak menerbitkan corrigenda di halaman webnya, dan pembaca dokumen *Responsible Mining Index Framework 2020* seyogianya membaca halaman web yang bersangkutan untuk mendapatkan koreksi atau klarifikasi.

www.responsibleminingfoundation.org

Pemberitahuan hak cipta

Semua data dan konten tertulis mendapatkan lisensi di bawah Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0). Pengguna bebas membagikan dan menyadur materinya, tetapi harus memberikan kredit yang sesuai, memberikan tautan ke lisensi, dan menunjukkan jika ada perubahan. Materi yang berlisensi tidak boleh digunakan untuk kepentingan komersial, atau digunakan secara diskriminatif, merendahkan, atau menimbulkan distorsi. Jika dikutip, atribusikan ke: "Responsible Mining Foundation (2019) Responsible Mining Index Framework 2020." Konten gambar, foto, dan video yang tercantum di situs web RMF dikecualikan dari lisensi ini, kecuali jika ada keterangan lain.



www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

www.responsibleminingfoundation.org